



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) TAHUN 2024-2026

PEMERINTAH KOTA PALOPO

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



KATA SAMBUTAN

Permasalahan kemiskinan masih menjadi persoalan besar dan menjadi agenda prioritas untuk penanganannya, proporsi orang miskin terhadap jumlah penduduk Kota Palopo tahun 2022 menurun menjadi 7,78% (BPS, 2022). Karakteristik kemiskinan masih melingkupi ketimpangan struktural yang mengakibatkan kesenjangan sehingga keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan papan), sementara sebagian lain permasalahan lebih rumit dicirikan dengan kekurangan aset produktif, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur layak.

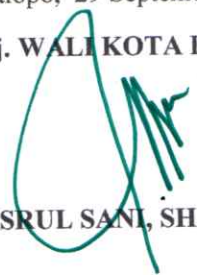
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah strategis, menyeluruh dan berkelanjutan sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan miskin ekstrim secara signifikan. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, konsisten, sistemik, dan komprehensif mengingat kompleksnya permasalahan yang akan diurai dalam berbagai urusan yang dikelola oleh dinas pengampu.

Sebagai sebuah kerja sistem, perencanaan penanggulangan kemiskinan membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar stakeholder melalui program dan kegiatan. Intervensi program dan kegiatan harus tepat sasaran kepada penerima manfaat. Oleh karena itu diperlukan suatu RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) untuk membentuk komitmen dan sinergitas lintas sektoral dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah, dan menjadi bahan untuk disinergikan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Periode Tahun 2024-2026

Pada akhirnya, saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama semua pihak dalam proses penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo sehingga angka kemiskinan. Namun kita tidak cepat berpuas diri karena masih ada pekerjaan rumah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim di Kota Palopo. Dokumen RPKD ini menjadi titik awal, mendorong untuk mengurangi angka kemiskinan ditahun 2024-2026.

Palopo, 29 September 2023

Pj. WALI KOTA PALOPO,



ASRUL SANI, SH., M.Si

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota telah mengatur kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah. Yang menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan di daerah dilaksanakan melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan tugas, melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah.

Selanjutnya, TKPKD Kota Palopo yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Palopo Nomor 214/IV/2022 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Palopo dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi di antaranya, “Penyusunan Rencana Penggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)”. Penyusunan RPKD dimaksudkan untuk membentuk komitmen dan sinergitas lintas sektoral dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah, dan menjadi bahan untuk disinergikan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Periode Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah secara menyeluruh.

RPKD Kota Palopo Periode Tahun 2024-2026 adalah RPKD yang seharusnya menjadi dokumen lima tahunan sesuai dengan periode RPJMD, namun sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 maka TKPKD Kota Palopo menganggap perlu menyusun RPKD agar bisa berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita politik kepala daerah dalam penanggulangan kemiskinan, dan secara substansi penyusunan RPKD ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu acuan penyusunan dokumen RPD Periode Tahun 2024-2026 sehingga RPKD yang minimal memuat kondisi umum daerah, profil kemiskinan, prioritas program, dan lokasi program menjadi bagian yang terintegrasi dengan dokumen RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026.

Mengawali dokumen ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyusunan dan penyelesaian dokumen ini. Terutama penajaman

aspek sasaran, program dan sinergi program, monitoring dan evaluasi, efektifitas anggaran, dan penguatan kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan daerah.

Kami berharap semoga kontribusi masing-masing pihak dapat menjadi sumbangsih dalam penanggulangan kemiskinan daerah Kota Palopo, sekaligus menjadi upaya mewujudkan Visi yang tercantum dalam RPJPD Kota Palopo Periode Tahun 2005-2025 yaitu “Menjadi Kota Moderen Terkemuka di Indonesia yang Berbasis Potensi Sumberdaya dan Kearifan Lokal serta Bernafaskan Religi dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Palopo, 2 September 2023

KEPALA BAPPEDA KOTA PALOPO



ASMURADI BUDI, ST., M.Env.Man

Pembina Tk. I / IVb

NIP. 19720520 200212 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN.....	4
1.3 DASAR HUKUM.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
 BAB II KONDISI UMUM DAERAH	 8
2.1 PEREKONOMIAN	8
2.2 GEOGRAFI	10
2.3 DEMOGRAFI.....	12
2.4 AKSES PELAYANAN PUBLIK	14
2.4.1 Bidang Pemerintahan	15
2.4.2 Bidang Pendidikan.....	16
2.4.3 Bidang Kesehatan	17
2.5 SOSIAL BUDAYA	18
2.6 CAPAIAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	21
 BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH.....	 25
3.1 KONDISI UMUM KEMISKINAN DAERAH	25
3.1.1 Garis dan Persentase Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrim	25
3.1.2 Jumlah Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrim	28
3.1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).....	30
3.1.5 Kondisi Ketimpangan Pengeluaran.....	35
3.2 BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH PENGAMPU PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	38
3.2.1 Pendidikan.....	38

3.2.2 Kesehatan	44
3.2.3 Perumahan dan Permukiman.....	49
3.2.4 Kewilayahan (Pemberayaan Kecamatan dan Kelurahan)	52
3.2.5 Ketenagakerjaan.....	55
3.2.6 Ketahanan Pangan.....	61
3.2.7 Pertanian dan Perkebunan	63
3.2.8 Kelautan dan Perikanan.....	65
3.2.9 Kependudukan dan Pengendalian Penduduk.....	67
3.2.10 Sosial	69
3.2.11 Perdagangan.....	72
3.2.12 Koperasi.....	74
3.2.13 Pekerjaan Umum	75
3.3 ANALISIS PERMASALAHAN KEMISKINAN	84
3.3.1 Analisis Makro	84
3.3.2 Analisis Mikro.....	86
3.3.3 Hasil Analisis Perkembangan antar Waktu, Relatif, Relevansi, dan Efektifitas, Profil Kemiskinan Kota Palopo Tahun 2017-2022.....	89
BAB IV PRIORITAS PROGRAM.....	94
4.1 PRIORITAS INTERVENSI	94
4.1.1 Teori Perubahan/ <i>Theory of Change</i>	94
4.1.2 Program Kegiatan Perangkat Daerah.....	112
4.3 ANALISIS ANGGARAN	121
4.3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	121
4.3.2 Kerangka Pendanaan	127
4.4 ANALISIS KAPASITAS FISKAL PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	140
BAB V LOKASI PRIORITAS	142
5.1 LOKASI PRIORITAS.....	142
5.1.1 Lokasi Prioritas Urusan Pendidikan	142
5.1.2 Lokasi Prioritas Urusan Kesehatan.....	143
5.1.3 Lokasi Prioritas Urusan Perumahan dan Permukiman	144
5.1.4 Lokasi Prioritas Urusan Sosial	146

5.1.5 Lokasi Prioritas Urusan Kewilayahan (Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan)	147
5.1.6 Lokasi Prioritas Urusan Ketenagakerjaan	148
5.1.7 Lokasi Prioritas Urusan Ketahanan Pangan	149
5.1.8 Lokasi Prioritas Urusan Pertanian Perkebunan Dan Peternakan.....	150
5.1.9 Lokasi Prioritas Urusan Kelautan Dan Perikanan	151
5.1.10 Lokasi Prioritas Urusan Kependudukan	152
5.1.11 Lokasi Prioritas Urusan Perdagangan	153
5.1.12 Lokasi Prioritas Urusan Koperasi.....	154
5.1.13 Lokasi Prioritas Urusan Pekerjaan Umum	155
5.1.14 Lokasi Prioritas Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.....	157
5.2 PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	158
5.2.1 Strategi Penanggulangan Kemiskinan	160
5.2.2 Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan.....	163
5.2.3 Kegiatan Perangkat Daerah Pengampu Penanggulangan Kemiskinan.....	167
5.2.3 Upaya Konkret yang Telah Dilaksanakan dan Berjalan	191

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Permasalahan Pembangunan Kota Palopo dan Isu Strategis 2024-2026	3
Tabel 2. Kondisi Topografi per Kecamatan Kota Palopo.....	12
Tabel 3. Hasil Pencapaian Akses Pelayanan Publik Kota Palopo Tahun 2022	15
Tabel 4. Program Kegiatan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022.....	17
Tabel 5. Hasil capaian program berkaitan penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo tahun 2018-2022	21
Tabel 6. Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	27
Tabel 7. Angka Partisipasi Sekolah Kota Palopo Tahun 2017-2022.....	44
Tabel 8. Rasio Angka Kematian Bayi.....	44
Tabel 9. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Palopo Tahun 2018 – 2022.....	45
Tabel 10. Angka Kematian Balita per-1000 Kelahiran Hidup	45
Tabel 11. Proporsi Kelahiran yang Ditolong Nakes Terlatih	46
Tabel 12. Angka Kematian Ibu Kota Palopo Tahun 2017-2022	46
Tabel 13. Prevalensi HIV / AIDS	47
Tabel 14. Cakupan Balita Gizi Buruk	47
Tabel 15. Rasio Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2018-2022.....	49
Tabel 16. Rasio Permukiman Layak Huni Kota Palopo Tahun 2018 – 2022	49
Tabel 17. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2018 – 2022.....	50
Tabel 18. Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kota Palopo Tahun 2018 – 2022.....	50
Tabel 19. Persentase Pemukiman yang Tertata Kota Palopo Tahun 2018 – 2022.....	51
Tabel 20. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kota Palopo Tahun 2018 – 2022.....	51
Tabel 21. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2018– 2022.....	52
Tabel 22. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kota Palopo Tahun 2018-2022.....	52
Tabel 23. Realisasi Kinerja Kewilayahan (Kelurahan) Tahun 2022	54
Tabel 24. Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja (Per Tahun).	57
Tabel 25. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	57
Tabel 26. Pencari Kerja yang Telah Ditempatkan (%).....	58
Tabel 27. Persentase Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	58
Tabel 28. Pekerja/Buruh Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	59
Tabel 29. Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo.....	59
Tabel 30. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan.....	60
Tabel 31. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2022	61
Tabel 32. Harga dan Neraca Pangan Rata-Rata per Bulan Kota Palopo Tahun 2021.....	62
Tabel 33. Kompilasi Produktivitas Tanaman Pangan Kota Palopo Tahun 2015-2022.....	63
Tabel 34. Jumlah Kelompok Tani yang Dibina dan Mendapatkan Bantuan Tahun 2015-2022	64
Tabel 35. Hasil Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Palopo Tahun 2021-2022	66
Tabel 36. Persentase Akseptor KB yang Mengikuti MKJP (%).....	69
Tabel 37. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	70
Tabel 38. Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2018-2022	70

Tabel 39 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	71
Tabel 40 Disabilitas yang Menerima Bantuan Sosial.....	71
Tabel 41 Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Penerima Jaminan Sosial.....	72
Tabel 42 Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2022.....	73
Tabel 43 Persentase Koperasi Aktif.....	74
Tabel 44 Persentase Usaha Mikro dan Kecil.....	75
Tabel 45 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berkondisi Baik	76
Tabel 46 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	76
Tabel 47 Persentase Jalan Kabupaten / Kota Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	77
Tabel 48 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m).....	78
Tabel 49 Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar	79
Tabel 50 Persentase Rumah Tinggal Bersantitas	79
Tabel 51 Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar.....	80
Tabel 52 Persentase Drainase Dalam Kondisi Tidak Baik / Pembuangan Aliran Air Tersumbat	81
Tabel 53 Persentase Terjadi Genangan Saat Hujan.....	81
Tabel 54 Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	82
Tabel 55 Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	82
Tabel 56 Persentase Rasio Jaringan Irigasi	83
Tabel 57 Persentase Penduduk Berakses Air Minum.....	84
Tabel 58 Hasil Estimasi Model (2)	86
Tabel 59. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Palopo 2024-2026.....	86
Tabel 60 Jumlah Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem per Kecamatan Tahun 2022	87
Tabel 61 Definisi Operasional Variabel.....	87
Tabel 62 Hasil Estimasi Persamaan Model (3)	88
Tabel 63. Hasil Analisis Perkembangan antar Waktu, Relatif, Relevansi, dan Efektifitas Kemiskinan Kota Palopo Tahun 2017-2022	89
Tabel 64. Solusi Permasalahan Permasalahan Kemiskinan Melalui Logika Program Kegiatan Perangkat Daerah Pengampu.....	113
Tabel 65 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2018-2022	122
Tabel 66. Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah 2018-2022	123
Tabel 67. Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah 2018-2022	124
Tabel 68. Alokasi dan Realisasi Belanja.....	126
Tabel 69. Pembiayaan Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2022.....	127
Tabel 70. Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kota Palopo Tahun 2023-2026	128
Tabel 71. Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kota Palopo Tahun 2024-2026	129
Tabel 72. Proyeksi Neraca Keuangan Daerah Tahun 2024-2026.....	131
Tabel 73. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota palopo	134
Tabel 74. Daftar Hibah CSR yang diterima oleh Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021	137

Tabel 75. Pengelompokan Kabupaten/Kota menurut Kapasitas Fiskal dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022	141
Tabel 76. Hasil Statistik Deskriptif Prioritas Intervensi Urusan Pendidikan	142
Tabel 77. Hasil Statistik Deskriptif Prioritas Intervensi Urusan Kesehatan	143
Tabel 78. Hasil Statistik Deskriptif Prioritas Intervensi Urusan Perumahan Permukiman ...	145
Tabel 79. Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim per Kelurahan Tahun 2022	146
Tabel 80. Prioritas Intervensi Kemiskinan Berdasarkan Kecamatan	147
Tabel 81. Hasil Statistik Deskriptif Prioritas Intervensi Urusan Pertanian Perkebunan dan Peternakan	150
Tabel 82. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Tahun 2027-2032 dan Jumlah Kepala Keluarga Miskin Belum Terakses Air Minum	156
Tabel 83. Strategi Penanggulangan dan Target Capaian Tahun 2024-2026	160
Tabel 84. Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024-2026	163
Tabel 85. Bidang Urusan Pendidikan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan	167
Tabel 86. Bidang Urusan Kesehatan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan	168
Tabel 87. Bidang Urusan Perumahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan	169
Tabel 88. Bidang Urusan Sosial Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan	170
Tabel 89. Bidang Urusan Kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan	175
Tabel 90. Bidang Urusan Ketenagakerjaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan	176
Tabel 91. Bidang Urusan Ketahanan Pangan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan	177
Tabel 92. Bidang Urusan Pertanian Peternakan dan Perkebunan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan	179
Tabel 93. Bidang Urusan Kelautan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan	181
Tabel 94. Bidang Urusan Kependudukan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan	183
Tabel 95. Bidang Urusan Perdagangan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan	184
Tabel 96. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan	186
Tabel 97. Bidang Urusan Koperasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan	187
Tabel 98. Bidang Urusan Perumahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan	189
Tabel 99. Bidang Urusan Pekerjaan Umum Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan	190

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Target Kemiskinan RPJMN Nasional dan RPJMD Kota Palopo.....	3
Gambar 2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kota Palopo Tahun 2011-2022 (%)	8
Gambar 3. Distribusi Persentase PDRB atas Lapangan Usaha Tahun 2022 (%).....	9
Gambar 4. Distribusi PDRB atas Dasar Pengeluaran Kota Palopo tahun 2022 (%).....	10
Gambar 5. Peta Kota Palopo	11
Gambar 6. Jumlah Penduduk Kota Palopo Tahu 2010-2022.....	12
Gambar 7. Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kota Palopo Tahun 2022.....	13
Gambar 8. Perbandingan Penduduk Lahir dan Penduduk Mati Kota Palopo Selama Tahun 2022	14
Gambar 9. Anggaran per Kecamatan (Rp X 100.000.000).....	16
Gambar 10. Angka Harapan Hidup Kota Palopo dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2022	18
Gambar 11. Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo	26
Gambar 12. Penduduk Miskin Ekstrim Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022 (%) ...	28
Gambar 13. Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim Kota Palopo Tahun 2022 (Jiwa).....	29
Gambar 14. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2022 (Jiwa).....	29
Gambar 15. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Palopo Tahun 2022...	31
Gambar 16. Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Palopo Tahun 2017-2022.....	31
Gambar 17. Analisis Efektifitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Palopo Tahun 2017-2022	32
Gambar 18. Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kota Palopo Tahun 2017-2022	32
Gambar 19. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Palopo Tahun 2017-2022	34
Gambar 20. Analisis Perkembangan antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Palopo Tahun 2017-2022.....	34
Gambar 21. Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Palopo Tahun 2017-2022	35
Gambar 22. Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Palopo Tahun 2017-2022	35
Gambar 23. Analisis Posisi Relatif Ketimpangan Pengeluaran Kota Palopo Tahun 2022.....	36
Gambar 24. Analisis Perkembangan Antarwaktu Ketimpangan Pengeluaran Kota Palopo Tahun 2018-2022	36
Gambar 25. Analisis Efektifitas Ketimpangan Pengeluaran Kota Palopo Tahun 2018-2022	37
Gambar 26. Analisis Relevansi Ketimpangan Pengeluaran Kota Palopo Tahun 2018-2022.	37
Gambar 27. Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2016-2022 (%).....	38
Gambar 28. Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2017 –2022	39
Gambar 29. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional (Tahun).....	40
Gambar 30. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Palopo Tahun 2016-2022 (%).....	41

Gambar 31. Angka Partisipasi Murni Kota Palopo Tahun 2016-2022 (%)	42
Gambar 32. Persentase Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Palopo.....	42
Gambar 33. Perbandingan HLS Kota Palopo dengan Provinsi Tahun 2010-2022	43
Gambar 34. Jumlah Kasus dan Prevalensi Stunting Kota Palopo Tahun 2020-2022.....	48
Gambar 35. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2017-2022 (%)	55
Gambar 36. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2017-2022 (%)	56
Gambar 37 Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan olah Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014-2022	60
Gambar 38 Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Kota Palopo Tahun 2022	63
Gambar 39. Penggunaan Luas Lahan Pertanian dan non Pertanian Tahun 2022.....	65
Gambar 40 Nilai Tukar Nelayan Tahun 2019-2022	66
Gambar 41. Potensi Perikanan non-Tangkap Kota Palopo (Luas Produksi Ha).....	67
Gambar 42 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2022 (%).....	68
Gambar 43. Kepesertaan PUS ber-KB Kota Palopo (Jiwa).....	68
Gambar 44 Inflasi Menurut Kelompok Bahan Pokok Kota Palopo Tahun 2019-2023 (M to M).....	73
Gambar 45 Teori Perubahan/ToC Bidang Pendidikan	94
Gambar 46 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan	95
Gambar 47 Teori Perubahan/ToC Bidang Kesehatan.....	96
Gambar 48 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan.....	97
Gambar 49 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan	99
Gambar 50 Teori Perubahan/ToC Bidang Ketenagakerjaan.....	99
Gambar 51 Teori Perubahan/ToC Bidang Ketahanan Pangan.....	100
Gambar 52 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Pangan	101
Gambar 53 Teori Perubahan/ToC Bidang Infrastruktur Dasar (Perumahan).....	103
Gambar 54. Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar (Perumahan dan Pekerjaan Umum).....	103
Gambar 55. Teori Perubahan/ToC Bidang Sosial	104
Gambar 56. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Urusan Sosial	105
Gambar 57. Teori Perubahan/ToC Bidang Pertanian Peternakan dan Perkebunan.....	106
Gambar 58. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Urusan Pertanian dan Peternakan	106
Gambar 59. Teori Perubahan/ToC Bidang Kelautan dan Perikanan	107
Gambar 60. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Urusan Perikanan	108
Gambar 61. Teori Perubahan/ToC Bidang Pengendalian Penduduk	109
Gambar 62. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Urusan Pengendalian Penduduk	109
Gambar 63. Teori Perubahan / TOC Bidang Koperasi	110
Gambar 64. Analisis Prioritas Intervensi Urusan Bidang Koperasi.....	111
Gambar 65. Teori Perubahan / TOC Bidang Perdagangan.....	111
Gambar 66. Analisis Prioritas Intervensi Urusan Bidang Perdagangan.....	112
Gambar 67. Pengelompokan Kabupaten/Kota berdasarkan Kapasitas Fiskal dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2020	140
Gambar 68. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada Urusan Pendidikan	143
Gambar 69. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada Urusan Kesehatan	144

Gambar 70. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada Urusan Perumahan	145
Gambar 71. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada Urusan Sosial	147
Gambar 72. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada Urusan Kewilayahan	148
Gambar 73. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada Urusan Ketenagakerjaan	149
Gambar 74. Peta Ketahanan Pangan Tahun 2022	150
Gambar 75. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada Urusan Pertanian Perkebuan dan Peternakan.....	151
Gambar 76. Jumlah Nelayan Miskin dan Miskin Ekstrim.....	151
Gambar 77. Lokasi Prioritas Kampung Nelayan.....	152
Gambar 78. Jumlah PUS yang Masuk Kategori Miskin dan Miskin Ekstrim.....	152
Gambar 79. Lokasi Prioritas Sasaran PUS Miskin.....	153
Gambar 80. Pedagang Masuk Kategori Miskin dan Miskin Ekstrim yang Perlu Intervensi	153
Gambar 81. Lokasi Prioritas Urusan Perdagangan.....	154
Gambar 82. Jumlah Wiraswasta masuk Data P3KE yang Menjadi Target Pelatihan Koperasi	154
Gambar 83. Lokasi Prioritas Urusan Koperasi.....	155
Gambar 84. Jumlah KK Miskin dan Miskin Ekstrim yang Belum Memiliki Sanitasi Dasar Layak	155
Gambar 85. Lokasi Prioritas Penyediaan Air Minum.....	157
Gambar 86. Lokasi Prioritas Advokasi Gender	158

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan kondisi keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan. Terbatasnya ekonomi dalam memenuhi kebutuhan tersebut membuat individu dikatakan miskin dan perlu mendapatkan suatu intervensi baik dari pemerintah maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Tidak semua individu didunia ini menginginkan untuk menjadi miskin, semua ingin sejahtera kehidupannya cukup sandang pangan dan tersedianya tempat berteduh. Kondisi miskin bukan merupakan suatu kutukan ataupun penyakit turunan yang disebabkan oleh generasi sebelumnya. Semua individu berpeluang untuk menjadi miskin, tinggal bagaimana upaya untuk keluar dari keadaan miskin. Pemerintah sudah mengatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Melalui amanah undang-undang negara berkewajiban untuk mengentaskan mereka kaum miskin agar berdaya dan mandiri ekonomi mampu untuk keluar dari kemiskinan.

Tidak hanya di Indonesia, kemiskinan menjadi isu global yang terjadi di seluruh dunia baik negara maju (*developed country*) dan negara berkembang (*developing country*). Permasalahan kemiskinan diangkat melalui tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai poin pertama prioritas yaitu *no poverty*. Amartya Sen memiliki konsep bahwa pembangunan ekonomi suatu negara harus dititik beratkan kepada pembangunan manusianya, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan tujuan hidupnya atau *development as freedom*, dengan adanya kebebasan dalam menjalani hidup seharusnya manusia di seluruh dunia ini mampu berusaha mengejar kesejahteraan atau minimal mencapai standart hidup layak. Konsep tersebut seharusnya dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada didunia ini, tetapi realitanya jumlah kemiskinan masih ada. Secara hitungan matematis kemiskinan tidak bisa dibuat sama dengan nol ($=0$), tetapi persamaan matematisnya harus diganti bahwa kemiskinan lebih besar dari nol (>0). Pelaksanaan yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini juga berorientasi untuk menekan angka kemiskinan melalui kebijakan pembangunan *pro poor* sehingga apa yang dikerjakan pemerintah harus ada tetesan (*trickle down effect*) bagi masyarakat bawah.

Isu kemiskinan tidak hanya dibahas pada tataran global, tetapi secara nasional sudah masuk dalam agenda perencanaan pembangunan nasional. Kemiskinan menjadi sasaran prioritas nasional didalam RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2020-2024 untuk “mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri, dan berkepribadian

berlandaskan gotong royong”. Penetapan kemiskinan sebagai sasaran prioritas RPJMN nasional, membuat daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai isu yang wajib dalam penyusunan dan perencanaan RPD (rencana pembangunan daerah). Sinkronisasi dokumen perencanaan dari tingkat pusat dan daerah memberikan kemudahan dan sinergi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Isu strategis kemiskinan yang menjadi permasalahan pokok dan mendasar adalah adanya ketimpangan pusat dan daerah serta ditambah ketimpangan pembangunan di pulau Jawa dan luar Jawa.

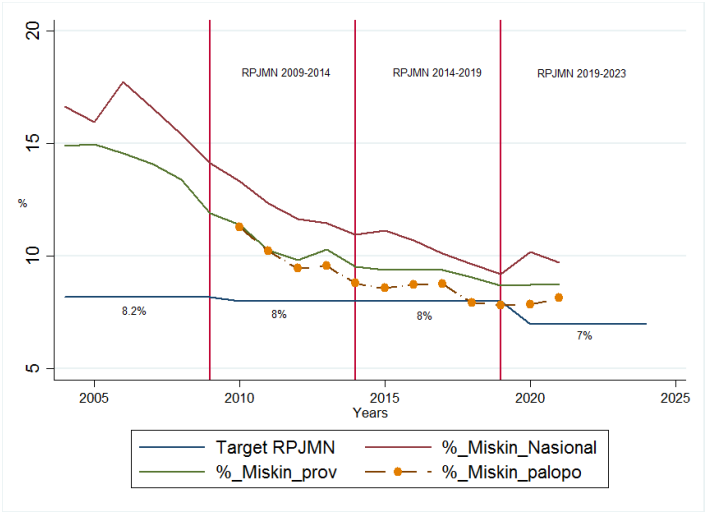
Upaya dalam melakukan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan hasil yang signifikan walaupun dibutuhkan waktu yang sangat panjang melalui periode pergantian presiden selama 7 (tujuh) kali, hanya untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dari 2 digit (23,4%) menjadi 1 digit (9,71%). Sejak krisis moneter tahun 1999 angka kemiskinan masih berada di posisi 23,4%, kemudian setelah terjadi reformasi yang ditandai dengan *lengser keprabon* pemerintahan orde baru angka kemiskinan menurun secara signifikan.

Dalam mengatasi penduduk miskin diperlukan sinergi dan kolaborasi antar pihak terkait. Pemerintah Indonesia menurunkan angka kemiskinan 9,71% tidak bekerja sendiri, tetapi ada sinergi serta kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Demi memunculkan angka 1 digit angka kemiskinan level nasional, pemerintah Kota Palopo memiliki andil lewat program dan kegiatan yang dilakukan baik bersumber dari pembiayaan daerah, pusat maupun sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan dan harus dilakukan secara sistematis, terfokus, terencana dan terkoordinasi. Dalam melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kota Palopo mempertimbangkan prinsip penanggulangan kemiskinan yang komprehensif. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagai tindak lanjut program dan kegiatan dilakukan oleh perangkat daerah terkait sesuai tugas dan fungsi yang ditetapkan. Agar dalam pelaksanaan dilapangan terkoordinasi antar setiap perangkat daerah maka dibentuklah landasan hukum yang mengaturnya yaitu melalui TKPK (tim koordinasi penanggulangan kemiskinan) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hasil capaian penanggulangan kemiskinan pada periode sebelumnya dan tertuang dalam RPKD (rencana penanggulangan kemiskinan daerah) terjadi penurunan namun masih jauh dari

target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 sebesar 5,99%. Angka kemiskinan Kota Palopo 7,78% tahun 2022, dan lebih rendah dari provinsi dan nasional.



Gambar 1. Target Kemiskinan RPJMN Nasional dan RPJMD Kota Palopo

Sumber : RPJMN;RPJMD Kota Palopo; BPS

Berdasarkan kondisi tersebut (gambar.1) perlu ditingkat upaya melalui program kegiatan berbasis data BNBA (*by name by address*) langsung tepat sasaran kepada penerima manfaat sehingga target untuk penduduk miskin sebesar 5,99% tercapai bahkan bisa mencapai 5%. Dalam perkembangan situasi kemiskinan terkini perlu juga mempertimbangkan permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Palopo dan isu strategis yang mengacu dengan perkembangan situasi regional, nasional, dan global (tabel.1).

Tabel 1. Permasalahan Pembangunan Kota Palopo dan Isu Strategis 2024-2026

Permasalahan
Lambatnya Perkembangan Kualitas SDM
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan
Tata Kelola dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Berdaya Saing
Akuntabilitas kinerja dan kepuasan masyarakat
Perkembangan Ekonomi Daerah Belum Berkualitas
Pengembangan Produksi, Produktifitas daerah dan Kualitas Pertumbuhan
Penanganan Masalah Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Pendapatan per kapita rendah dan adanya kemiskinan ekstrim

Permasalahan

Resiko Bencana yang masih tinggi dan Ancaman Degradasi Kualitas Lingkungan

Lingkungan Berkelanjutan, Resiko Bencana dan Kota Layak Huni

Isu Strategis Regional, Nasional, dan Global

Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Lambat

Penanganan kemiskinan ekstrim, kesetaraan gender, keahlian dan pelatihan masyarakat, dan pelayanan dasar

Pertumbuhan Ekonomi Belum Berdampak Positif Terhadap Kemiskinan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Pengembangan pusat ekonomi dan penyediaan lapangan kerja

Good and Clean Government dan Transformasi Layanan Publik

Akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, dan inovasi belum optimal

Potensi Bencana Masih Tinggi dan Pengelolaan Limbah Domestik Rumah Tangga

Penanganan kualitas lingkungan, penanggulangan bencana, dan penataan ruang publik

Sumber: RPD Kota Palopo 2024-2026; Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

Setelah teridentifikasi permasalahan dan isu strategis, maka penanggulangan kemiskinan ditempatkan sebagai agenda prioritas kebijakan pembangunan sehingga pembangunan yang selama ini fokus mengejar pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), juga diikuti dengan pembangunan manusia yang berfokus kepada penduduk miskin (*pro poor*) yang dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan angka ketimpangan *gini ratio*. Rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang disusun ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait agar terkoordinir dan secara kolaboratif melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo.

1.2 TUJUAN

Adapun tujuan disusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Palopo tahun 2024-2026 adalah:

- 1) Menegaskan komitmen pemerintah dan pihak terkait lain dalam penanggulangan kemiskinan di daerah;
- 2) Mengetahui kondisi umum dan karakteristik serta faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kota Palopo untuk menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah;

- 3) Merumuskan kebijakan, strategi, program, dan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo tahun 2024-2026.

RPKD ini juga memuat strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dituangkan dalam rencana aksi tahunan dengan tujuan untuk:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat
- 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat
- 3) Menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RPKD Kota Palopo tahun 2024-2026 mengacu kepada:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 7) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 9) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
- 12) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Palopo;
- 13) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 Kota Palopo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025;
- 14) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2013-2018;
- 15) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021;
- 16) Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 100.3.3.3/204/B.Hukum Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPKD ini mengacu pada Permendagri 53 Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut:

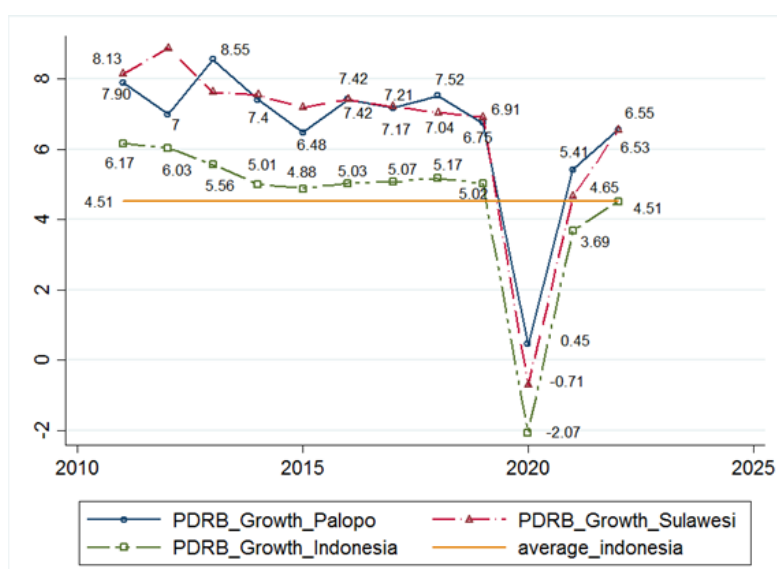
- 1) BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, tujuan, dasar hukum, dan sistematika penulisan dokumen.
- 2) BAB II Kondisi Umum Daerah, berisi tentang kondisi geografis dan demografis lalu kaitannya terhadap kondisi kemiskinan di daerah. Selanjutnya diuraikan capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- 3) BAB III, Profil Kemiskinan Daerah, berisikan Analisis karakteristik kemiskinan (makro dan mikro)
- 4) BAB IV, Prioritas Program, berisikan analisis akar masalah kemiskinan dan faktor-faktor pendorong dan penghambat intervensi
- 5) BAB V, Lokasi Prioritas, yang berisikan analisis kuadran wilayah untuk penentuan lokasi prioritas.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1 PEREKONOMIAN

Dilihat dari perkembangan aktivitas ekonominya Kota Palopo di tahun 2021 merupakan wilayah kotamadya di provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan kontribusi PDRB atas pengeluaran sebesar 1,6% atau urutan kedua setelah Kota Makassar, dan urutan ke-19 dari 24 kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo diukur dari pertumbuhan ekonomi tahunannya melalui pertumbuhan PDRB (*GDP Growth*) selama 10 tahun terakhir melalui PDRB atas harga konstan. Perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia disajikan gambar.2.

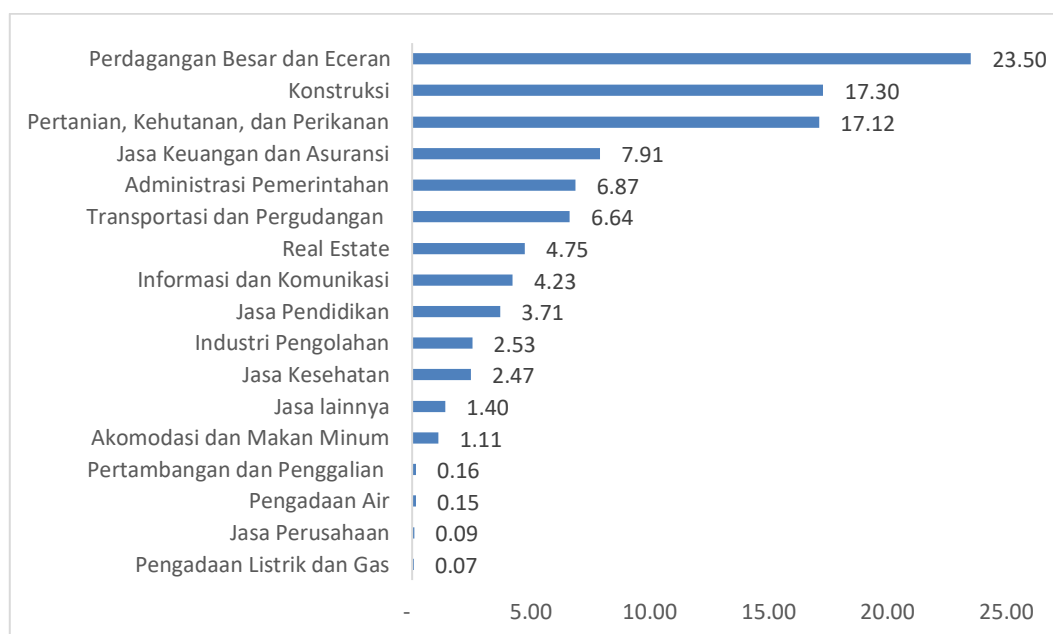


Gambar 2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kota Palopo Tahun 2011-2022 (%)
Sumber : BPS, 2011-2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tahun 2011 sebesar 7,90% berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan 8,13%, dan berada diatas tingkat nasional 6.17%. Selama perjalanan tahun 2011 s/d 2021 terdapat gejolak ekonomi yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi baik di level provinsi maupun nasional. Gejolak ekonomi disebabkan adanya pandemi COVID-19 tahun 2020 yang berdampak terhadap kontraksi ekonomi nasional -2.07%, provinsi Sulawesi Selatan -0,71%. Kota Palopo dapat menekan kontraksi ekonomi pada level positif 0,45% lebih baik daripada nasional dan provinsi. Tahun kedua setelah pandemi berjalan pertumbuhan ekonomi kembali normal bernilai positif baik nasional, provinsi, dan Kota Palopo. Kemudian tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Palopo meningkat menjadi 6,55% daripada tahun sebelumnya yang hanya 5,41%.Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya Kota

Palopo dengan asumsi tidak adanya kontraksi yang disebabkan COVID-19 sebesar 7,16%, tetapi adanya COVID-19 membuat turun menjadi 6,55%. Kondisi Kota Palopo lebih baik daripada provinsi 6,53%, dan nasional 4,51%.

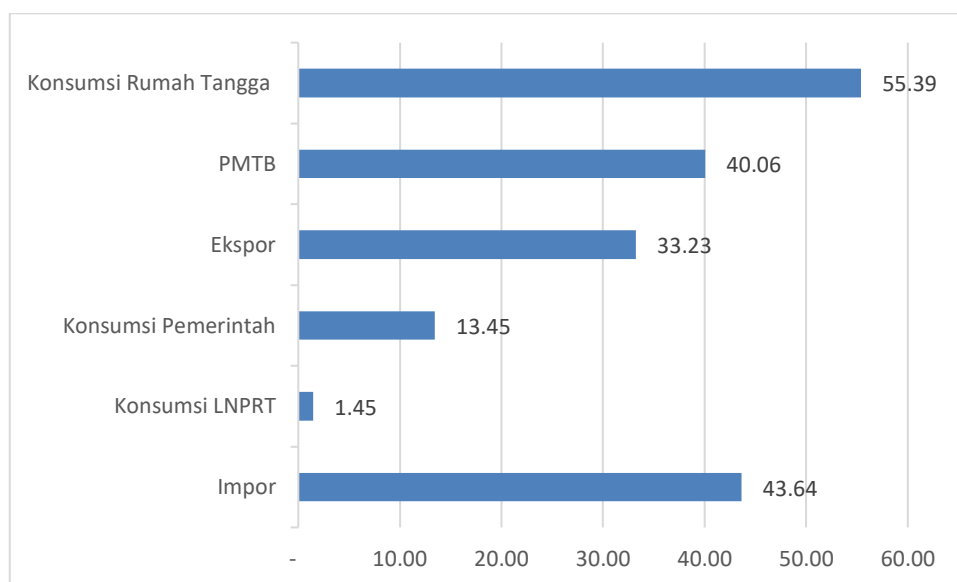
Kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah diukur melalui pendekatan lapangan usaha dan pengeluaran. Semakin besar nilai tambah ekonomi mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di daerah tersebut tinggi. Seperti dalam teori ekonomi secara sederhana PDB dapat dilihat dari total keseluruhan output agregat suatu negara yang dihasilkan dari variable konsumsi, investasi, net ekspor impor, dan pengeluaran pemerintah. Kemudian dalam perhitungan untuk level regional atau provinsi dan kabupaten/kota BPS menggunakan pendekatan lapangan usaha dan pengeluaran. Untuk menangkap aktivitas pertumbuhan ekonomi secara riil di daerah setiap tahunnya, maka indikator ukuran yang dilihat adalah PDRB lapangan usaha atas dasar harga konstan. PDRB atas lapangan usaha diambil dari 17 lapangan usaha yang mencakup sektor ekonomi usaha pertanian sampai dengan jasa kesehatan, kegiatan sosial



Gambar 3. Distribusi Persentase PDRB atas Lapangan Usaha Tahun 2022 (%)
Sumber :BPS Kota Palopo, 2023

Berdasarkan rata-rata distribusi PDRB atas dasar lapangan usaha selama tahun 2022, menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Palopo yang diukur atas dasar output agregat lapangan usaha, sektor yang berperan besar dalam menyumbang nilai tambah ekonomi adalah perdagangan besar eceran, dan reparasi mobil motor kemudian diikuti konstruksi, dan pertanian perikanan dan kehutanan. Dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kota Palopo adalah kota perdagangan dan jasa.

Dari sisi PDRB atas dasar pengeluaran Kota Palopo terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, PMTB, Ekspor, dan impor sebagai faktor pengurang. Pada tahun 2022, sebesar 95,45 persen dari total pendapatan agregat Kota Palopo digunakan untuk konsumsi rumahtangga (55,39 persen) dan PMTB (40,06 persen). Namun demikian, porsi pengeluaran untuk impor barang dan jasa cenderung tinggi yakni sebesar 43,64 persen pada tahun 2022.



Gambar 4. Distribusi PDRB atas Dasar Pengeluaran Kota Palopo tahun 2022 (%)
Sumber : BPS Kota Palopo, 2022

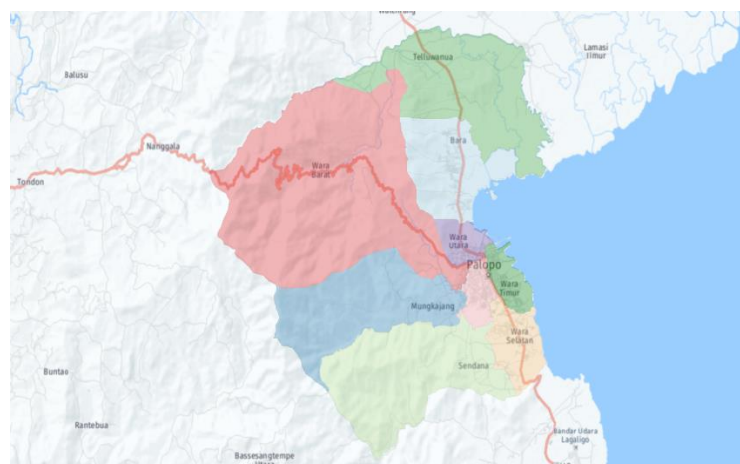
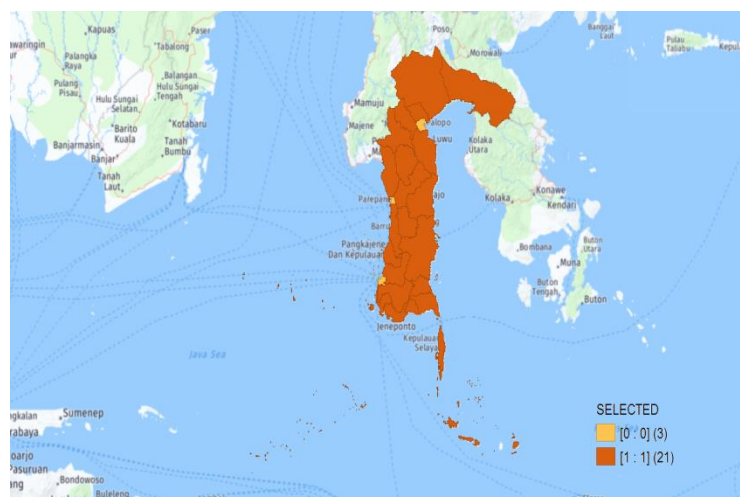
Konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama PDRB atas pengeluaran yaitu 55,39%, yang diikuti PMTB dan impor. Kondisi di tahun 2022 terjadi perubahan dari tahun sebelumnya tahun 2021, dimana PMTB menjadi kontributor utama PDRB atas pengeluaran yang diikuti pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) 27,11%, dan terakhir adalah konsumsi rumah tangga 23,77%. Hasil ini mengindikasikan bahwa kondisi sebelumnya masih dipengaruhi imbas COVID-19 yang terlihat pengeluaran konsumsi rumah tangga turun. Kegiatan ekonomi di masyarakat tahun 2022 mulai bergerak kembali yang terlihat dari indikator pengeluaran konsumsi yang kembali bergerak meningkat.

2.2 GEOGRAFI

Kota Palopo berada di jazirah utara Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada koordinat antara 2°53'15"-3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10"- 120°14'34" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi yang meliputi 9 (sembilan) kecamatan dan 48 (empat puluh delapan) kelurahan. Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar adalah 370 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1 – 5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan

Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km. Terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dengan 48 (empat puluh delapan) kelurahan. Setiap kecamatan memiliki antara 4 – 7 kelurahan. Pusat pemerintahan Kota Palopo berada di Kecamatan Wara.

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km persegi atau mencakup 21,87 persen dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km persegi atau hanya sebesar 4,27 persen dari luas Kota Palopo. Secara administratif, berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah utara dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah selatan. Batas sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara dan sebelah timur berbatasan Teluk Bone.



Gambar 5. Peta Kota Palopo
Sumber :Badan Informasi Geospasial

Kondisi topografi Kota Palopo berbentuk permukaan datar, berbukit dan pegunungan yang memiliki kemiringan <40% dan >40% seperti ditampilkan tabel.2.

Tabel 2. Kondisi Topografi per Kecamatan Kota Palopo

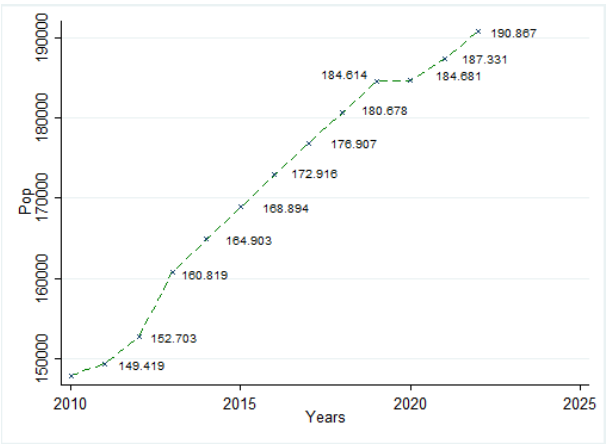
Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Tingkat Kemiringan Lereng per Km ²		
		≤ 15 %	>15 - <40 %	>40 %
Wara Selatan	10,66	7,46		
Wara	11,49	11,49		
Wara Timur	12,08	12,08		
Wara Utara	10,58	6,35		
Bara	23,35	7,01		
Telluwanea	34,34	3,43		
Mungkajang	53,80		16,14	
Sendana	37,09			22,54
Wara Barat	54,13			48,72

Sumber : BPS Kota Palopo, 2022

Kemiringan ≤ 15 % merupakan kecamatan yang wilayahnya terletak di daerah pesisir laut yang berbatasan dengan teluk Bone, sedangkan wilayah kecamatan yang berada di daerah perbukitan seperti kecamatan Mungkajang tingkat kemiringan >15 - <40 % per km² adalah kecamatan yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Luwu dan kabupaten Toraja. Kemiringan meliputi kecamatan Wara Selatan. Terakhir adalah wilayah dengan kemiringan lereng >40% yaitu kecamatan Sendana dan Wara Barat terletak di daerah lereng pegunungan yang berbatasan dengan kabupaten Toraja dan Toraja Utara.

2.3 DEMOGRAFI

Secara demografi Penduduk Kota Palopo pada tahun 2022 tercatat sebanyak 190.867 jiwa, dan masih mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun (gambar.6).

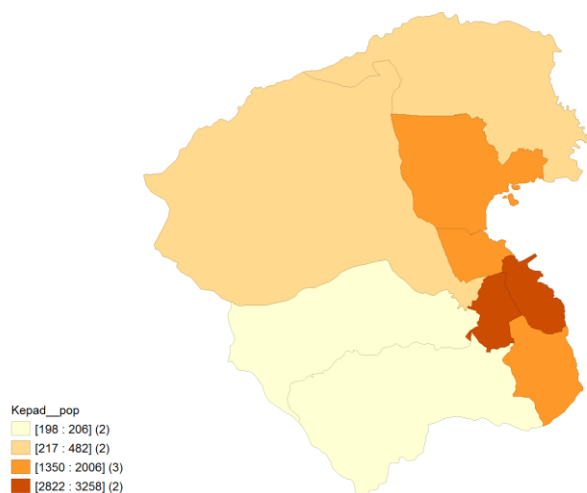


Gambar 6. Jumlah Penduduk Kota Palopo Tahu 2010-2022

Sumber : BPS Kota Palopo, 2010-2023

Secara terinci menurut jenis kelamin masing masing 95.562 jiwa laki-laki dan 93.305 jiwa perempuan, dengan demikian terjadi peningkatan jumlah penduduk laki-laki, dibandingkan

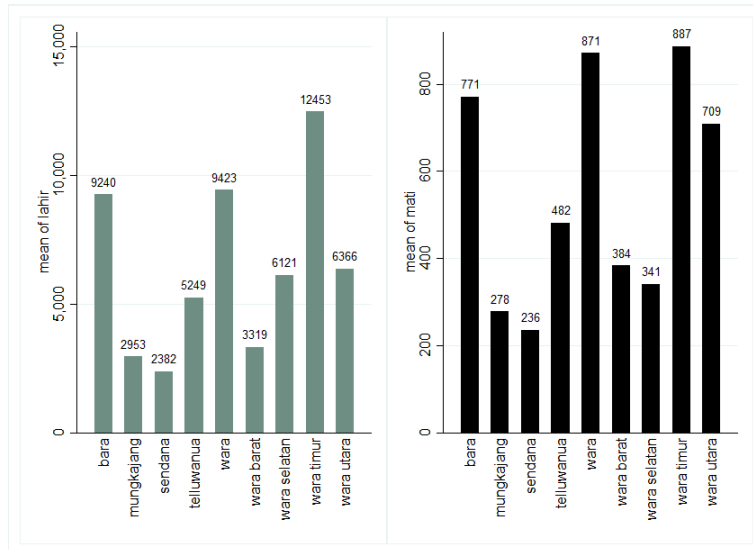
dengan penduduk perempuan tahun sebelumnya laki-laki 87.812 jiwa dan perempuan 92.866 jiwa. Kota memiliki luas daerah 247.52 Km² dengan kepadatan penduduknya di Kota Palopo yaitu 730 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tinggi yakni Kecamatan Wara timur dengan 3.258 jiwa/km persegi, kemudian kecamatan yang memiliki kepadatan penduduknya terendah ialah kecamatan Mungkajang yaitu 198 jiwa/km persegi (gambar.7).



Gambar 7. Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kota Palopo Tahun 2022
Sumber :Badan Informasi Geospasial, diolah

Rata-rata kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbanyak adalah kecamatan yang memiliki akses langsung terhadap pantai atau perairan teluk Bone. Kecamatan yang terpadat yaitu Wara Timur, Wara Selatan, Wara Utara, dan Bara. Kecamatan Telluwanua tidak masuk dalam jumlah kepadatan penduduk walaupun berada di pesisir dikarenakan topografinya merupakan luasan hutan bakau sehingga tidak langsung berdekatan bibir pantai dengan permukiman, kemudian mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Berbeda dengan ketiga wilayah lain yang terdapat banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan adanya akses langsung bibir pantai dengan kawasan permukiman.

Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, dan kematian alami maupun migrasi. Faktor tersebut merupakan bagian dari dinamika penduduk dan kota. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo tahun 2022 (Gambar.8), angka kelahiran dan kematian yang tertinggi berada di kecamatan Wara Timur. Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Palopo disebabkan oleh beberapa hal antara lain pusat perekonomian di wilayah Luwu raya sehingga menjadi daya tarik masyarakat diluar Kota Palopo untuk mencari pekerjaan dan kemudian menetap; Palopo sebagai salah satu kota tujuan pendidikan, dengan adanya 13 (tiga belas) perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.



Gambar 8. Perbandingan Penduduk Lahir dan Penduduk Mati Kota Palopo Selama Tahun 2022
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

2.4 AKSES PELAYANAN PUBLIK

Dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan amanat Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 guna mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo sebagaimana dijabarkan di dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023, yang kemudian dijabarkan sesuai dengan pembagian urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo. Pada periode RPJMD Tahun 2018-2023, Pemerintah Kota Palopo melaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib non pelayanan dasar, 6 urusan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 urusan penunjang urusan pemerintahan, 1 unsur pengawasan urusan pemerintahan, 9 unsur kewilayahan, dan 1 unsur pemerintahan umum, dalam penyelenggaraannya secara langsung dilaksanakan oleh 49 Organisasi Perangkat Daerah.

Akses pelayanan publik di Kota Palopo merupakan bagian dari SPM (standar pelayanan minimal) yang berkaitan dengan urusan wajib pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Penyelenggaraan Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pemerintahan, pendidikan, kesehatan. Hasil pencapaian akses

pelayanan publik di Kota Palopo selama tahun 2022 pada urusan wajib pilihan terjadi peningkatan walaupun masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan sebagai evaluasi perencanaan tahun selanjutnya (tabel.3), penjelasan selanjutnya dijelaskan pada sub bab akses pelayanan publik.

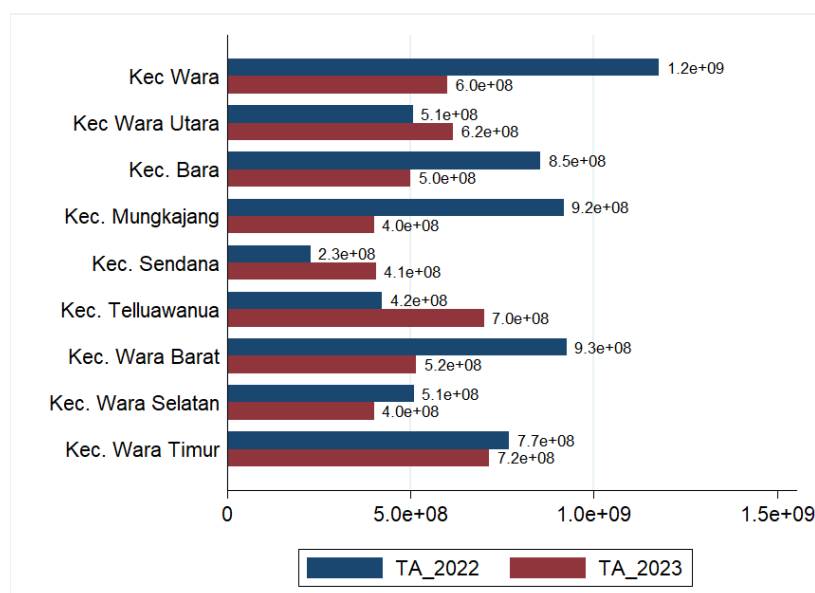
Tabel 3. Hasil Pencapaian Akses Pelayanan Publik Kota Palopo Tahun 2022

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)		Capaian Kinerja	Keterangan
	*2022	*2023		
Bidang Pemerintahan	5.377.125.027	4.851.800.000	87,50	Terjadi peningkatan nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah 87,50 dari target yang ditetapkan tahun 2022
Bidang Pendidikan	50.447.692.300	40.270.070.500	78,91	Terjadi peningkatan indeks Pendidikan dari 78,38 tahun 2021 menjadi 78,91 tahun 2022.
Bidang Kesehatan	81.061.353.677	100.111.435.250	78,74	Terjadi peningkatan indeks Kesehatan dari 78,34 tahun 2021 menjadi 78,74 tahun 2022.

Sumber : LP2KD 2022; *DPA Perangkat Daerah Pengampu 2023

2.4.1 Bidang Pemerintahan

Bidang pemerintahan merupakan urusan wajib pelayanan dasar, kemudian yang berkaitan langsung dengan kemiskinan secara langsung adalah unsur kewilayahan. Unsur kewilayahan tersebut adalah tingkat kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya perangkat daerah pengampu yang melakukan eksekusi pemberian bantuan adalah bidang urusan sosial yang diampu oleh Dinas Sosial. Dasar perangkat daerah pengampu memberikan bantuan adalah data yang telah diusulkan oleh unsur kewilayahan yaitu kecamatan dan kelurahan. Selain melaksanakan pendataan keluarga miskin, unsur kewilayahan juga melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan lokasi prioritas 48 kelurahan di Kota Palopo. Salah satu prinsip penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan yaitu dengan melakukan pemberdayaan komunitas masyarakat, dengan harapan mendorong kemandirian masyarakat tersebut berdaya dan keluar dari kategori miskin.



Gambar 9. Anggaran per Kecamatan (Rp X 100.000.000)
Sumber : DPA Kecamatan 2022-2023

Kota Palopo memiliki 9 kecamatan dan 48 kelurahan yang selama tahun 2022 pemerintah Kota Palopo mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.377.125.027,- dengan pagu indikatif yang diusulkan Rp. 4.470.810.001,- . Peningkatan alokasi anggaran melebihi pagu indikatif merupakan pengaruh dari SILPA anggaran tahun 2021. Hasil dari meningkatnya anggaran tersebut berdampak kepada nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pemerintah 87,50 tahun 2022. Penggunaan dana tersebut tidak hanya digunakan dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Tahun 2023 realisasi alokasi anggaran mengalami penurunan menjadi 4.851.800.000, sebaran realisasi anggaran tahun 2023 untuk melaksanakan program kegiatan termasuk penanggulangan kemiskinan disajikan tabel 3.

2.4.2 Bidang Pendidikan

Pendidikan termasuk dalam SPM (standar pelayanan minimal) pemerintahan yang masuk dalam urusan wajib pemerintahan. Menurut Undang-Undang, pendidikan termasuk *mandatory spending* yang mewajibkan daerah untuk memenuhi komitmen dengan alokasi anggaran yang mendekati angka 20%. Jumlah alokasi anggaran tahun 2022 sebesar 50.447.692.300, dan terjadi penurunan di pagu indikatif RKPD tahun 2023 menjadi 40.270.070.500. Selama tahun 2022 target yang telah ditetapkan untuk partisipasi sekolah tingkat SD-SMP adalah 100%, capaian hanya 94,21% karena masih terdapat angka putus sekolah sebanyak 1,28% dari jumlah total peserta didik SD sampai dengan SMP, walaupun demikian hasil dari perhitungan indeks pendidikan di Kota Palopo mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 78,38 menjadi 78,91 pada tahun 2022.

Akses pelayanan pendidikan di Kota Palopo diampu oleh Dinas Pendidikan yang membawahi Pendidikan tingkat PAUD, TK, SD dan SMP, sedangkan kewenangan SMA telah diambil alih oleh Provinsi. Perangkat daerah pengampu melaksanakan program pengelolaan pendidikan yang meliputi kegiatan Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar, Pengelolaan Pendidikan sekolah menengah, Pengelolaan Pendidikan PAUD, dan Pengelolaan Pendidikan formal dan kesetaraan.

Tabel 4. Program Kegiatan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022

Program Pengelolaan Pendidikan		
Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	*Pagu Anggaran (Rp)
Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	17.630 Peserta didik (81 Sekolah)	34.808.381.780
Pengelolaan Pendidikan menengah	7.859 Peserta didik (25 Sekolah)	18.380.512.900
Pendidikan PAUD	287 Peserta didik (22 PAUD)	3.318.176.945
Pengelolaan pendidikan non formal dan kesetaraan	15 Kelompok	3.492.928.375

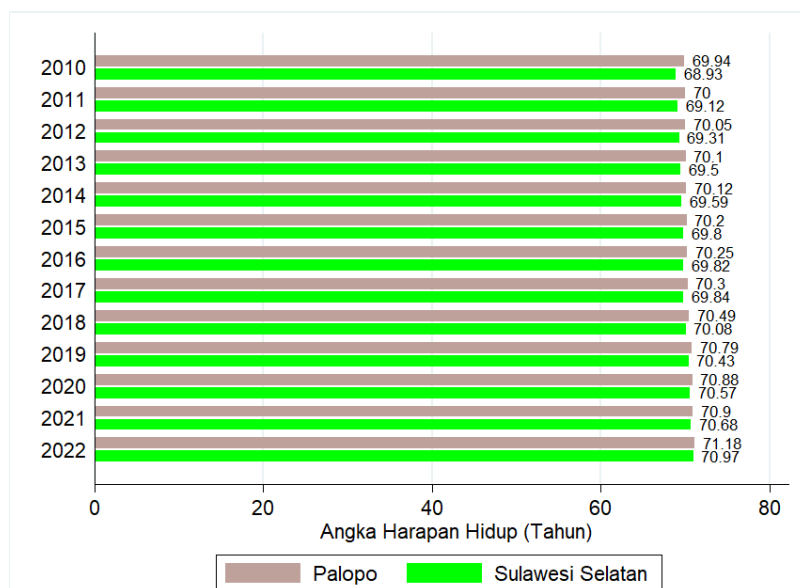
Sumber : Data Dapodik Dinas Pendidikan, 2022; * DPA Dinas Pendidikan

Selama tahun 2022 perangkat daerah pengampu mengurus sebanyak 25.776 peserta didik atau siswa dari tingkat PAUD sampai dengan SMP, dan 106 sekolah. Kemudian untuk pengelolaan pendidikan kesetaraan dilaksanakan untuk mengakomodasi masyarakat yang putus sekolah maupun tidak sekolah untuk mengikuti program kejar paket A, B, dan C.

2.4.3 Bidang Kesehatan

Urusan kesehatan termasuk dalam SPM (standar pelayanan minimal) pemerintahan yang masuk dalam urusan wajib pemerintahan. Menurut Undang-Undang, pendidikan termasuk *mandatory spending* yang mewajibkan daerah untuk memenuhi komitmen dengan alokasi anggaran yang mendekati angka 10%. Melalui program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp. 81.061.353.677. Capaian Kota Palopo pada bidang kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya indeks kesehatan Kota Palopo dari 78,34 menjadi 78,94 di tahun 2022, yang sejalan dengan hasil capaian UHC (*universal health coverage*) tahun 2022 yaitu 95%. Tingginya capaian tersebut merupakan konsekuensi dari alokasi anggaran Kota Palopo yang fokus untuk pembiayaan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan masyarakat.

Kemudian dalam rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2024-2026 bidang kesehatan dan pendidikan masuk dalam program pelayanan pendidikan dan kesehatan. Bidang pemerintahan yang berhubungan dengan akses pelayanan publik masuk dalam program pengembangan kapasitas birokrasi dan aparatur, serta program pengembangan kinerja pemerintahan dan daya saing layanan. Bukti lain yang mendukung kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan adalah usia harapan hidup di Kota Palopo yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Gambar 10. Angka Harapan Hidup Kota Palopo dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2022
Sumber :BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Usia harapan hidup atau angka harapan hidup (AHH) adalah salah indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesehatan penduduk disuatu wilayah. Semakin tinggi usia hidup seseorang di wilayah tertentu menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan ataupun indikator lainnya yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan penduduk termasuk baik. Angka harapan hidup Kota Palopo adalah 71,18 tahun (gambar.10) tahun lebih rendah dari rata-rata nasional 71,85, tetapi lebih baik daripada provinsi Sulawesi selatan 70,97 tahun.

2.5 SOSIAL BUDAYA

Masyarakat di Kota Palopo dibagi menjadi 3 kelompok diantaranya masyarakat pesisir, masyarakat kota dan masyarakat pegunungan. Dalam berkomunikasi ketiga masyarakat tersebut berbeda bahasa. Masyarakat pesisir di Kota Palopo berkomunikasi menggunakan bahasa bugis, masyarakat pegunungan menggunakan bahasa “*Tae*” yang dilihat secara budaya cenderung ke bahasa suku toraja, kemudian terakhir adalah masyarakat perkotaan dalam komunikasinya menggunakan bahasa Indonesia. Kota Palopo merupakan kota di ujung utara bagian tengah kakinya Sulawesi dengan penduduk dan agama yang majemuk. Kota Palopo

memiliki macam suku seperti bugis, jawa, Madura, bali, dan sunda. Agama yang dianut masyarakatnya juga majemuk yaitu islam, Kristen, katolik, hindu, dan budha.

Masyarakat pesisir di kota Palopo mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dengan produksi perikanan tangkap yang besar. Pada umumnya daerah pesisir yang penduduknya adalah nelayan memiliki kepadatan penduduk tinggi. Tingginya kepadatan penduduk membuat masalah social di masyarakat. Masalah social yang muncul yaitu tingginya angka kemiskinan, minat memperoleh pendidikan rendah, terbatasnya pemanfaatan pengetahuan dan teknologi, keterbatasan akses permodalan, dan terakhir adalah kebijakan pemerintah yang masih belum maksimal dalam keberpihakan kepada nelayan kecil.

Masyarakat pegunungan kota Palopo bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun di lereng pegunungan yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Toraja Utara. Dibandingkan dengan wilayah lain di kota Palopo daerah ini memiliki kelebihan dengan tanahnya yang subur untuk kegiatan pertanian dan banyaknya tumbuhan tanaman hias liar yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan ekonomi adalah dengan membentuk KWT (kelompok wanita tani). Hal ini sejalan dengan cara untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di struktur masyarakat yang masih subsisten melalui pemberdayaan dengan membentuk kelompok tani. Hutan di wilayah pegunungan kota Palopo telah masuk dalam hutan lindung yang telah ditetapkan sebagai HKm (Hutan kemasyarakatan) sesuai SK.2628/Menlhk-Pskl/Pkps/Psl.0/5/2017 untuk dikelola dan dimanfaatkan masyarakat sebagai usaha peningkatan kesejahteraan. Sebagai langkah awal telah dibentuk kelompok tani hutan (Gapoktanhut), tetapi dalam perjalanannya partisipasi masyarakat dalam gapoktanhut tersebut masih rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan karena kurangnya keterampilan petani dan pengelolaan kelompok usaha yang tergabung dalam gapoktanhut.

Masyarakat kota palopo telah bercampur dengan berbagai suku dan pendatang, sehingga memungkinkan terjadi keanekaragaman mata pencaharian. Pada umumnya masyarakat perkotaan kota Palopo bekerja pada sector formal, sedangkan yang tidak terserap sektor tersebut bekerja di sektor informal yang berpeluang masuk dalam keluarga pra sejahtera/miskin karena pendapatan tidak menutupi dengan pengeluaran konsumsinya yang dibawah garis kemiskinan. Kota Palopo terdiri dari 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Ujung tombak dalam membantu mengatasi permasalahan kemiskinan ada pada tingkat kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dibawah. Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di perkotaan adalah melalui pemberdayaan keluarga. Pemerintah Kota dalam upaya menanggulangi kemiskinan dengan pemberdayaan yaitu melalui PKH (program keluarga harapan). Program ini diorientasikan untuk menangani problem pada klaster masyarakat prasejahtera, PKH dibentuk untuk menyasar kelompok miskin level terendah. Metode yang

digunakan dalam PKH tersebut yaitu dengan memutus rantai kemiskinan lewat intervensi sector pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social. Program PKH tersebut adalah bagian dari konsep CCT (*conditional cash transfer*) yang digunakan dalam menanggulangi kronis di negara-negara berkembang.

2.6 CAPAIAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Keberhasilan penurunan kemiskinan tidak hanya dilaksanakan oleh satu perangkat daerah pengampu urusan sosial, melainkan juga adanya kolaborasi dari perangkat daerah lain yang bekerja secara kolaboratif yang berdampak langsung kepada penduduk yang berstatus miskin. Selama periode 2018-2022 angka kemiskinan stabil berada pada angka 7%, kecuali tahun 2018 yang meningkat menjadi 8,14%. Hasil capaian program sesuai dengan urusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo tahun 2018-2022 disajikan pada tabel.5.

Tabel 5. Hasil capaian program berkaitan penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo tahun 2018-2022

Urusan	Indikator	2018		2019		2020		2021		2022	
	Capaian	Pagu	capaian	Pagu	capaian	Pagu	capaian	Pagu	capaian	Pagu	capaian
Pendidikan	Angka Putus Sekolah (%)	27.009.931.280		44.778.537.585		35.716.313.728		43.335.653.669		50.447.692.300	
	SD/MI		0,03		0,04		0,43		0,09		0,96
	SMP/Mts		1,26		0,006		0.78		0		1,95
Kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	55.801.802.400	70,49	108.211.217.491	70,79	66.888.650.533	70,88	84.675.830.436	70,90	81.016.353.677	71,18
	Angka Kematian Ibu (Σ Jiwa)		3		1		1		6		8

Urusan	Indikator	2018		2019		2020		2021		2022	
	Capaian	Pagu	capaian	Pagu	capaian	Pagu	capaian	Pagu	capaian	Pagu	capaian
	Angka Kematian Bayi (Σ Jiwa)		3		2		3		13		15
Perkim	Luas Wilayah Kumuh (Ha)	14.926.400.000	68,48	794.581.930	85,48	656.512.050	85,48	710.783.800	121,92	897.646.000	303,40
	Luas wilayah kumuh tertangani (%)		30,45		34,95		39,45		42,94		53,34
Sosial	% Penduduk Miskin	3.343.125.225	7,94	6.433.353.600	7,82	3.101.097.000	7,85	3.107.332.273	8,14	2.195.121.500	7,78
	% Penduduk Miskin Ekstrim								1,94		2,18
	Garis Kemiskinan (Rp)		292.602		324.233		362.859		383.007		403.144
	Garis Kemiskinan Ekstrim (Rp)								286.106		304.626

Urusan	Indikator	2018		2019		2020		2021		2022	
	Capaian	Pagu	capaian	Pagu	capaian	Pagu	capaian	Pagu	capaian	Pagu	capaian
Pembangunan kelurahan (Kewilayahan)	Indeks										83,93
	Kepuasan Masyarakat	6.109.398.330	81,81	7.880.475.504	83,08	8.932.012.150	83,06	8.939.320.536	84,73	5.377.125.057	
Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1.987.542.000	10,76	557.075.000	9,67	1.108.490.000	10,37	410.344.450	8,83	1.527.258.000	8,20
	TPAK		58,31		61,94		61,23		59,95		63,65
Ketahanan pangan	Ketersediaan bahan pangan utama (%)	2.407.000.000	-	382.524.254	2,34	219.957.000	3,55	678.810.000	4,26	645.968.500	7,46
Pertanian perkebunan peternakan	Nilai Tukar Petani	11.637.300.000	102,25	4.367.867.760	95,02	3.555.835.663	100,82	5.800.774.969	93,79	11.885.234.700	91,78
	Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan (%)		95,41		56,21		87,97		67,96		62,74
Kelautan perikanan	Nilai Tukar Nelayan	14.156.695.000	104,16	2.346.984.090	105,61	1.194.908.975	97,54	1.347.316.700	104,18	4.189.833.850	109,63
	Kelompok Nelayan yang		11,19		7,75		2,80		0,70		

Urusan	Indikator	2018		2019		2020		2021		2022	
	Capaian	Pagu	capaian	Pagu	capaian	Pagu	capaian	Pagu	capaian	Pagu	capaian
	mendapatkan bantuan (%)										24.65
Kependudukan	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.711.852.000	2,13	4.142.834.182	2,18	4.331.515.065	2,17	5.727.928.250	1,92	6.201.990.092	1,89
	PUS peserta KB (Σ)		16.973		16.973		16.879		15.604		13.614
Perdagangan	Inflasi (%)	34.113.394.750	4,19	2.088.145.532	1,91	29.647.256.850	1,21	397.279.500	2,96	398.735.560	5,13
Koperasi	UKM (%)	1.267.958.000	75,52	371.789.500	75,37	2.221.849.450	81,84	462.327.475	84	441.602.000	85,76
	Koperasi Aktif (%)		71,03		25,34		24		37,38		25.50
Pekerjaan umum	Rumah tangga bersanitasi (%)	39.738.750.000	96,41	8.422.664.780	97,03	1.184.203.709	83,68	6.760.305.788	84,59	10.206.117.500	89,70
	Rumah tangga berakses air minum (%)		94,84		95,61		95,11		94,54		94.38

Sumber : RKPD Kota Palopo 2023; DPA Perangkat Daerah 2022.

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1 KONDISI UMUM KEMISKINAN DAERAH

3.1.1 Garis dan Persentase Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrim

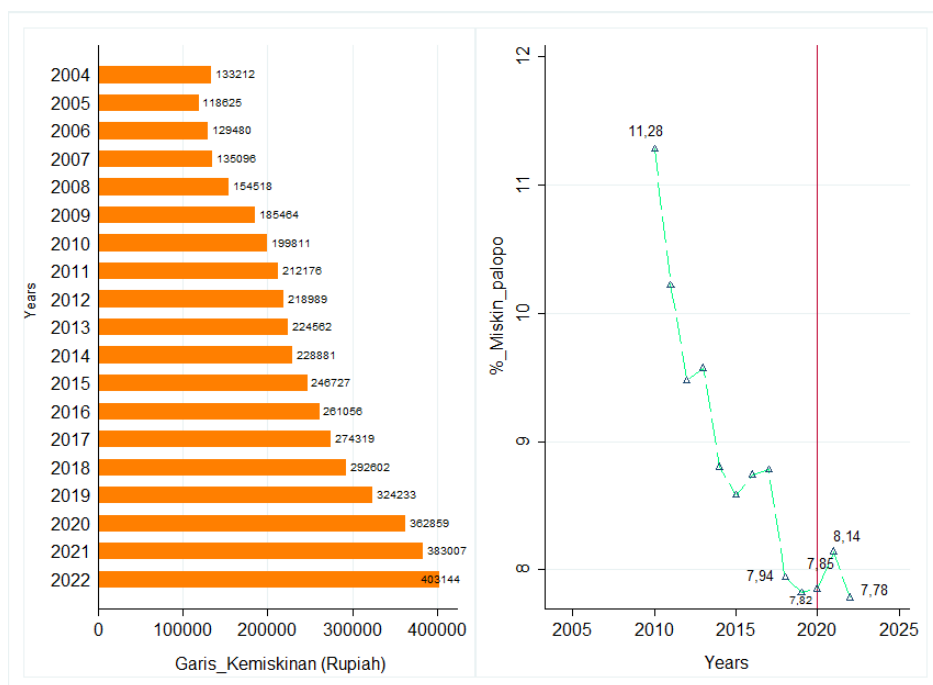
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 pengganti Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Dengan demikian percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan,

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
- d. Mengurangi kantong-kantong kemiskinan;
- e. Mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

Disaat pemerintah daerah melaksanakan proses percepatan penanggulangan kemiskinan, tahun 2021 Presiden memberikan arahan dan target untuk melakukan penghapusan kemiskinan ekstrim pada akhir tahun 2024. Target tersebut merupakan bagian dari kesepakatan global dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*), atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan target tersebut pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrim tahun 2022-2024. Pada lampiran II keputusan tersebut Kota Palopo masuk dalam perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

Kemiskinan diartikan sebagai keterbatasan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan yang diukur melalui pengeluaran konsumsinya. Seseorang individu dikatakan masuk dalam status miskin apabila pengeluaran konsumsi per kapita per bulan berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah kebutuhan minimal yang dikeluarkan seorang individu untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan (beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya) dan non pangan (perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya). Untuk pengeluaran makanan, nilai rupiah minimum yang dibutuhkan oleh seseorang dapat

dikatakan hidup layak atau sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhannya sebesar 2100 kilo kalori per hari. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin apabila mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Perhitungan garis kemiskinan dilakukan oleh BPS dan telah memperhitungkan inflasi dan perubahan indeks harga konsumen. Persentase kemiskinan Kota Palopo mengalami trend penurunan selama 12 tahun terakhir, tetapi disisi lain garis kemiskinan mengalami peningkatan setiap tahunnya (Gambar 11).



Gambar 11. Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo
Sumber : BPS Kota Palopo, diolah

Tahun 2023 garis kemiskinan Kota Palopo mengalami peningkatan menjadi Rp.403.144, dari tahun sebelumnya yang hanya Rp.383.007,-. Tetapi disisi lain persentase penduduk miskin turun dari 8,14% menjadi 7,78% tahun 2022. Proses penurunan persentase penduduk miskin membutuhkan proses yang panjang dimulai dari tahun 2010 sebesar 11,28% menjadi 1 digit di tahun 2022 selama 12 tahun, oleh karena itu proses penurunan kemiskinan adalah proses berkelanjutan yang akan diteruskan oleh kepala daerah dan RPJMD tahun selama 5 tahun kedepan. Seperti dijelaskan pada bab awal latar belakang bahwa kemiskinan merupakan bagian dari kehidupan manusia sehingga untuk menghapuskan adalah hal yang mustahil, untuk mengurangi ya, tetapi untuk menghapuskan 0% tidak. Walaupun demikian pada tahun 2023 Kota Palopo masuk dalam urutan 16, persentase penduduk miskin dari 24 kab/kota provinsi Sulawesi Selatan (tabel.6).

Tabel 6. Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

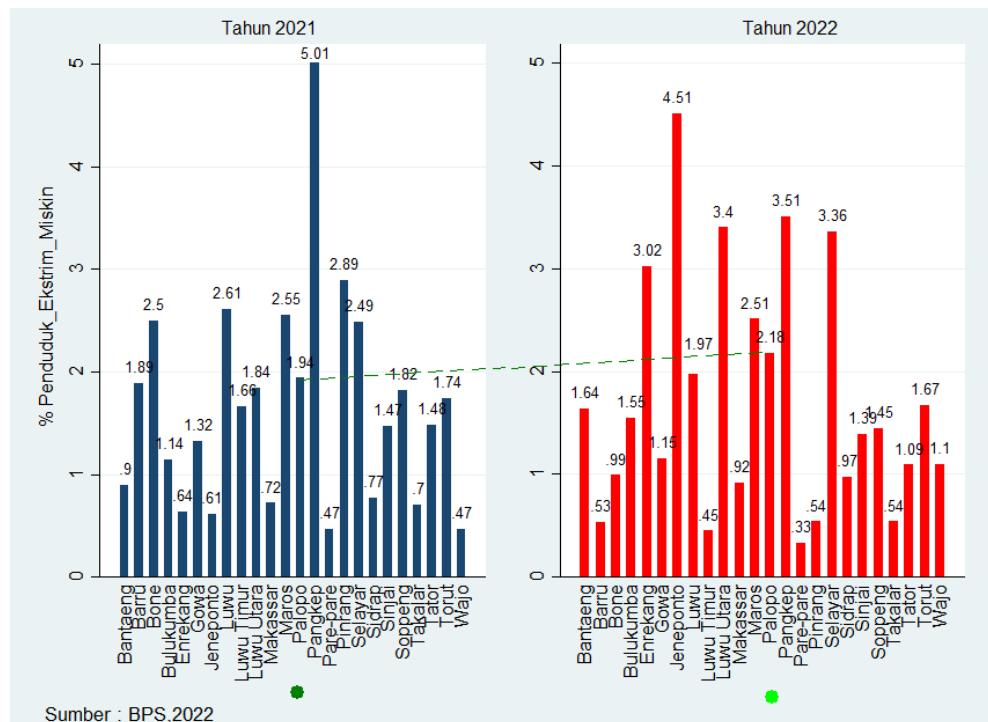
Kab/Kota	Kemiskinan (%)
Pangkep	13.92
Jeneponto	13.73
Luwu Utara	13.22
Luwu	12.49
Enrekang	12.39
Kepulauan Selayar	12.24
Tana Toraja	12.18
Toraja Utara	11.65
Bone	10.58
Maros	9.43
Bantaeng	9.07
Sinjai	8.8
Pinrang	8.79
Barru	8.4
Takalar	8.25
Palopo	7.78
Soppeng	7.49
Bulukumba	7.39
Gowa	7.36
Luwu Timur	6.81
Wajo	6.57
Pare Pare	5.41
Sidrap	5.11
Makassar	4.58

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan proses penghapusan kemiskinan ekstrim yang telah ditargetkan Presiden menjadi 0%. Pada kasus ini memang bisa dihapuskan menjadi 0% atau dengan kata lain dihilangkan, karena miskin ekstrim adalah kondisi miskin kronis yang berada di level terbawah. Miskin ekstrim merupakan bagian dari kondisi miskin, apabila secara keseluruhan penduduk yang masuk kategori miskin ekstrim di Kota Palopo naik status menjadi miskin maka Kota Palopo jumlah penduduk miskin ekstrim 0%.

Konsep perhitungan penduduk miskin hampir sama dengan penduduk miskin hanya batas pengeluaran konsumsi per kapitanya yang membedakan. Penduduk miskin ekstrim adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan tidak lebih dari USD \$ 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau sesuai dengan perhitungan BPS tahun 2022 sebesar Rp.304.626,- per kapita per bulan. Kota Palopo jumlah penduduk

miskin ekstrim mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 1,94% menjadi 2,18% tahun 2022 (gambar.12).



Gambar 12. Penduduk Miskin Ekstrim Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022 (%)
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Dari ketiga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo berada di urutan terbawah setelah Pare-Pare, dan Makassar. Hal ini adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada RPKD tahun perencanaan berikutnya yang sejalan dengan penyusunan RPD Kota Palopo tahun 2024-2026. Pemerintah Kota Palopo selama tahun 2022 telah melakukan intervensi fiskal sebesar Rp.174.563.930.382,-, sehingga harapannya di tahun 2023 kemiskinan ekstrim Kota Palopo turun. Dalam proses penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim tidak dapat dilakukan sendiri, diperlukan upaya kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait.

3.1.2 Jumlah Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrim

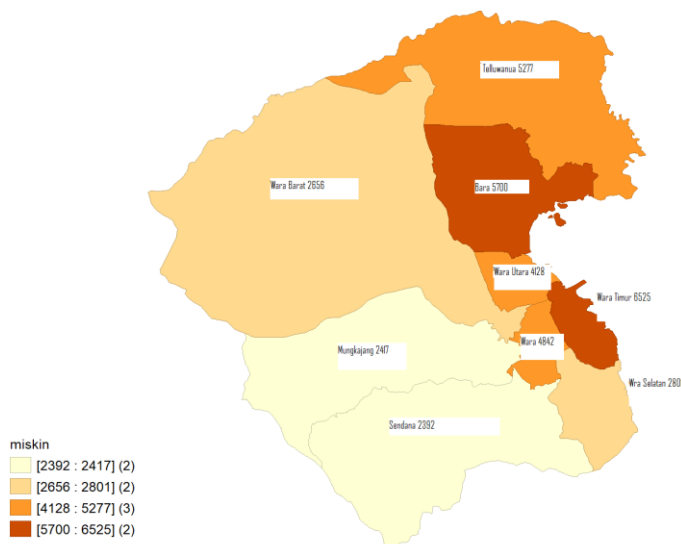
Kondisi kemiskinan pasca covid-19 yang direpresentasikan melalui persentase penduduk miskin relatif sama dengan kondisi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional secara umum. Namun demikian, persentase penduduk miskin di Kota Palopo masih lebih kecil bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Menggunakan tahun acuan 2010 persentase penduduk miskin Kota Palopo mengalami penurunan, walaupun ada peningkatan sebesar 0,03% saat terjadi pandemic COVID-19. Penjelasan dari kondisi tersebut bahwa selama pandemic banyak sektor usaha menutup

sementara ataupun mengurangi jumlah pekerja, sehingga dampak yang terjadi adalah meningkatnya angka pengangguran dikarenakan adanya penyesuaian pelaku usaha dalam menghadapi pandemi. Disisi lain secara simultan meningkatnya angka pengangguran akan mendorong bertambahnya jumlah penduduk miskin. Sejalan dengan hal tersebut di Kota Palopo meningkatnya angka pengangguran di tahun 2020 sebesar 0,70% diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin sebesar 340 jiwa di tahun yang sama. Kemudian berdasarkan data terbaru BNBA (*by name by address*) Kemenko PMK, 2022 jumlah sebaran penduduk miskin terbesar ada di Kec. Wara Timur 6525 jiwa (gambar.13), sedangkan penduduk miskin ekstrim terbesar adalah kecamatan Telluwanua 3641 Jiwa (gambar.13).



Gambar 13. Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim Kota Palopo Tahun 2022 (Jiwa)



Gambar 14. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2022 (Jiwa)
Sumber : Data BNBA P3KE,2022

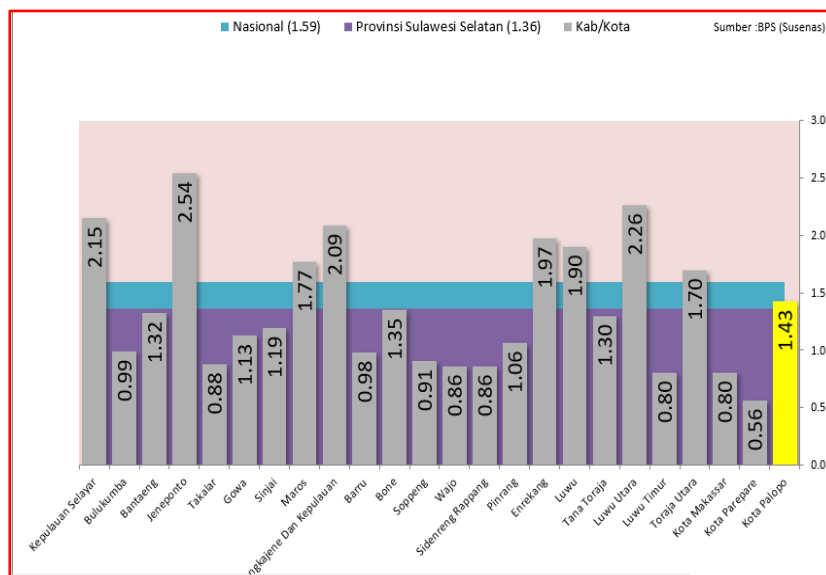
3.1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Perspektif kemiskinan tidak hanya pada sudut pandang jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Tetapi diperlukan dimensi lain seperti tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kemiskinan agar permasalahan kemiskinan secara menyeluruh dapat diketahui. Strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya menekankan pada pengurangan penduduk miskin, tetapi juga bagaimana memperkecil tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2020 Indeks kedalaman kemiskinan Kota Palopo sebesar 0,95 dan terus meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, P1 Kota Palopo sebesar 1,43 atau naik 0,26 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Palopo semakin jauh dari garis kemiskinan atau semakin terperosok dalam kemiskinan. Kondisi Karakteristik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Palopo :

a. Posisi Relatif.

Di tahun 2022 pada tingkat Kab/Kota, terdapat 8 Kab/Kota yang capaiannya di atas capaian Nasional, sebanyak 1 Kab/Kota yaitu Kota Palopo yang capaiannya berada di atas Provinsi Sulawesi selatan dan di bawah capaian Nasional. Sisanya sebanyak 15 kab/kota sudah berada dibawah capaian Prov Sulawesi Selatan termasuk Kota Palopo dan tentu saja di bawah capaian Nasional. Ini menggambarkan bahwa Sebagian besar kab/kota di Sulawesi Selatan sudah menunjukkan capaian yang lebih baik dari capaian Nasional dan capaian Prov Sulsel. Posisi Relatif Kota Palopo berada pada posisi ke-16 terendah di antara 24 Kab/Kota Se-Sulsel dengan capaian 1.43%. Posisi pertama ditempati oleh Kota Pare-pare dengan angka 0.56% dan posisi tertinggi di tempati oleh Kabupaten Jeneponto dengan angka 2.54%.



Gambar 15. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Palopo Tahun 2022
Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2022

b. Perkembangan Antar Waktu.

Pada periode 2017-2022 indeks kedalaman kemiskinan Kota Palopo mengalami peningkatan dari 0.75% menjadi 1.43%. Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2017-2021 menunjukkan Tren penurunan yang fluktuatif dengan laju yang cukup lambat dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.



Gambar 16. Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Palopo Tahun 2017-2022
Sumber : BPS Kota Palopo ,2017-2022

c. Efektivitas.

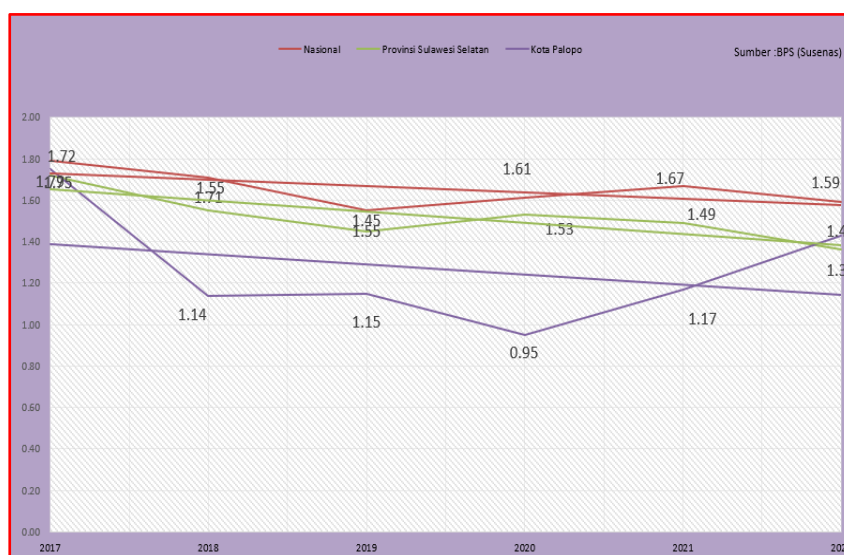
Pada Periode 2017–2022, tren menunjukkan penurunan. Adanya pola penurunan indeks kedalaman kemiskinan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkot Palopo sudah efektif tetapi masih harus perlu dimaksimalkan karena masih terdapat kesenjangan pengeluaran antara masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.



Gambar 17. Analisis Efektifitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Palopo Tahun 2017-2022
Sumber : BPS Kota Palopo, diolah

d. Relevansi.

Pada tahun 2017 hingga tahun 2022, Tren dan pola perubahan antara capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Palopo dengan capaian Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan. Hanya saja, pada tahun 2022, capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional mengalami perbaikan dengan penurunan angka dari capaian tahun 2021, sedangkan capaian Kota Palopo yang mengalami kenaikan dari capaian tahun 2021, walaupun demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya sejak tahun 2017 sampai 2022 capaian Kota Palopo relevan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian Nasional.



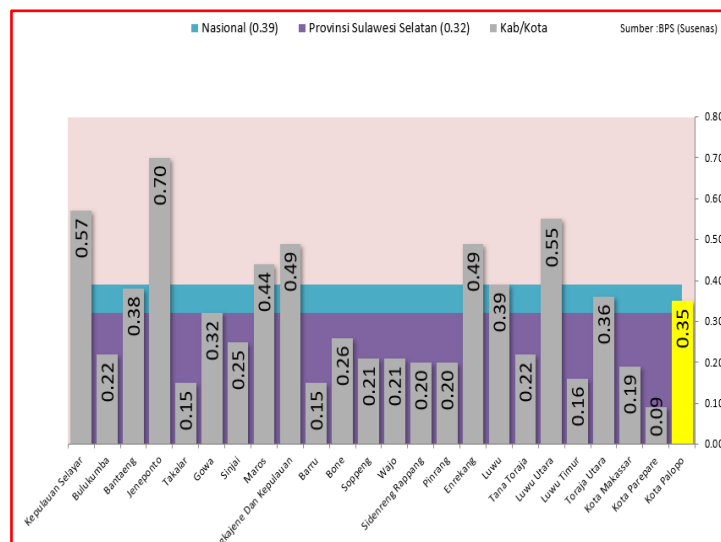
Gambar 18. Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kota Palopo Tahun 2017-2022
Sumber : BPS, diolah

3.1.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Sama halnya dengan kondisi P1, indeks keparahan kemiskinan Kota Palopo selama kurun tiga tahun terakhir juga cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, Indeks P2 sebesar 0,21 dan meningkat hingga menjadi 0,35 pada tahun 2022. Artinya, pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Palopo semakin timpang. Kondisi kemiskinan di Kota Palopo perlu penanganan yang lebih lanjut. Meskipun persentase penduduk miskin relatif turun pada tahun 2022, namun rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dan semakin timpang pengeluaran antar penduduk miskin tersebut. Dengan demikian, perlu upaya penanggulangan dari pemerintah agar penduduk miskin tersebut dapat dibebaskan dari kondisi miskin yang tidak terlalu dalam dan memberikan penanganan yang berbeda-beda berdasarkan tingkat keparahannya. Karakteristik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Palopo :

a. Posisi Relatif.

Tahun 2022 pada tingkat Kab/Kota, terdapat 6 kab/kota yang capaiannya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan nasional, 4 Kab/Kota termasuk Kota Palopo yang capaiannya diatas Provinsi Sulawesi selatan namun dibawah nasional, sisanya sebanyak 14 Kab/Kota telah berada dibawah Provinsi Sulawesi selatan dan nasional. Ini menggambarkan bahwa Sebagian besar kab/kota menunjukkan capaian yang lebih baik dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Posisi Relatif Kota Palopo di antara 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan menempati posisi ke-15 terendah dengan capaian 0.35%. Posisi pertama terendah ditempati oleh Kota Pare-pare dengan capaian 0.09%, sementara posisi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Pinrang dengan angka 0.70%



Gambar 19. Posisi Relatif Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Palopo Tahun 2017-2022
Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2017-2022

b. Perkembangan Antar Waktu:

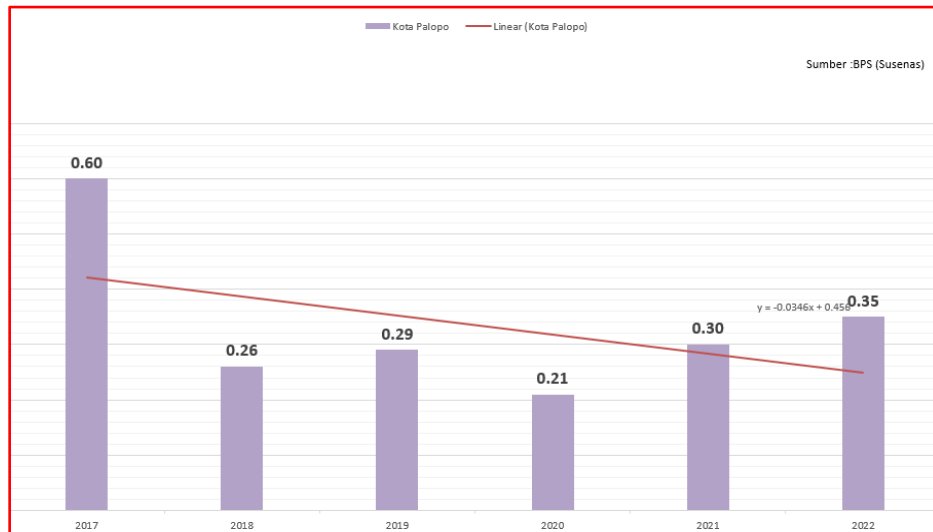
Pada Periode tahun 2017-2022 indeks Keparahkan kemiskinan Kota Palopo mengalami penurunan dari 0.60% menjadi 0.35%. Terjadi penurunan terendah di tahun 2020 sebesar 0.21% dari 0.29% di tahun 2019. Namun meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 0.30% dan meningkat di tahun 2022 menjadi 0.35%. Apabila dilihat tren ataupun pola perubahannya, pada periode 2017-2022 menunjukkan Tren penurunan yang fluktuatif meskipun cukup lambat karena hanya sebesar 0.25% selama 6 tahun terakhir.



Gambar 20. Analisis Perkembangan antar Waktu Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Palopo Tahun 2017-2022
Sumber : BPS Kota Palopo, 2017-2022

c. Efektivitas.

Pada Periode 2017–2022, menunjukkan adanya pola penurunan indeks Keparahkan kemiskinan dilihat dari tren-nya, sehingga bisa disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan Persentase keparahan kemiskinan sudah efektif. Namun masih harus lebih dimaksimalkan karena masih ada kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin.



Gambar 21. Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Palopo Tahun 2017-2022
Sumber : BPS Kota Palopo, 2017-2022

d. Relevansi.

Pada tahun 2017 hingga tahun 2022, Tren dan pola perubahan antara capaian Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Palopo dan Provinsi Sulawesi selatan juga capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan. Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa capaian ketiganya relevan.



Gambar 22. Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Palopo Tahun 2017-2022
Sumber : BPS, 2017-2022

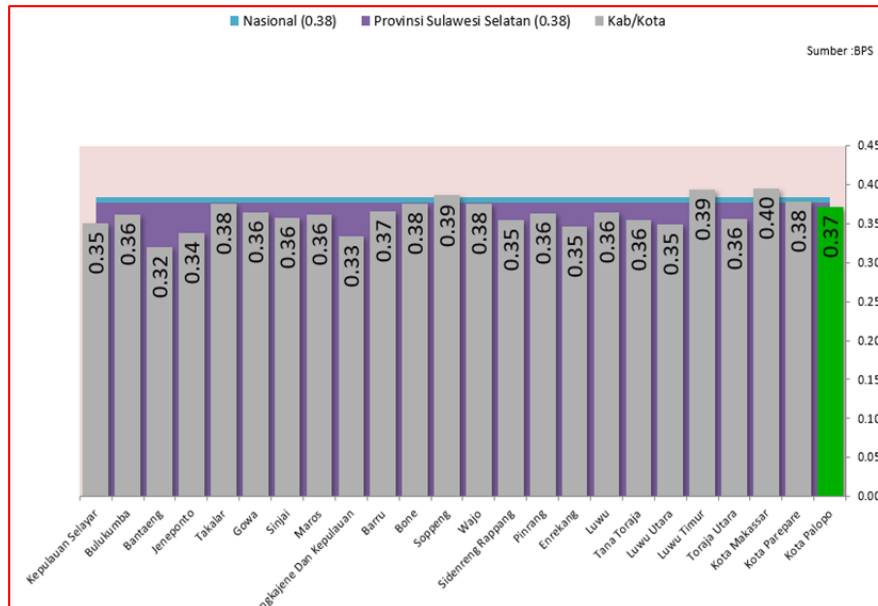
3.1.5 Kondisi Ketimpangan Pengeluaran

Ketimpangan pengeluaran di Kota Palopo diukur dari Indeks ketimpangan / *gini ratio*. Nilai dari indeks gini rasio 0 s/d 1, semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan

yang tinggi, begitupun sebaliknya. Kondisi karakteristik masalah ketimpangan pengeluaran di Kota Palopo :

a. Posisi Relatif.

Pada Tahun 2022 tingkat ketimpangan pengeluaran (*Gini Ratio*) Kota Palopo sebesar 0.37 berada pada posisi ke-16 terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Capaiannya Lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.



Gambar 23. Analisis Posisi Relatif Ketimpangan Pengeluaran Kota Palopo Tahun 2022
Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2022

b. Perkembangan Antar Waktu.

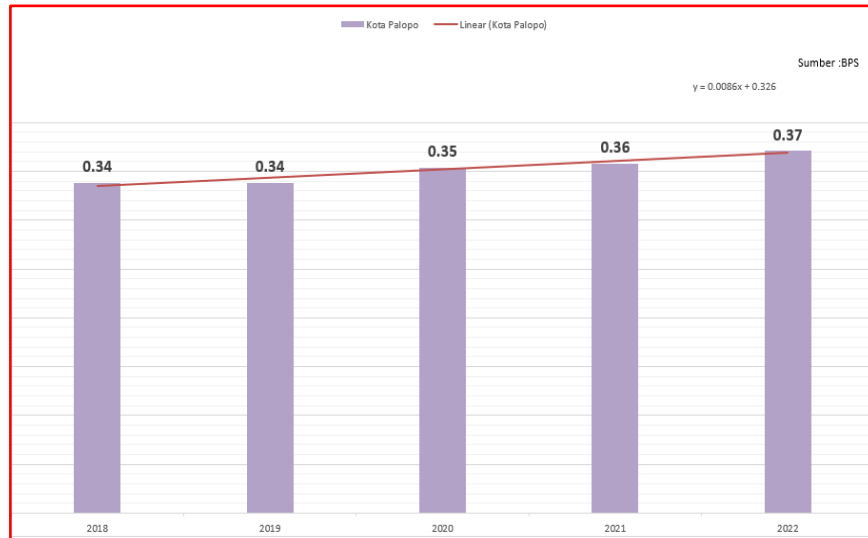
Pada Periode tahun 2018-2022 tingkat ketimpangan pengeluaran di Kota Palopo mengalami perkembangan yang konsisten dan terjadi peningkatan karena capaian di tahun 2018 angkanya 0.34 menjadi 0.37 di tahun 2022. Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2018-2022 menunjukan Tren peningkatan.



Gambar 24. Analisis Perkembangan Antarwaktu Ketimpangan Pengeluaran Kota Palopo Tahun 2018-2022
Sumber : BPS Kota Palopo, 2018-2022

c. Efektivitas.

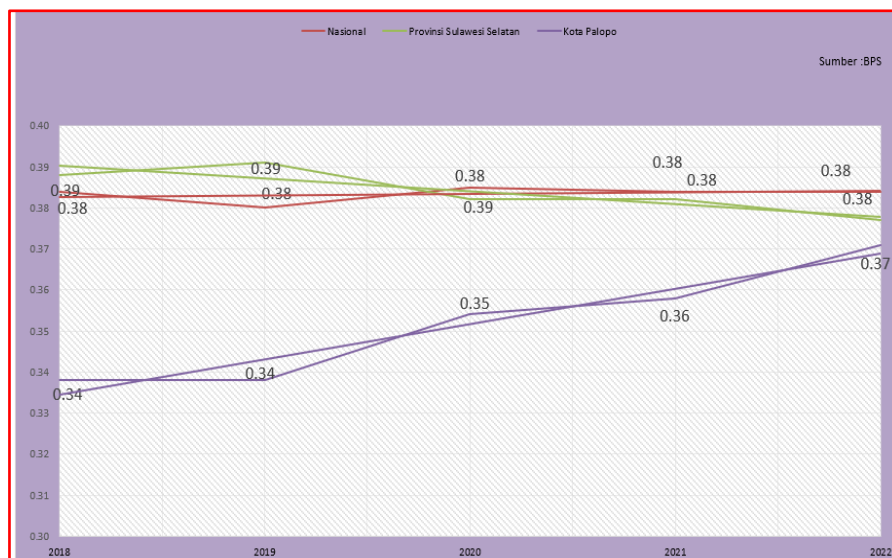
Pada Periode tahun 2018–2022, tingkat ketimpangan pengeluaran mengalami tren peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Palopo belum efektif dalam menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran.



Gambar 25. Analisis Efektivitas Ketimpangan Pengeluaran Kota Palopo Tahun 2018-2022
Sumber : BPS Kota Palopo, 2018-2022

d. Relevansi.

Pada tahun 2018 hingga tahun 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran Kota Palopo lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Secara Tren dan pola perubahan antara ketiganya dapat dikatakan tidak beriringan, artinya pola kenaikannya tidak sama antara Kota Palopo, Provinsi Sulawesi selatan dan nasional, jadi hubungan ketiganya tidak relevan



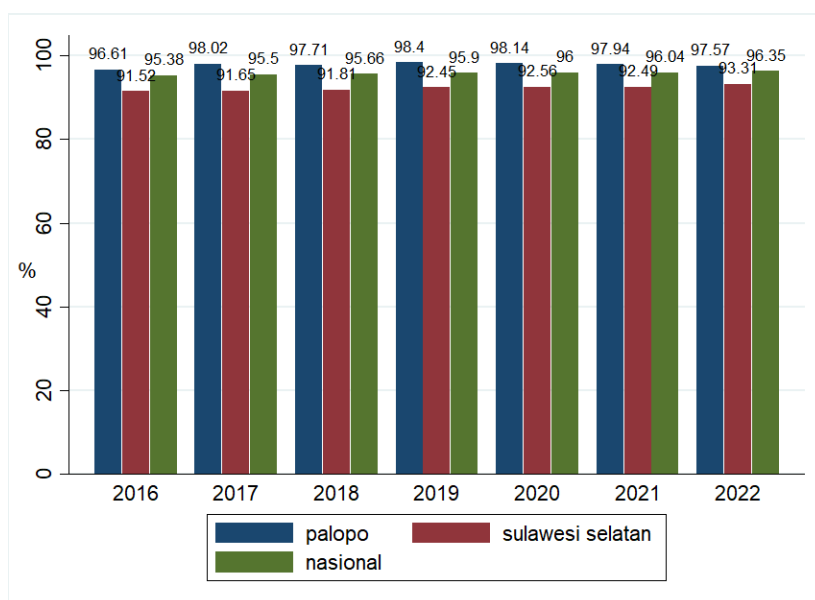
Gambar 26. Analisis Relevansi Ketimpangan Pengeluaran Kota Palopo Tahun 2018-2022
Sumber : BPS, 2018-2022

3.2 BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH PENGAMPU PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.2.1 Pendidikan

3.2.1.1 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (AMH) adalah angka yang menunjukkan penduduk usia > 15 tahun yang memiliki kemampuan membaca, dan menulis dalam huruf latin maupun huruf lainnya. AMH merupakan indikator dari kemampuan penduduk disuatu wilayah untuk menyerap ilmu pengetahuan baru yang didapat baik dari pendidikan formal, dan informal. Semakin tingginya angka melek huruf, menunjukkan kemampuan literasi dan pendidikan masyarakat diwilayah tersebut baik. Perbandingan AMH Kota Palopo, provinsi Sulawesi Selatan, dan nasional ditampilkan gambar.27.



Gambar 27. Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2016-2022 (%)
Sumber : BPS, 2016-2022

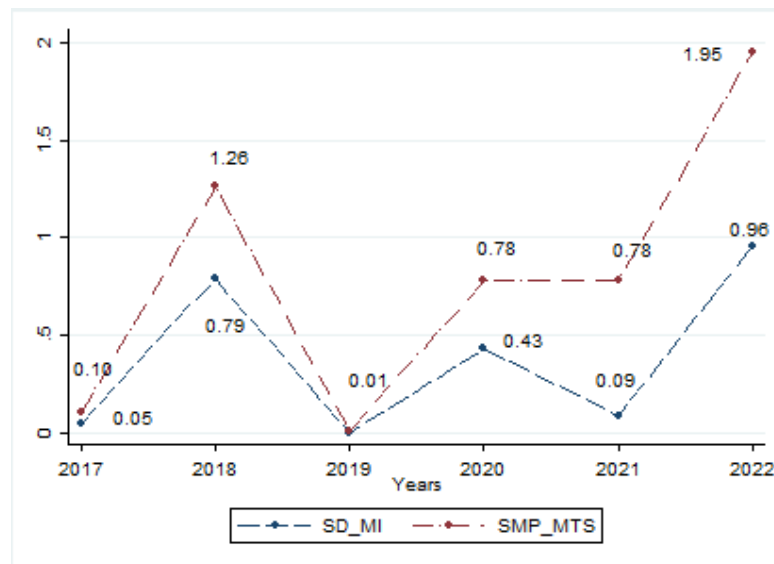
Angka melek huruf (AMH) Kota Palopo (97,57), Pare-Pare (98,42), dan Makassar (99,17). AMH rata-rata nasional (96,35) dan provinsi (93,31). Jenis kelamin laki-laki memiliki tingkat melek huruf 97,17 lebih rendah daripada perempuan 98,06. Angka melek huruf lebih tinggi pada jenis kelamin perempuan menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan sudut pandang dimana perempuan telah memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Kondisi ini menunjukkan kesetaraan gender di Kota Palopo mulai meningkat yang diindikasikan dari angka melek huruf yang lebih tinggi.

3.2.1.2 Angka Putus Sekolah

Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud

adalah kelompok umur 7-12 tahun atau jenjang pendidikan SD, dan 13-15 tahun atau jenjang pendidikan SMP. Untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-15 tahun).

Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Data Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2017 –2022 dapat dilihat pada gambar.28 berikut ini.

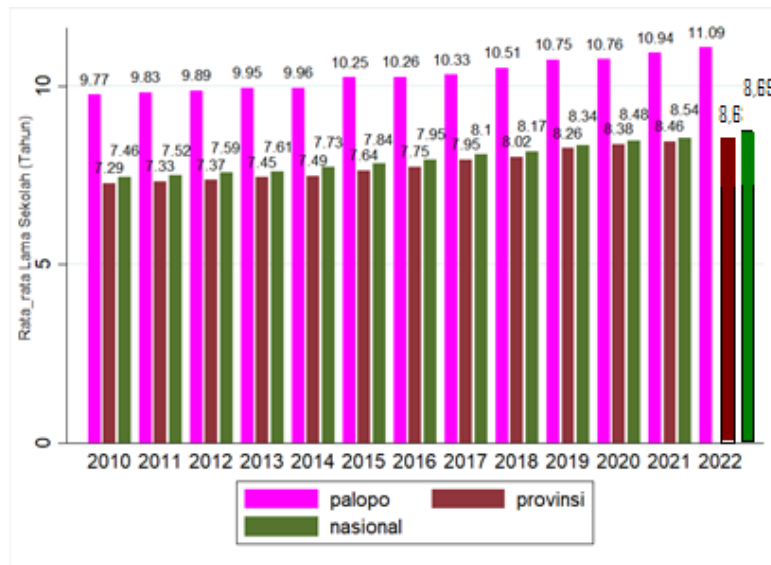


Gambar 28. Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2017 –2022
Sumber : Dapodik Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2022

Persentase putus sekolah di Kota Palopo mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Jumlah total peserta didik tingkat SD yang putus sebesar 170 murid (0,96%) dari 17.630 murid sedangkan untuk SMP yang putus sebesar 153 murid (1,95%) dari 7859 murid.

3.2.1.3 Rata-rata lama Sekolah

Rata -rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang digunakan untuk melihat penduduk suatu wilayah menamatkan pendidikan formalnya. Angka ini digunakan untuk melihat kualitas pendidikan penduduk disuatu wilayah. Semakin tinggi angka RLS menunjukkan bahwa penduduk di wilayah tersebut memiliki tingkat pendidikan dan kualitas pendidikan yang lebih baik daripada wilayah lainnya (Gambar.29).

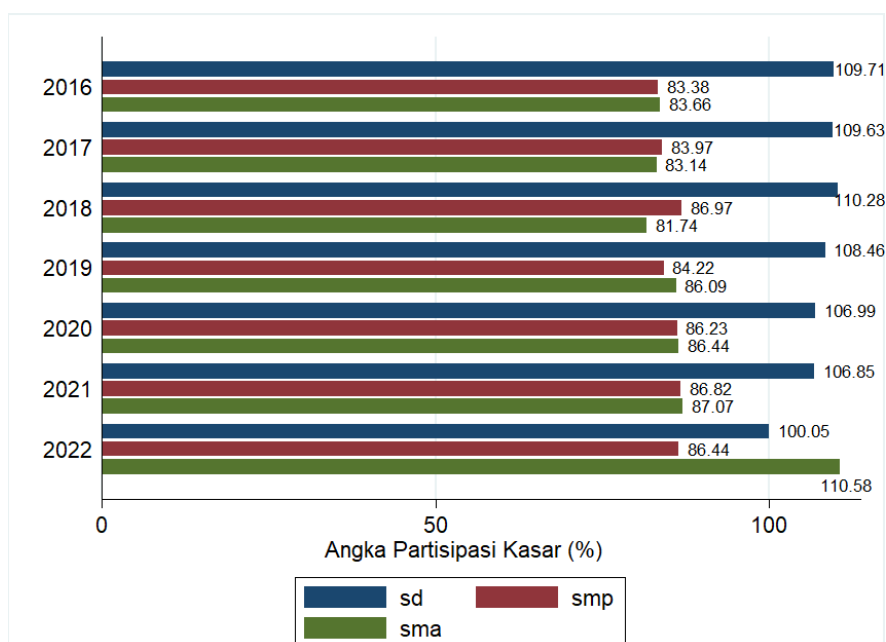


Gambar 29. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional (Tahun)
Sumber : BPS, 2010-2022

Kota Palopo memiliki angka RLS yang lebih baik daripada provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. RLS Kota Palopo 11,09 tahun atau lulusan SMP, walaupun angka provinsi dan nasional berada pada rentang > 8 tahun atau masuk lulusan SMP sama dengan Kota Palopo tapi Palopo lebih tinggi 2 tahun atau setidaknya telah menyelesaikan SMP. Banyak faktor yang membuat RLS Kota Palopo masih berada di angka 11,09 tahun. Salah satu penyebab utamanya adalah putus sekolah yang disebabkan bukan karena ketiadaan biaya untuk menuruskan jenjang berikutnya, melainkan adanya motivasi bagi anak tersebut untuk membantu perekonomian keluarga dengan cara bekerja di sektor informal. Pendidikan tinggi belum menjadi tujuan utama yang harus dicapai dalam suatu keluarga terutama bagi kalangan ekonomi bawah atau masyarakat miskin di Indonesia.

3.2.1.4 Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu berapapun umurnya terhadap jumlah penduduk umur tertentu. APK digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum terhadap akses pendidikan. Tingginya nilai APK menunjukkan bahwa partisipasi penduduk untuk mengakses pendidikan tersebut tinggi, tanpa melihat kesesuaian umur dengan jenjang pendidikan (Gambar.30).



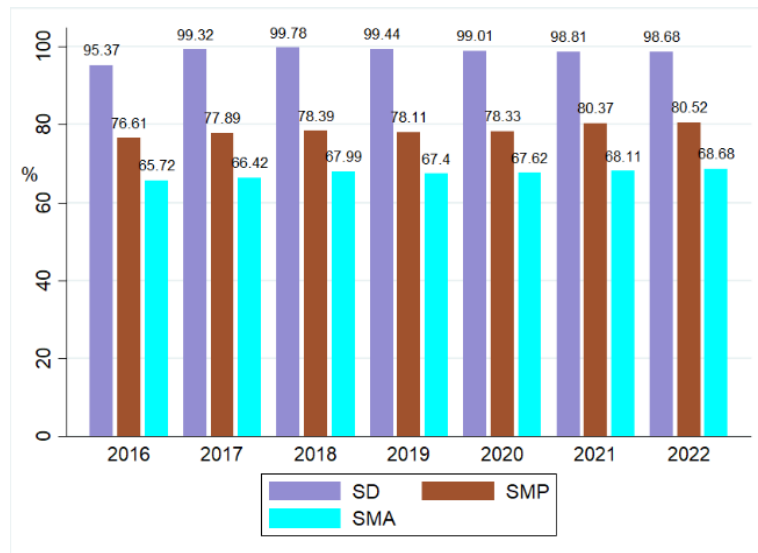
Gambar 30. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Palopo Tahun 2016-2022 (%)

Sumber : BPS Kota Palopo, 2016-2022

Kota Palopo memiliki APK yang tinggi pada jenjang pendidikan SD, menunjukkan bahwa terdapat penduduk sekolah yang belum mencukupi umur atau melebihi umur yang mengakses pendidikan pada jenjang tersebut. Sejak tahun 2018 APK SD mengalami tren penurunan dari 110,28% menjadi 100,05% di tahun 2022, hal ini mengindikasikan bahwa mulai adanya kesesuaian pendidikan yang diakses oleh penduduk Kota palopo jenjang pendidikan dasar. APK jenjang pendidikan SMP 86,44% dan SMA 110,58% di tahun 2022, menunjukkan bahwa masyarakat yang mengakses pendidikan pada jenjang SMA lebih besar daripada SMP dan SD.

3.2.1.5 Angka Partisipasi Murni

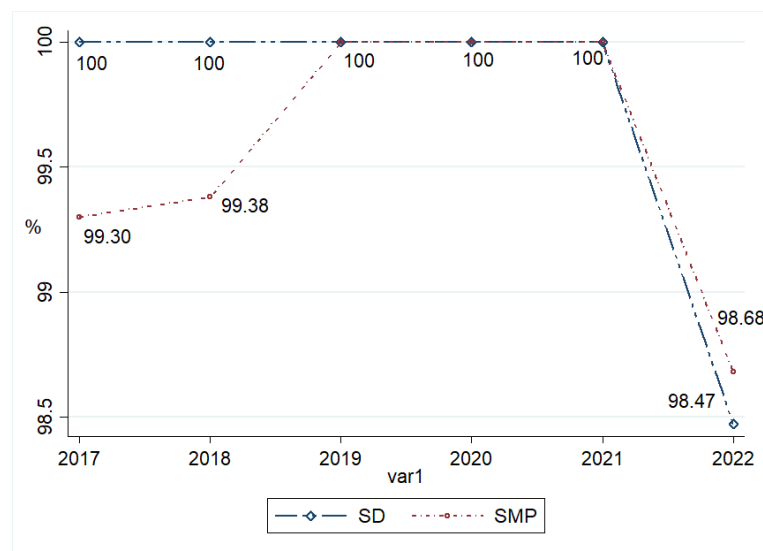
Angka partisipasi murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai kelompok umurnya, APM Kota Palopo ditampilkan gambar 31. Tahun 2022 APM di jenjang pendidikan SD 98,68%, menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SD peserta didik berada di rentang umur 7-12 tahun, atau dapat dikatakan adanya kesesuaian proporsi penduduk usia 7-12 untuk bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kemudian tahun 2022 APM Kota Palopo pada jenjang SMP 80,52% dan SMA 68,68%. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil APM, mengindikasikan bahwa persentase terbesar peserta didik berada pada jenjang pendidikan dasar. Jenjang pendidikan menengah dan atas semakin kecil persentasenya salah satunya adalah banyak peserta didik yang tidak melanjutkan pendidikan lanjutan, yang dibuktikan dengan RLS Kota Palopo yang berada pada 11,09 tahun atau lulusan SMP



Gambar 31. Angka Partisipasi Murni Kota Palopo Tahun 2016-2022 (%)
Sumber : BPS Kota Palopo, 2016-2022

3.2.1.6 Angka Kelulusan

Angka kelulusan mengindikasikan bahwa setiap peserta didik berhasil menempuh pendidikan yang dijalannya. Angka kelulusan berpengaruh terhadap keberhasilan kualitas pembangunan manusia yang dihasilkan oleh suatu daerah.



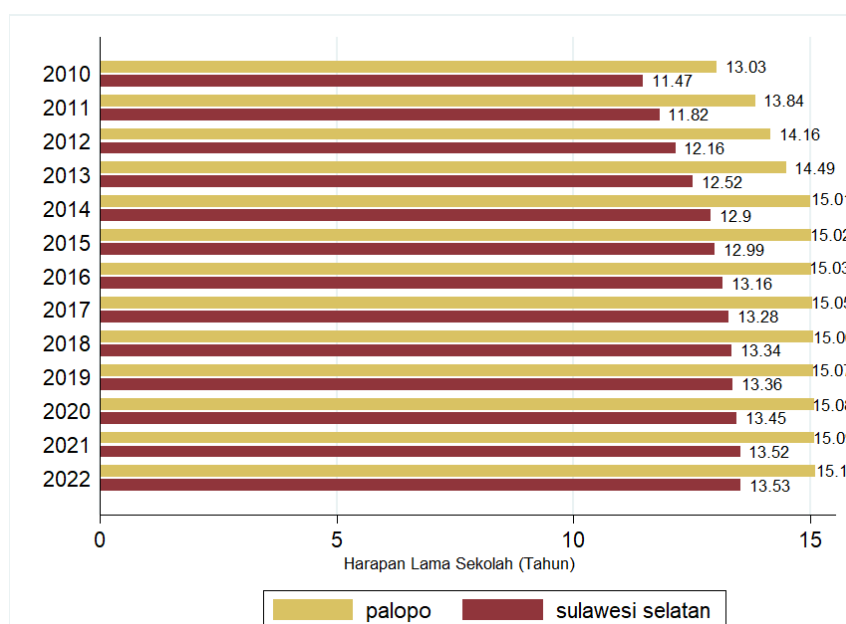
Gambar 32. Persentase Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Palopo
Sumber : Data Dapodik Dinas Pendidikan Kota Palopo 2017-2022

Persentase angka kelulusan di Kota Palopo mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya, Jumlah total peserta didik tingkat SD yang tidak lulus sebesar 3.085 murid (98,47%) sedangkan untuk SMP yang tidak lulus sebesar 2.694 (98,68%) (Gambar.32).

3.2.1.7 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan angka yang diukur dari lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu, dimasa mendatang. Angka HLS Kota Palopo 15,10 tahun artinya rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk pendidikan formal, maka memiliki peluang untuk bersekolah sampai pada jenjang pendidikan vokasi (D1-D3). Kondisi kualitas pendidikan yang diukur dari indikator HLS di Kota Palopo lebih baik daripada tingkat nasional 13,08 dan provinsi 13,53 (gambar.33).

Target RPJMN yang ditetapkan nasional angka HLS yaitu 13,89 tahun, atau masuk jenjang pendidikan pendidikan vokasi atau > jenjang SMA. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan level jenjang pendidikan dasar yang ditamatkan semula pendidikan dasar 12 tahun minimal menjadi jenjang pendidikan vokasi baik diploma 1-3.



Gambar 33. Perbandingan HLS Kota Palopo dengan Provinsi Tahun 2010-2022

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2010-2022

3.2.1.8 Angka Partisipasi Sekolah.

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Persentase APS Kota Palopo tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan usia anak sekolah pada jenjang Pendidikan SD (7-12) dan SMP (13-15) sudah terserap semua sesuai dengan jenjang dan umur.

Tabel 7. Angka Partisipasi Sekolah Kota Palopo Tahun 2017-2022

Angka Partisipasi Sekolah	2017	2018	2019	2020	2021	2022
APS SD (%)	99.32	99.78	99.7	99.53	99.3	98,68
APS SMP (%)	98.13	100	99.17	98.69	98.63	98,46

Sumber : BPS Kota Palopo, 2017-2022

3.2.2 Kesehatan

3.2.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.

Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Data AKB Kota Palopo selama periode 2018 – 2022 disajikan pada tabel.8.

Tabel 8. Rasio Angka Kematian Bayi

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun pada 1 tahun tertentu)	3	2	3	13	15
Jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu	3.029	3.282	2.945	3.512	2.871
Rasio Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	0,99	0,61	0,07	3,70	5,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2022

3.2.2.2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (100-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Data AKHB dapat dilihat pada tabel.9.

Tabel 9. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Per 1000 kelahiran	100	100	100	100	100
AKB per 1000	0,99	0,61	0,07	3,70	5,22
AKHB	99,01	99,39	99,93	96,30	94,78

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2022

3.2.2.3 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Adalah jumlah kematian anak berusia 0-12 bulan atau kurang dari satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel.10.

Tabel 10. Angka Kematian Balita per-1000 Kelahiran Hidup

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kematian Balita (berumur kurang 1 tahun)	3	2	3	13	15
Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	3.029	3.282	2.945	3.512	2.871
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	0,99	0,61	0,07	3,70	5,22

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2022

3.2.2.4 Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih

Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih adalah salah satu indikator dalam bidang urusan kesehatan. Semakin tingginya proporsi kesehatan yang dibantu oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian, maka peluang kematian bayi dan ibu akan sangat kecil. Capaian indikator ini di kota Palopo tahun 2022 sebesar 84,60% (tabel.11) walaupun terjadi penurunan di tahun sebelumnya dari 85,15%, dengan rata-rata setiap tahunnya 92,78%.

Tabel 11. Proporsi Kelahiran yang Ditolong Nakes Terlatih

Bidang Urusan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	2.956	3.035	3.279	2.947	2.689	2.829
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	3.086	3.035	3.225	3.295	3.158	3.344
Proporsi kelahiran yang ditolong nakes terlatih	95,79	100	101.67	89,44	85,15	84,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2022

3.2.2.5 Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelekaan, bunuh diri, atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian per 100.000 kelahiran hidup mengalami peningkatan sejak tahun 2021, dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yang masih terjadi 1 angka kematian ibu setiap tahunnya (tabel.12). Tahun 2022 angka kematian ibu meningkat signifikan menjadi 278,65 per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 12. Angka Kematian Ibu Kota Palopo Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ibu Hamil yang Meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	2	3	1	1	6	8
Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah tertentu pada kurun waktu yang sama	2.959	3.029	3.282	2.945	2.765	2.871
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	68	99	30	34	216,00	278,65

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2022

3.2.2.6 Prevalensi HIV / AIDS dari Total Populasi

Prevalensi HIV / AIDS pada populasi adalah total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan umur 15-49 tahun yang positif HIV dibagi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada umur yang sama. Kota Palopo selama tahun 2017-2022 mengalami kondisi fluktuatif. Jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebanyak 128, kemudian di tahun 2021 turun menjadi 99 dan kemudian meningkat kembali ditahun 2022 sebanyak 111 kasus (tabel.13).

Tabel 13. Prevalensi HIV / AIDS

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	117	128	80	87	99	111
Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	176.907	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867
Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi per 100.000	66	71	43	47	53	58

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2022

3.2.2.7 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan

Balita gizi buruk merupakan balita yang masuk kategori dalam status gizi buruk dengan indikasi berat badan yang tidak sesuai dengan usianya, kemudian berat badan yang tidak seimbang dengan tinggi badan, dan dikelompokkan dalam empat kriteria yaitu sangat kurus, kurus, normal, dan gemuk.

Cakupan balita gizi buruk kota Palopo sepanjang tahun 2019 adalah 0 menunjukkan bahwa tidak adanya kasus balita yang terindikasi gizi buruk di kota Palopo sepanjang tahun tersebut, hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kota Palopo untuk penanganan balita sangat baik (tabel.14).

Tabel 14. Cakupan Balita Gizi Buruk

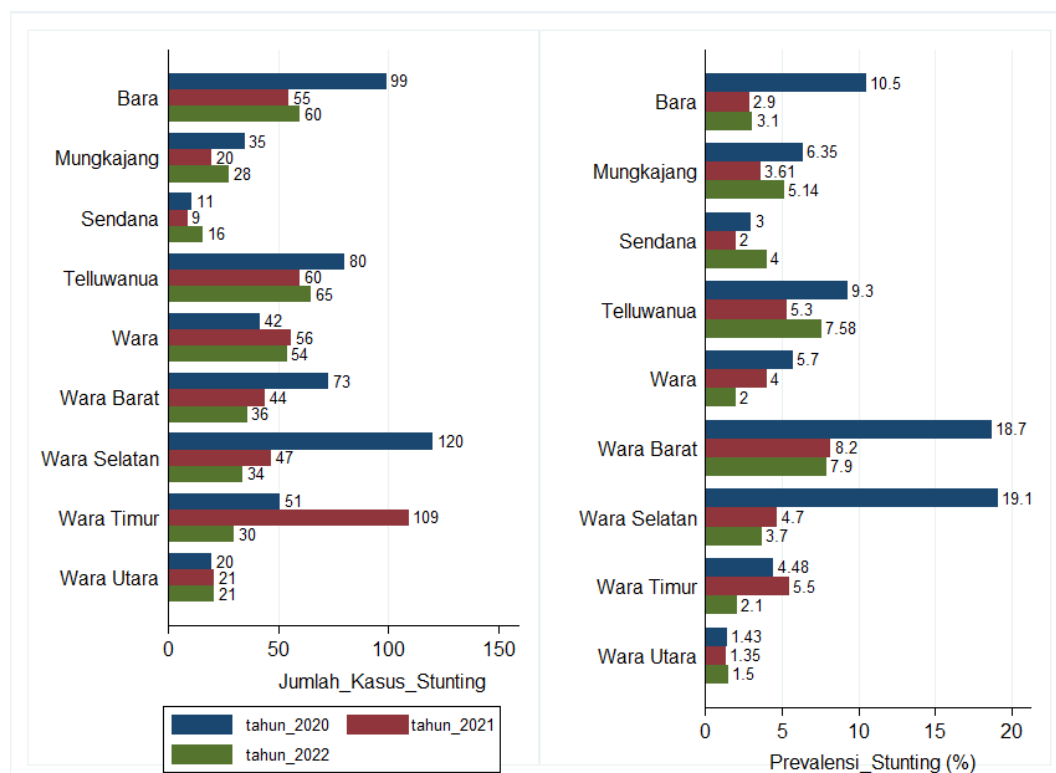
Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	4	2	0	0	0	0

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	4	2	0	0	0	0
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2022

3.2.2.8 Prevalensi Kasus Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kurang gizi yang berlangsung lama (kronis) terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK). Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Prevalensi stunting kota Palopo yang bersumber dari survey status gizi Indonesia (SSGI) terjadi penurunan 4,7% dari 28,50% tahun 2021 menjadi 23,80% di tahun 2022. Jumlah kasus stunting dan prevalesi stunting ditampilkan pada gambar.34.



Gambar 34. Jumlah Kasus dan Prevalensi Stunting Kota Palopo Tahun 2020-2022

Sumber : Aplikasi e-PPGBM Kota Palopo, 2022

3.2.3 Perumahan dan Permukiman

3.2.3.1 Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni (RLH) didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Jadi Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.

Tabel 15.Rasio Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2018-2022.

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah rumah layak huni	32.097	34.268	35.313	37.876	38.967
Jumlah penduduk	180.678	182.107	184.681	187.331	190.867
Rasio Rumah Layak Huni	0,178	0,188	0,191	0,202	0,204

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palopo

3.2.3.2 Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas permukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukiman. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik.

Tabel 16.Rasio Permukiman Layak Huni Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas area permukiman Layak Huni (Ha)	5.078	5.130	5.205	5.184,6	5.231,2
Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	5.561	5.561	5.561	5.611	5.680,4
Rasio Permukiman Layak Huni (%)	91,32	92,26	93,59	92,40	92,09

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palopo

3.2.3.3 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan RLH dihitung dari jumlah seluruh RLH pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah total rumah pada tahun tertentu dikali 100%. Semakin seimbangnnya jumlah RLH dengan jumlah total keseluruhan di suatu wilayah menunjukkan bahwa di wilayah tersebut memiliki akses perumahan yang nyaman dan layak bagi penghuninya, sehingga akan tercipta kebersihan, keteraturan, dan kesehatan.

Tabel 17.Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	33.856	34.378	35.313	37.876	38.967
Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	37.076	37.598	38.075	39.025	42.142
Persentase	91,32	91,44	92,74	97,06	92,47

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman Kota Palopo

3.2.3.4 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Akses kepemilikan rumah tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih. Keberpihakan pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat ekonomi menengah bawah untuk mendapatkan akses perumahan layak, berpengaruh terhadap capaian indicator ini. Masyarakat yang masuk kategori menengah kebawah disebut sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Definisi dari MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Tabel 18.Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	4.390	4.912	5.389	5.926,0	6.468
Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	4.727	5.249	5.726	6.226	6.769
Persentase	92,87	93,58	94,11	95,18	95,55

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman

Keberadaan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan perumahan bagi MBR dan Permendagri 55 Tahun 2017 tentang kemudahan memperoleh perizinan bagi pembangunan perumahan MBR juga berkontribusi terhadap pencapaian ini.

3.2.3.5 Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.

Tabel 19.Persentase Pemukiman yang Tertata Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas area permukiman tertata (Ha)	4.703	4702,47	4.702,40	5.185,7	5.539,15
Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	4.738	4738	4.738	5.611	5.811
Persentase	99,26	99,25	99,25	92,42	95,32

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman

3.2.3.6 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Lingkungan permukiman kumuh adalah bagian dari kawasanpermukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukimanyang mengalami kekumuhan.Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan atau lingkungan permukiman yangtergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat tingkat kepadatan kawasan, kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut. Penilaian tingkat kekumuhan harus terdiri dari kombinasi dari beberapa indikator kumuh yang ada.

Tabel 20.Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas lingkungan permukiman kumuh			426,37	303,40	271,85
Luas wilayah Kota Palopo			247,52	247,52	247,52
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh			1,72	1,22	1,09

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman

3.2.3.7 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Luasan permukiman kumuh dan termasuk suatu kawasan dalam satuan persegi ataupun hektar yang tidak layak huni ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan

bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Tabel 21.Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2018– 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)	20,85	3,85	4	4	31,6
Luas pemukiman kumuh (Ha)	68,48	85,48	85,48	121,92	303,40
Persentase luasan pemukiman kumuh tertangani	30,45	4,50	4,50	3,49	10,40

Sumber : Dinas Perumahan & Permukiman

3.2.3.8 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Rumah tangga kumuh merupakan sekelompok individu yang hidup dibawah atap yang sama pada daerah perkotaan yang kurang memenuhi satu atau lima kondisi antara lain ketahanan rumah, kecukupan tempat tinggal, akses air bersih, akses sanitasi, dan status kepemilikan rumah. Dalam menghitung proporsi rumah tangga kumuh di daerah perkotaan yaitu dengan membagi jumlah keluarga (KK) yang masuk dalam kategori kumuh, dibagi dengan jumlah total keluarga (KK) dalam suatu wilayah.

Tabel 22.Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan (KK)	776	189	8.770	2.298	2.356
Jumlah seluruh rumah tangga (KK)	39.778	39.773	40.303	41.220	42.158
Persentase	1,95	0,48	21.8	5,57	5,59

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman

3.2.4 Kewilayahan (Pemberayaan Kecamatan dan Kelurahan)

Urusan pembangunan kelurahan adalah bagian dari unsur kewilayahan. Unsur kewilayahan di Kota Palopo terdiri dari 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Ujung tombak dalam membantu mengatasi permasalahan kemiskinan ada pada tingkat kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dibawah. Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Salah satu prinsip penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan yaitu dengan melakukan pemberdayaan komunitas masyarakat, dengan harapan mendorong kemandirian masyarakat tersebut berdaya dan keluar dari kategori miskin. Oleh karena itu pemerintah Kota Palopo melalui unsur kewilayahannya melalui program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan lokasi prioritas 48 kelurahan di Kota Palopo.

Dalam mengukur keberhasilan dalam urusan pembangunan kelurahan dapat didekati dengan indeks pelayanan publik. Indeks ini digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar. Sesuai dengan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan indikator persentase rata-rata LPMK, PKK, dan POSYANDU yang aktif di kelurahan. Adanya lembaga non structural tersebut yang aktif dan bekerja, memberikan pengaruh dalam masyarakat, termasuk salah satunya adalah berdaya dari kemiskinan melalui kegiatan yang sumber pembiayaan didanai dari anggaran kelurahan. Hasil realisasi kinerja urusan pembangunan kelurahan tercapai sesuai target 100% (Tabel.5). Hal ini juga didukung oleh, indeks pelayanan publik 87,70 yang melebihi target yang ditetapkan 85 dengan dukungan pagu anggaran Rp. 5.377.125.027,- yang lebih dari pagu indikatif yang diusulkan Rp.4.470.810.001,- . Meningkatnya pagu anggaran tersebut karena masih ada dana SILPA dari anggaran tahun sebelumnya yang tidak terserap. Kinerja urusan pembangunan kelurahan telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPKD Kota Palopo tahun 2022 (tabel.23)

Tabel 23.Realisasi Kinerja Kewilayahan (Kelurahan) Tahun 2022

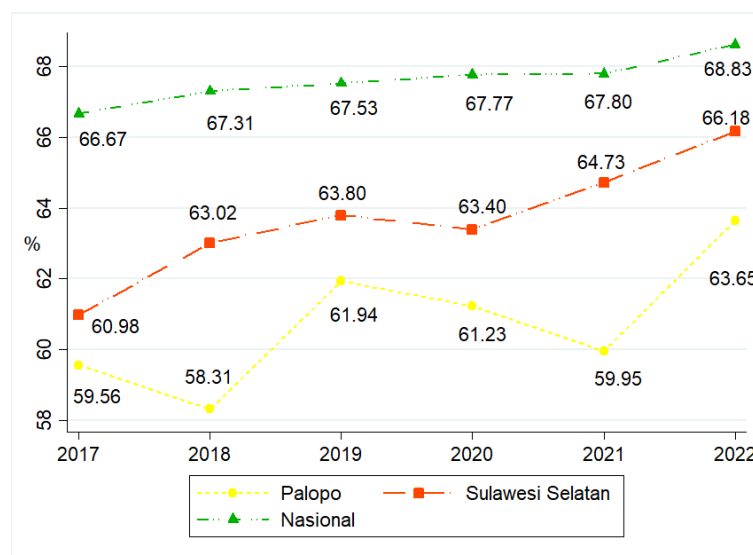
Program	Indikator	Lokasi	Realisasi Capaian 2022		Target 2022	
			Kinerja	Pagu Pokok	Target	Pagu Indikatif
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata LPMK, PKK, dan POSYANDU Aktif	Kec.Wara (Amasangan,Boting,Dangerako,Lagaligo, Pajalesang,Tompotika)	100%	1,177,662,500	100%	919,376,313
		Kec. Wara Utara (Batupasi, Luminda, Pattene, Penggoli, Sabang Paru, Salobulo)	100%	505,743,381	100%	268,550,000
		Kec.Wara Timur (Benteng, Malatunrung,Ponjalee, Pontap, Salekoe, Saltulue, Surutanga)	100%	769,271,500	100%	564,171,788
		Kec. Wara Barat (Batang, Batang Barat, Lebang, Padang Lambe, Tomarundung)	100%	925,591,346	100%	748,129,050
		Kec. Bara (Balandai, Buntudatu, Rampoang, Temmaleba, Tobulung)	100%	854,691,304	100%	731,349,800
		Kec.Mungkajang (Kambo, Latuppa, Mungkajang, Murante)	100%	917,783,000	100%	729,945,550
		Kec. Sendana (Mawa,Peta, Purangi, Sendana)	100%	225,461,996	100%	51,250,000
		Kec .Telluwana (Batu Walenrang, Jaya, Mancani, Maroangin, Pentojangan, Salubatang, Sumarambu)	100%	421,493,426	100%	51,250,000
		Kec. Wara Selatan(Songka,Binturu,Sampoddo,Takalala)	100%	509,144,300	100%	370,537,500

Sumber : LP2KD Kota Palopo, 2022

3.2.5 Ketenagakerjaan

3.2.5.1 Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK)

BPS mendefinisikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK menunjukkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. TPAK Kota Palopo dalam rentang waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Fluktuasi terjadi karena adanya kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja di Kota Palopo sebatas pada sektor lapangan usaha perdagangan dan jasa. Kemudian penawaran tenaga kerja lebih besar karena adanya faktor pergeseran struktur tenaga kerja yang beralih dari sektor pertanian menuju jasa perdagangan yang berasal dari pinggiran Kota Palopo maupun dari kabupaten sekitar. TPAK Kota Palopo pada tahun 2022 sebesar 63,65%, sedangkan provinsi Sulawesi Selatan 66,18% terakhir adalah Nasional 68,63%.

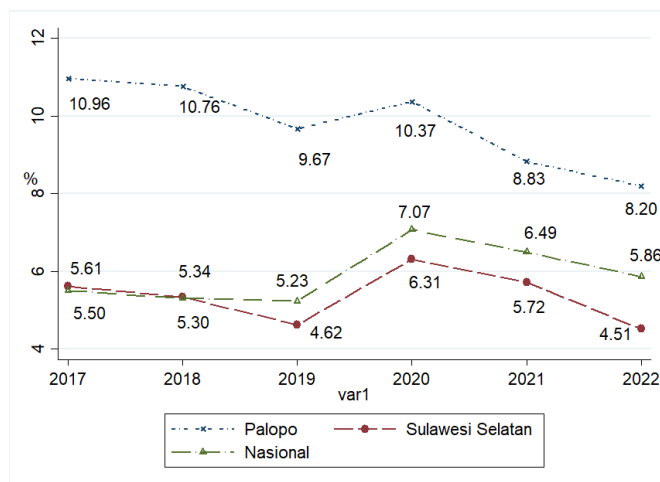


Gambar 35. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2017-2022 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017-2022

3.2.5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena

merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.



Gambar 36. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2017-2022 (%)
Sumber :Badan Pusat Statistik, 2018-2022

TPT Kota Palopo dalam kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan sebanyak 1,29 persen. Pada tahun 2020 TPT Kota Palopo mengalami kenaikan sebesar 0.7 persen. Kemudian TPT Provinsi Sulawesi selatan tahun 2022 sebesar 4,51% sedangkan nasional 5,86%. Hal ini disebabkan oleh karena terjadinya pandemi covid-19 yang memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Kota Palopo. Tahun 2021 sektor perekonomian berangsur pulih. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Palopo berkurang ke angka 8,83% dan kembali berkurang menjadi 8,20% di tahun 2022. Secara keseluruhan TPT Kota Palopo periode 2017 – 2022 mengalami penurunan. TPT Kota Palopo Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada gambar.36. Dilihat dari perbandingan dengan angka TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, Kota Palopo lebih tinggi. Dapat dijelaskan bahwa tingginya angka pengangguran di Kota Palopo disebabkan adanya pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) yaitu pengangguran yang terjadi karena jam kerja secara kumulatif dalam seminggu kurang dari 35 jam. Pengangguran ini biasanya terjadi di Kota yang struktur lapangan usahanya adalah jasa/ perdagangan dan sektor pertanian. Sejalan dengan data BPS Kota Palopo (2022), bahwa lapangan pekerjaan utama yang menyerap angkatan kerja adalah sektor jasa 63.629 tenaga kerja.

3.2.5.3 Angka Sengketa Pengusaha

Setiap buruh atau tenaga kerja dan pemilik usaha dalam melaksanakan aktivitas kegiatan dan ekonominya pada prinsipnya memiliki kepentingan yang berbeda. Disisi lain pemilik

usaha bagaimana cara memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya tenaga kerja dan menuntut produktivitas kerja yang tinggi. Kemudian sisi lainnya tenaga kerja menuntut adanya peningkatan kesejahteraan atas kontribusi tenaga dan pikirannya kepada pemilik usaha. Adanya kesenjangan diantaranya menimbulkan suatu konflik antara pengusaha dan tenaga kerja. Di Kota Palopo angka sengketa pengusaha dengan tenaga kerja per tahunnya fluktuatif (Tabel.24).

Tabel 24 Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja (Per Tahun).

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	16	18	11	12	17
Jumlah Perusahaan	1741	1887	1897	1906	1908
Jumlah Perusahaan ber TDP(*)	719	707	715	723	506
Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun (x 1000)	9,19	9.5	5.7	6.29	8.9
Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja di Perusahaan ber TDP Per Tahun (x 100)	2.23	2.54	1.53	1,65	3.35

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Angka sengketa pengusaha dan pekeja mengalami fluktuatif selama 2018-2022, pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan dan penurunan dari 9,50 – 5,70, kemudian dua tahun terakhir mengalami tren naik menjadi 8,90 di tahun 2022. Kondisi ini juga diikuti oleh perusahaan yang telah memiliki TDP (tanda daftar perusahaan) di tahun 2020-2022 meningkat dari 1,53 menjadi 3,35.

3.2.5.4 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian

Imbas adanya angka sengketa pengusaha dan pekerja, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo memasukkan besaran jumlah kasus sengketa yang dapat diselesaikan dalam indicator kinerja utama dinas tersebut. Proses penyelesaian kasus tersebut harus diselesaikan dengan kesepakatan dan perjanjian bersama antara buruh dengan pengusaha. Kondisi di Kota Palopo besaran jumlah kasus yang dapat diselesaikan mengalami tren penurunan (Tabel.25).

Tabel 25.Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	11	2	11	2	5
Kasus yang Dicatat/Dilaporkan	15	18	11	12	17
Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	73	11	100	16	29.41

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Sejak tahun 2020 besaran kasus yang diselesaikan mengalami penurunan dari 100% hanya menjadi 29,41%. Disisi lain kasus yang dilaporkan mengalami peningkatan dari 11 menjadi 17 kasus di tahun 2022. Indikator ini menunjukkan bahwa sudah terciptanya kesadaran buruh akan

kejahateraan yang seharusnya didapatkan dengan kontribusinya dalam memberikan keuntungan terhadap pemilik usaha.

3.2.5.5 Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan berkaitan dengan angkatan kerja Kota Palopo yang telah ditempatkan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang telah mendaftar melalui Dinas Tenaga Kerja. Pencari kerja di Kota Palopo yang telah ditempatkan mengalami tren yang fluktuatif selama tahun 2018-2022 (Tabel.26).

Tabel 26 Pencari Kerja yang Telah Ditempatkan (%).

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	718	1.072	412	461	800
Jumlah pencari kerja yang mendaftar	2740	2.018	969	1.532	2288
Pencari Kerja yang ditempatkan	26,20	53,12	42,51	30	35

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Tahun 2019 merupakan kondisi terbaik Dinas Tenaga Kerja menempatkan hampir separuh lebih pencari kerja yang ditempatkan (53,12%), selanjutnya terjadi penurunan dari angka 42,51% sampai terakhir tahun 2022 hanya 35%. Penurunan persentase ini disebabkan karena adanya peningkatan pencari kerja yang mendaftar, tetapi tidak diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja. Menurut data BPS Kota Palopo (2023) jumlah pencari kerja yang terdaftar didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebesar 66,90% dan 33,10% adalah perempuan.

3.2.5.6 Persentase Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha untuk melindungi pekerjanya. Dinas tenaga kerja sebagai perangkat daerah pengampu berfungsi sebagai pengawas dan Pembina pelaku usaha agar wajib mematuhi dan melaksanakan keselamatan perlindungan tenaga kerja.

Tabel 27 Persentase Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	431	478	482	515	650
Jumlah Perusahaan	1.741	1887	1897	1906	1908
Persentase Keselamatan & Perlindungan (x 100)	24,7	25,3	25,4	27	34,07

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Di Kota Palopo keselamatan dan perlindungan tenaga kerja mengalami tren peningkatan sejak tahun 2018-2022. Persentase keselamatan dan perlindungan di tahun 2022 sebesar 34,07%.

Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaku usaha telah konsisten mematuhi dan melaksanakan aturan K3 (kesehatan keselamatan kerja) di lokasi kerjanya.

3.2.5.7 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Penerapan K3 yang dilakukan oleh pelaku usaha berpengaruh terhadap kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial. Jaminan sosial ini memberikan perlindungan bagi pekerja apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti terjadi kecelakaan kerja maupun PHK sepihak dengan pemberian uang pesangon sesuai dengan waktu kepesertaan yang telah didaftarkan oleh pelaku usaha.

Tabel 28 Pekerja/Buruh Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek	11.438	13.765	25.921	34.050	30.182
Jumlah Buruh/Pekerja	29.337	25.105	31.210	46.390	77.465
Besaran Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek (%)	39	54.82	83,05	73,40	38.96

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo dan BPJS Ketenagakerjaan

Besaran pekerja yang mengikuti kepesertaan jaminan sosial mengalami tren yang fluktuatif, sempat terjadi peningkatan di tahun 2019 sebesar 54,82% kemudian naik turun sampai pada angka 35,32% tahun 2022. Disisi lain jumlah pekerja/buruh di Kota Palopo setiap tahunnya mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Situasi ini menjadi *alarm* pengingat kepada perangkat daerah pengampu untuk terus mensosialisasikan dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjajanya menjadi anggota jaminan sosial tenaga kerja.

3.2.5.8 Persentase Pemeriksaan Perusahaan

Indikator ini berhubungan dengan regulasi yang harus dimiliki oleh perusahaan yang telah berbadan hukum. Setiap perusahaan menurut ketentuan perundang-undangan wajib mendaftarkan perusahaan untuk diterbitkan TDP. Tanda daftar Perusahaan (TDP) adalah dokumen resmi pengesahan bahwa suatu usaha atau perusahaan telah melaksanakan kewajiban mendaftarkan usahannya.

Tabel 29. Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah perusahaan yang telah diperiksa	8	8	65	15	7
Jumlah perusahaan terdaftar (ber-TDP)	825	707	715	712	506
Persentase Pemeriksaan Perusahaan	0,97	1.13	9,1	2,1	1.38

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Berdasarkan hasil tabel.29 Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo memiliki kinerja yang rendah sekali dalam melaksanakan pemeriksaan perusahaan yang ber-TDP. Tahun 2022 hanya 7 (1,38%) perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan, terjadi penurunan yang jauh dari tahun sebelumnya 15 (2,10%) perusahaan.

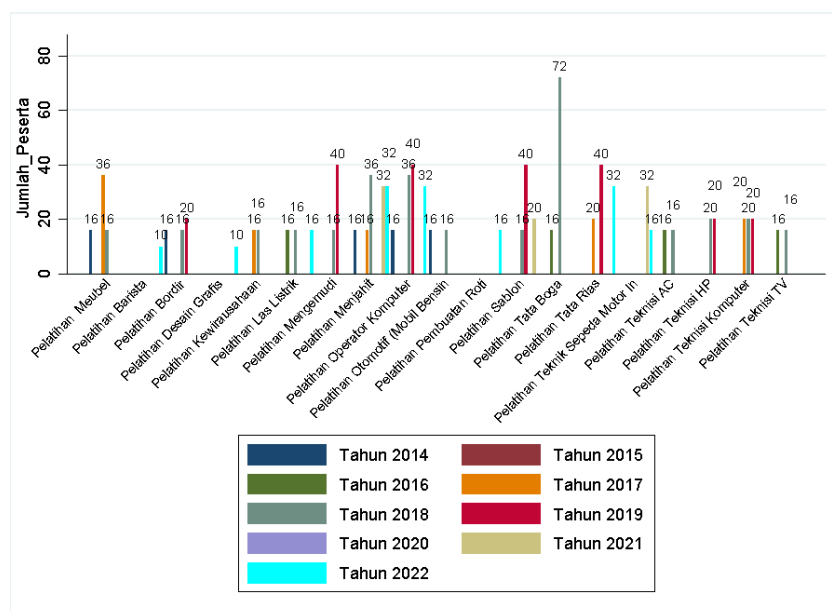
3.2.5.9 Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan merupakan indicator kinerja dari Dinas Tenaga Kerja. Persentase tenaga kerja di Kota Palopo yang mendapatkan pelatihan trennya mengalami kondisi fluktuatif. Tahun 2022 persentase yang dilatih dari total yang mendaftar hanya 47,67% (Tabel.30). Kondisi ini disebabkan dengan terbatasnya anggaran dalam melakukan pelatihan, sehingga kuota yang dibuka disesuaikan dengan anggaran yang ada pada perangkat daerah pengampu. Selama tahun 2014 Dinas tenaga kerja telah melaksanakan 19 jenis pelatihan (Gambar.37).

Tabel 30 Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah tenaga kerja yang dilatih	328	220	0	84	164
Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	328	508	0	109	344
Persentase	100	43,31	0	77,06	47,67

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo



Gambar 37 Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014-2022

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Selama tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan pelatihan kepada 164 orang dan 8 jenis pelatihan (Tabel 30 dan Gambar.37). Harapannya setelah dilakukan pelatihan angkatan kerja tersebut dapat langsung terserap oleh lapangan kerja ataupun dapat membuka lapangan kerja sendiri

3.2.6 Ketahanan Pangan

Meningkatnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap jumlah ketersediaan pangan minimal yang harus dicukupi, oleh karena itu urusan ini masuk dalam urusan wajib. Dalam rangka mengukur kinerja urusan ketahanan pangan, maka setiap tahunnya dilaporkan hasil capaian setiap indicator, informasi harga dan neraca pangan, dan peta ketahanan kerawanan pangan.

3.2.6.1 Indikator Kinerja

Indikator pertama capaian perangkat daerah pengampu yaitu Dinas Ketahanan Pangan (Tabel..31), indikator pertama adalah ketersediaan bahan pangan utama yang menunjukkan setiap tahunnya mengalami peningkatan dari 2,34% menjadi 7,46% tahun 2022. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya (Lihat gambar.5). Selanjutnya adalah ketersediaan energi dan protein yang menunjukkan tren fluktuatif, kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah energi dan protein yang terkandung dalam makanan setiap harinya nilainya fluktuatif, disisi lain pembagiannya yaitu jumlah penduduk semakin tahun semakin bertambah. Ketersediaan dan pasokan dari luar daerah juga mempengaruhi hal tersebut, tahun 2021 ketersediaan energi dan protein per kapita meningkat dari 2.540 Kkal/kapita per hari tahun 2020 menjadi 3.596 Kkal/kapita per hari.

Tabel 31 Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan Bahan Pangan Utama (%)	2,34	3,55	4,26	7,46
Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (Kkal/kapita/hari)	4.085	2.540	3.596	-
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	86,49	94,12	93,33	-
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,60	0	90	82,5
Penguatan Cadangan Pangan (ton)	5,76	5,76	4,92	4,60

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 94,12% menjadi 93,33%. Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) juga mengalami penurunan dari tahun 2019-2022 skor terakhir adalah 82,5. Terakhir adalah

pengutan cadangan pangan, di tahun 2022 sebesar 4,60 ton atau mengalami tren penurunan sejak tahun 2020 dari 5,76 ton.

3.2.6.2 Informasi Harga dan Neraca Pangan Rata-Rata per bulan Tahun 2021

Data terbaru yang didapat dari perangkat daerah pengampu yaitu Dinas Ketahanan pangan Kota Palopo terkait harga dan neraca pangan rata-rata per bulan selama tahun 2021 disajikan pada tabel 32.

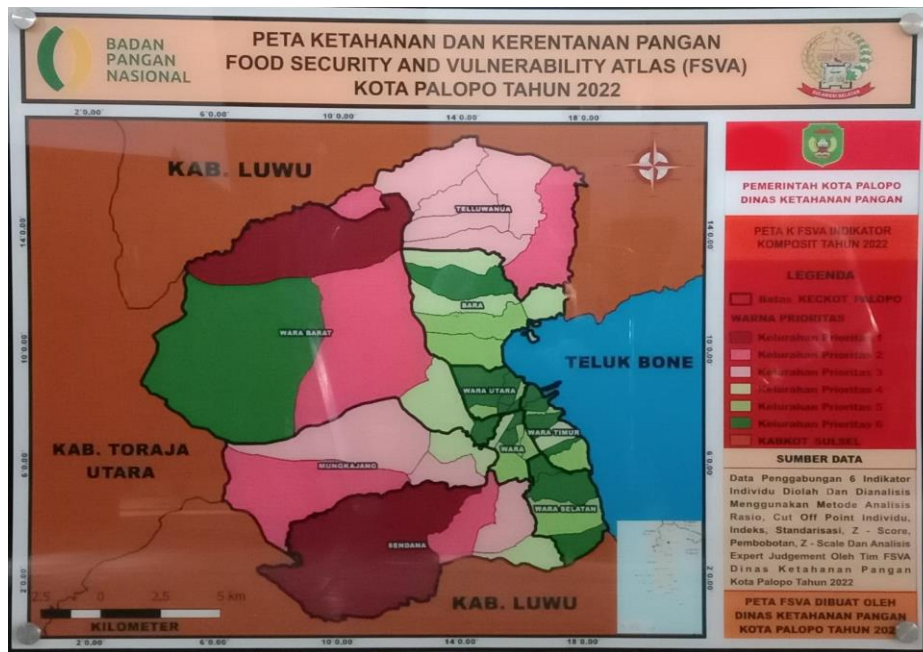
Tabel 32 Harga dan Neraca Pangan Rata-Rata per Bulan Kota Palopo Tahun 2021

Komoditas	Supply (ton)			Kebutuhan (ton)			Harga/kg (Rp)	Kebutuhan Per kapita Bulan	
	Harian	Mingguan	Bulanan	Harian	Mingguan	Bulanan		ton	Kg
Beras	64.79	453.50	1814.00	53.7	375.90	1503.60	9800	0.008141606	8.141606
Jagung	2.37	16.58	66.32	1.7	11.90	47.60	6000	0.000257742	0.257742
Bawang Merah	1.03	7.20	28.80	0.8	5.60	22.40	24300	0.00012129	0.12129
Bawang Putih	0.88	6.15	24.60	0.7	4.90	19.60	30000	0.000106129	0.106129
Cabai Besar	0.12	0.85	3.40	0.1	0.70	2.80	45000	1.51613E-05	0.015161
Cabai Rawit	1.21	8.50	34.00	1.2	8.40	33.60	85000	0.000181935	0.181935
Daging Sapi	2.76	19.30	77.20	2.6	18.20	72.80	125000	0.000394193	0.394193
Daging Ayam Ras	3.65	25.55	102.20	3	21	84.00	27700	0.000454838	0.454838
Telur Ayam Ras	6.18	43.25	173.00	5.8	40.60	162.40	27500	0.000879354	0.879354
Gula Pasir	1.81	12.70	50.80	1.4	9.80	39.20	13000	0.000212258	0.212258
Minyak Goreng	3.61	25.25	101.00	3.5	24.50	98.00	20000	0.000530645	0.530645

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

3.2.6.3 Peta Kerawanan Pangan

Indikator urusan ketahanan pangan juga memperhitungkan berkurangnya persentase kelurahan yang masuk kategori rentan pangan. Tahun 2022 kategori kelurahan yang masuk dalam kerawanan pangan sebesar 4,16% atau kurang dari target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin kecil persentase kelurahan yang masuk kategori pangan semakin baik, dan apabila memungkinkan harus mencapai 0%. Indikator kerawanan pangan ditampilkan gambar.38.



Gambar 38 Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Kota Palopo Tahun 2022
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2022

3.2.7 Pertanian dan Perkebunan

3.2.7.1 Jumlah Produktivitas Komoditas

Kota Palopo adalah kota perdagangan dan jasa di wilayah Luwu raya. Walaupun demikian sektor pertanian memberikan andil nomor tiga sebagai kontributor PDRB atas lapangan usaha setelah perdagangan jasa, dan konstruksi (gambar.3). Hal ini selaras dengan luasan lahan pertanian produktif yang hampir mendekati separuh yaitu 45,62% (11.297 Ha). Kemudian produksi tanaman bahan pangan utama masih didominasi oleh tanaman padi yang mampu menghasilkan 20.280,89 ton. Diikuti dengan luasan panen untuk padi sebesar 3.324,75 Ha. Produktifitas tanaman pangan tertinggi adalah tanaman jagung sebesar 6,27 ton/Ha. Kompilasi jumlah produktivitas hasil pertanian disajikan pada tabel.33.

Tabel 33 Kompilasi Produktivitas Tanaman Pangan Kota Palopo Tahun 2015-2022

Uraian	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi tanaman padi/ bahan pangan utama lokal lainnya (Ton)								
Padi	28,630	30167	32,444	33.259	20.355,7	17.585,85	19.383,84	20.280,89
Jagung	4,737	6,303	5086	4.988	7.493	5.350	4.315,2	5.119,45
UbiKayu	177	70.4	70	39,20	-	-	-	-
Ubijalar	13	18.94	4.55	1,12	-	-	-	-
Sagu	51.33	33.04	15.59	1,67	2.23	18,20	15,00	15,00
Luas panen tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ha)								
Padi	5,098	5,128	5172	5.200	4954	3.054	3.024	3.324,75

Jagung	713	928	753	684	1.111	866	696	816,5
UbiKayu	8	7	1	1	-	-	-	-
UbiJalar	1	1	0	0	-	-	-	-
Sagu	110.5	112.83	289.75	298,84	151.55	103,19	179,36	241,43
Produktifitas (Ton/Ha)								
Padi	5.62	5.88	6.27	6,40	6.42	5,76	6,41	6,1
Jagung	6.64	6.79	6.75	7,09	6.75	6,19	6,20	6,27
UbiKayu	22.13	10.06	70	79,52	-	-	-	-
UbiJalar	13.00	18.94	4.55	2,95	-	-	-	-
Sagu	0.46	0.29	0.05	0,01	31.32	0,25	153,06	62

Sumber : Dinas Pertanian

Secara keseluruhan produktivitas tanaman pangan yang tetap konsisten setiap tahunnya memberikan andil terbesar masih didominasi oleh tanaman padi, jagung, dan sagu. Ketiga tanaman pangan tersebut masuk dalam bahan pangan pokok bagi masyarakat Sulawesi.

3.2.7.2 Jumlah Kelompok Tani yang Dibina

Jumlah kelompok tani yang dilakukan pembinaan merupakan bagian dari program penyuluhan pertanian. Program ini kerangka pendanaannya bisa bersumber dari APBD maupun DAK non fisik bidang pertanian. Persentase jumlah kelompok tani yang telah dibina dan mendapatkan bantuan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 67,96% menjadi 62,74% di tahun 2022 (tabel.34).

Tabel 34 Jumlah Kelompok Tani yang Dibina dan Mendapatkan Bantuan Tahun 2015-2022

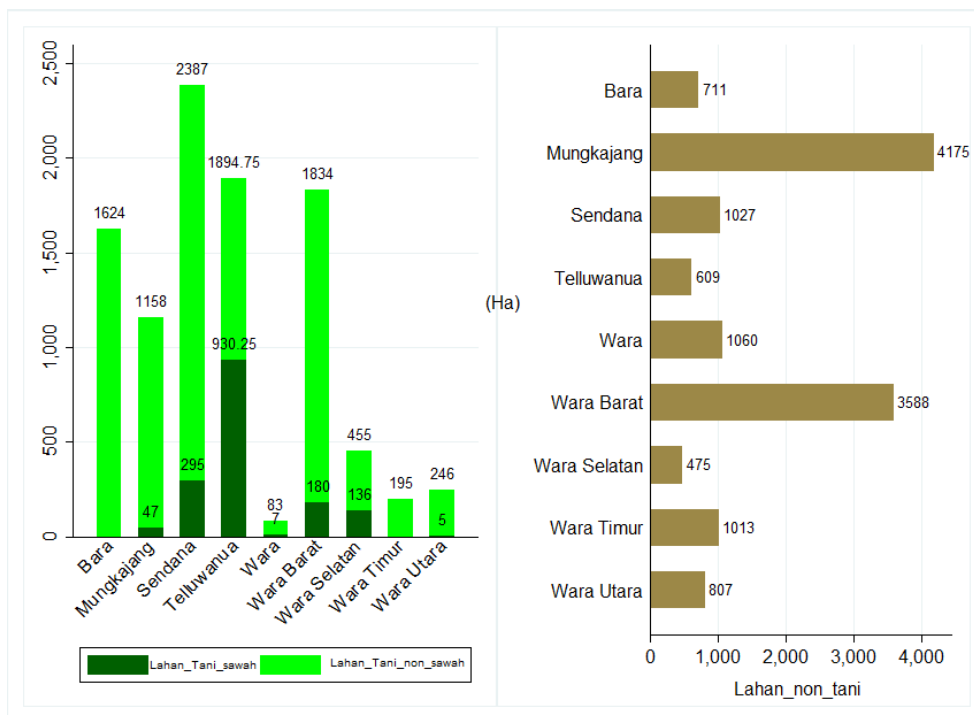
Uraian	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda dan dibina	364	319	222	437	267	439	350	352
Jumlah kelompok tani	407	407	438	458	475	499	515	561
Persentase	89,43	78,38	50,68	95,41	56,21	87,97	67,96	62,74

Sumber : Dinas Pertanian

Adapun bantuan dan pembinaan yang dilakukan perangkat daerah pengampu dalam hal ini Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan diberikan pada kelompok tani yang telah terdaftar dalam GAPOKTAN dimana setiap kelompok terdiri dari 20-25 orang petani/pekebun dan peternak.

3.2.7.3 Penggunaan Luas Lahan

Penggunaan luas lahan berpengaruh terhadap hasil produksi pertanian di Kota Palopo. Penggunaan lahan di Kota Palopo terbagi menjadi dua yaitu lahan non pertanian dan lahan pertanian. Luasan lahan non pertanian di Kota Palopo sebesar 13.465 Ha, kemudian luasan lahan pertanian sebesar 11.477 Ha (gambar.39).



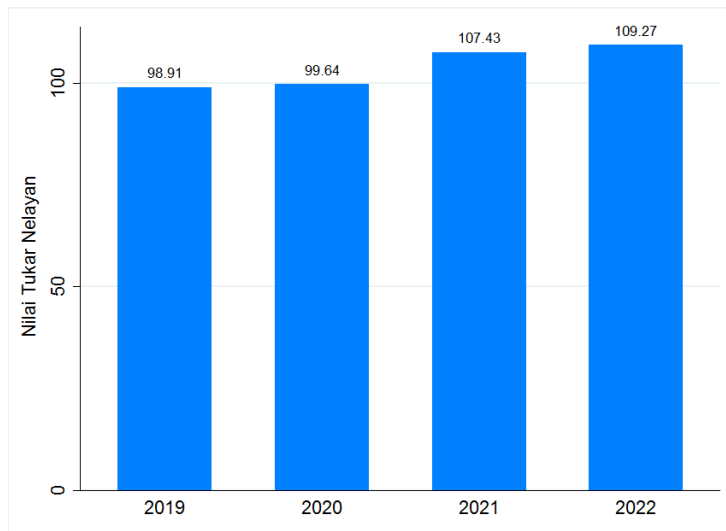
Gambar 39. Penggunaan Luas Lahan Pertanian dan non Pertanian Tahun 2022
Sumber : Dinas Pertanian

Luasan lahan pertanian terdiri dari lahan pertanian sawah dan lahan pertanian non sawah. Luasan lahan pertanian sawah terbesar terletak di kecamatan Telluwanua 930,25 Ha. Kemudian lahan pertanian non sawah terbesar berada di kecamatan Sendana yaitu 2.387 Ha. Perlu diketahui bahwa jumlah penduduk miskin ekstrim terbanyak berada di kecamatan Telluwanua. Kondisi ini menunjukkan bahwa status pekerjaan individu yang bersifat subsisten berpeluang besar masuk dalam kategori penduduk miskin maupun miskin ekstrim.

3.2.8 Perikanan

Bidang perikanan masuk dalam urusan pilihan, perangkat daerah pengampu urusan ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Palopo. Dinas ini mengelola kegiatan yang dilakukan oleh nelayan baik perikanan tangkap, budidaya, sampai pengolahan hasil perikanan. Kesejahteraan nelayan setiap tahunnya mengalami peningkatan (Gambar.40).

Tahun 2022 nilai tukar nelayan (NTN) meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 109,27. Meningkatnya NTN mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan. Hasil kinerja urusan perikanan selama tahun 2021-2022 untuk sektor perikanan budidaya dan olahan hasil perikanan mengalami peningkatan yang signifikan, berbanding terbalik dari hasil produksi perikanan tangkap yang mengalami penurunan 124.,20 ton (Tabel.35).



Gambar 40 Nilai Tukar Nelayan Tahun 2019-2022
Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov.Sulsel, 2022

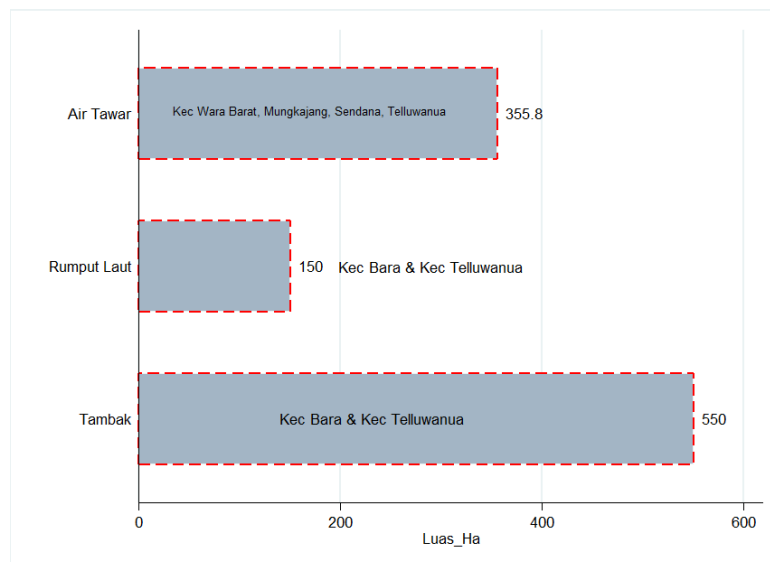
Tabel 35 Hasil Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Palopo Tahun 2021-2022

Uraian	2021	2022
Jumlah produksi perikanan tangkap	18.378,60	18.254,4
Jumlah produksi perikanan budidaya	158.528,90	174.750,87
Jumlah produksi olahan hasil perikanan	79,44	133.49

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan

Urusan kelautan dan perikanan termasuk dalam urusan pilihan. Melihat kondisi geografis Kota Palopo yang memiliki pantai, maka urusan kelautan dan perikanan di Kota Palopo diampu oleh dinas terkait yaitu dinas kelautan dan perikanan Kota Palopo. Berdasarkan data dari P3KE Kemenko PMK tahun 2022, 833 kepala keluarga atau 7,47% yang berprofesi sebagai nelayan di Kota Palopo masuk dalam kategori penduduk miskin dan miskin ekstrim. Kota Palopo tidak hanya memiliki potensi perikanan tangkap, tetapi juga ada potensi perikanan budidaya tambak dan air tawar yang terletak di empat kecamatan (Gambar.41).

Potensi perikanan non tangkap di Kota Palopo meliputi perikanan air tawar dengan total luasan produksi 355,8 Ha terletak di kecamatan Wara Barat, Mungkajang, Sendana, dan Telluwana. Kemudian budidaya rumput laut 150 Ha terletak di kecamatan Bara dan Telluwana. Terakhir adalah budidaya tambak air payau yang terletak di kecamatan Bara dan Telluwana 550 Ha. Disamping itu juga pemerintah melalui dinas perikanan membangun balai benih ikan Salopao dengan luas 1,3 Ha di kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwana.



Gambar 41. Potensi Perikanan non-Tangkap Kota Palopo (Luas Produksi Ha)
Sumber : RPJMD Kota Palopo 2018-2023

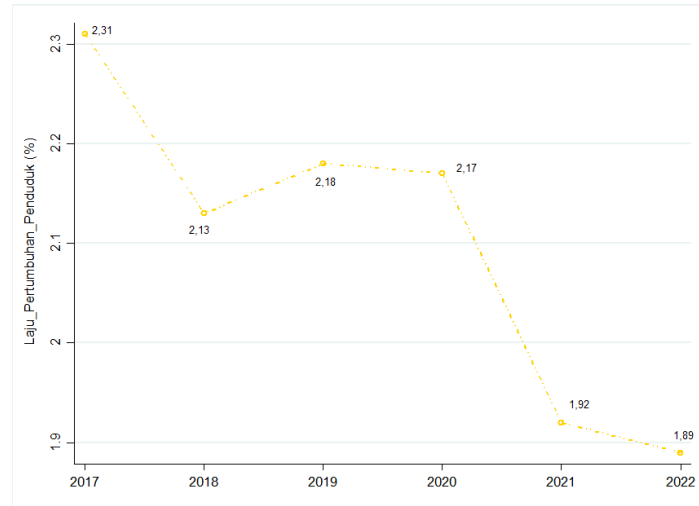
3.2.9 Kependudukan dan Pengendalian Penduduk

Urusan kependudukan masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini berkaitan dengan pengendalian penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk beban pemerintah Kota Palopo akan semakin berat, karena peningkatan jumlah penduduk tidak sebanding dengan meningkatnya anggaran dan sumber pendapatan lainnya. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali berpengaruh positif terhadap meningkatnya angka kemiskinan, karena tidak semua penduduk tersebut yang masuk angkatan kerja dapat terserap dalam dunia kerja.

Oleh karena itu pemerintah Kota Palopo melalui dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PP&KB) melalui program pengendalian penduduk dan pembinaan KB menargetkan pasangan usia subur (PUS) yang mengikuti metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebesar 8% dengan harapan dalam satu keluarga 2 anak cukup. Urusan kependudukan dan pengendalian penduduk terdiri dari beberapa indikator yang menjadi cakupan dalam dokumen ini yaitu laju pertumbuhan penduduk dan kepesertaan PUS dalam mengikuti KB.

3.2.9.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah indikator angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Palopo mengalami tren penurunan sejak tahun 2017-2022 (gambar.42).

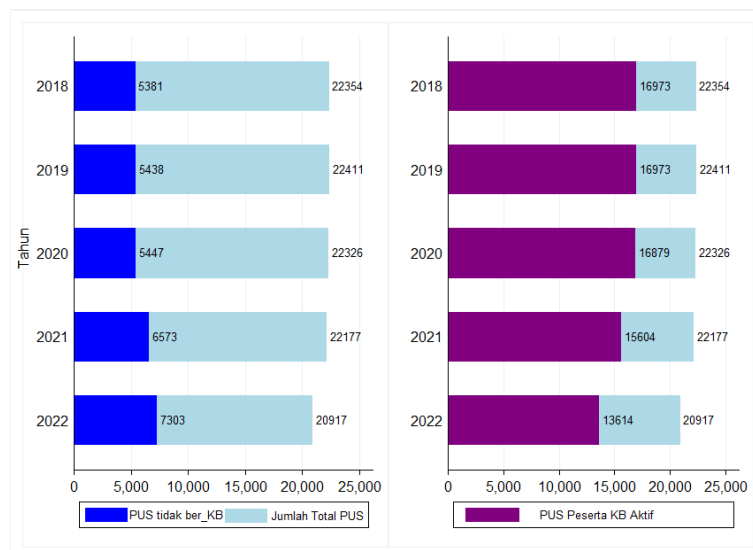


Gambar 42 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2022 (%)

Kondisi terakhir laju pertumbuhan penduduk di Kota Palopo sebesar 1,89% mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 1,92%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program keluarga berencana yang digiatkan oleh pemerintah telah berjalan dengan hasil yang positif, bahwa laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan.

3.2.9.2 Kepesertaan PUS dalam Mengikuti Program KB

Jumlah PUS di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan. Tahun 2022 jumlah PUS di Kota Palopo sebesar 20.917 jiwa. Kemudian jumlah PUS yang ber-KB atau mengikuti program KB hampir lebih dari $\frac{3}{4}$ jumlah total PUS, dan apabila dibandingkan dengan PUS yang tidak mengikuti program KB hanya $\frac{1}{4}$ (gambar.43). Hasil ini sejalan dengan capaian pada gambar.30 yang menunjukkan tren laju pertumbuhan penduduk yang mengalami penurunan.



Gambar 43.Kepesertaan PUS ber-KB Kota Palopo (Jiwa)
Sumber : Dinas KB dan Pengendalian Penduduk

3.2.9.3 Jumlah Peserta KB yang Menggunakan MKJP

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah metode kontrasepsi yang sekali pemakaiannya untuk 3 tahun hingga seumur hidup, sedangkan non MKJP hanya berkisar 1-3 bulan saja. Peserta KB yang mengikuti MKJP mengalami peningkatan selama tahun 2017-2021, walaupun di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 30,20% (tabel.36). Penurunan akseptor KB yang mengikuti MKJP mengalami penurunan, disebabkan karena adanya penurunan jumlah akseptor KB secara signifikan dari 15.604 menjadi 13.614 akseptor KB.

Tabel 36 Persentase Akseptor KB yang Mengikuti MKJP (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Akseptor KB yang menggunakan MKJP	3877	4648	3721	4028	5166	4111
Jumlah Akseptor KB	17774	18545	16973	16879	15604	13614
%	21,81	25,06	21,92	23,86	33,10	30,20

Sumber : Dinas KB dan Pengendalian Penduduk

3.2.10 Sosial

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah urusan sosial.

3.2.10.1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah indikator yang menggambarkan kemampuan Pemerintah dalam menangani Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Palopo dengan memberikan bantuan sosial. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin baiknya penanganan PMKS di Kota Palopo.

Tahun 2022 jumlah PMKS yang diberi bantuan mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan data yang masuk hanya data agregat PMKS yang mendapatkan bantuan yang bersumber dari dana APBD, sedangkan yang diberi bansos belum dilakukan perhitungan oleh

perangkat daerah terkait. Bantuan bansos meliputi PKH,BPNT,COVID-19,Permakanan dan Kenaikan BBM.

Tabel 37 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PMKS yang diberi bantuan	9.586	11.068	16.785	31.820	2660
Jumlah PMKS yang menerima seharusnya menerima bantuan	18.586	20.134	24.304	35.519	20.526
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	51.58	54,97	69,06	89,58	12,96

Sumber: Dinas Sosial Kota Palopo

3.2.10.2 Persentase PMKS yang Tertangani

Persentase PMKS tertangani adalah indikator yang menggambarkan cakupan atau besaran penanganan PMKS yang ada di Kota Palopo. Penanganan PMKS bisa dalam bentuk kegiatan seperti langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik penanganan PMKS di Kota Palopo.

Tabel 38 Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PMKS yang tertangani	6.875	9.598	11.139	16.865	31.820
Jumlah PMKS yang ada	18.588	18.662	20.221	24.337	35.519
Persentase PMKS yang Tertangani	36.98	51,43	55,09	69,30	89,58

Sumber : Dinas Sosial

1203.2.10.3 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Indikator ini menggambarkan besaran PMKS yang diberikan bantuan sandang pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya. Semakin tinggi indikator ini, semakin banyak PMKS yang terancam kehidupannya akibat persoalan pemenuhan kebutuhan yang sangat mendasar.

Persentase PMKS yang memperoleh bansos untuk kebutuhan dasar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di tahun 2021 persentase PMKS lebih dari $\frac{3}{4}$ atau 78,61%. Kondisi ini akan mengalami tren peningkatan sejalan dengan jumlah bansos yang akan diberikan oleh

pemerintah, karena data PMKS baru telah masuk dalam DTKS. Data DTKS setiap tahunnya akan mengalami peningkatan karena setiap bulan Dinas Sosial mengusulkan peserta baru berdasarkan hasil musyawarah kelurahan/desa. Data yang ada dalam DTKS tersebut tidak dapat dihapus ataupun dikurangi, hanya dapat dilakukan opsi penonaktifan bantuan karena meninggal, pindah, ataupun telah meningkat taraf kesejahteraanya.

Tabel 39 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	8.748	9.318	10.245	16.398	27.925
Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	15.184	15.778	16.990	21.348	35.519
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	57,61	59,06	60,30	76,81	78,61

Sumber : Dinas Sosial

3.2.10.4 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, yang Telah Menerima Bantuan Sosial

Penyandang disabilitas bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan akses pemberdayaan dan bantuan sosial. Jumlah total disabilitas Kota Palopo pada tahun 2021 sebanyak 1.109 dan tidak terjadi penambahan jumlah di tahun 2022. Pemerintah melalui Dinas Sosial telah mengupayakan untuk memberikan bantuan. Terjadi peningkatan jumlah disabilitas yang menerima bantuan sosial sebesar 24,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 10,82% (Tabel.40)

Tabel 40 Disabilitas yang Menerima Bantuan Sosial

Uraian	2021	2022
Jumlah disabilitas yang menerima bansos	120	268
Jumlah Disabilitas	1.109	1.109
%	10,82	24,17

Sumber : Dinas Sosial

Sedangkan secara total keseluruhan penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosial disajikan pada tabel. 40. Sepanjang tahun 2018-2021 persentasenya fluktuatif (tabel.41). Kondisi ini dipengaruhi oleh verifikasi hasil DTKS yang diterima berdasarkan hasil

musyawarah kelurahan bersifat dinamis, sehingga tidak dapat dipastikan apakah jumlah penerima manfaat saat ini sama dengan tahun sebelumnya atau terjadi perbedaan.

Tabel 41 Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Penerima Jaminan Sosial

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	138	248	672	387	953
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	1.162	1.260	1.622	2.305	4.081
Persentase	11,88	19,68	41,43	16,79	23,35

Sumber : Dinas Sosial

3.2.11 Perdagangan

Perdagangan termasuk dalam urusan pilihan. Urusan perdagangan berkaitan dengan stabilitas harga bahan pokok atau sembako sebagai bahan konsumsi masyarakat. Seperti diketahui bahwa harga bahan pokok dipengaruhi oleh ketersediaan barang di pasar, dan ekspektasi inflasi yang terjadi karena mekanisme *supply and demand* pasar. Di Indonesia secara teori ekonomi sembako masuk dalam kategori pasar persaingan sempurna, dimana semua informasi dapat diketahui secara lengkap, dan pelaku usaha bebas keluar masuk dalam aktivitas tersebut. Maka dari itu pemerintah tidak dapat secara langsung dan signifikan melakukan intervensi pasar, sehingga jalan satu-satunya melalui mekanisme pengendalian harga. Pemerintah pusat tidak bekerja sendiri untuk mengendalikan harga tersebut, tetapi dibantu oleh pemerintah daerah melalui tim pengendali inflasi daerah (TPID) yang telah dibentuk oleh pemerintah setempat. Dari sisi *supply* pemerintah harus mengawasi rantai pasok, agar tetap lancar sehingga tidak terjadi kelangkaan maupun kelebihan.

Berkaitan dengan kemiskinan urusan perdagangan tidak secara langsung menurunkan angka kemiskinan melainkan memberi andil dalam perhitungan garis kemiskinan di suatu daerah. Garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS setiap tahunnya didasarkan oleh survey harga kebutuhan dasar pangan dan non pangan. Walaupun tidak memberikan kontribusi secara signifikan dalam menentukan harga Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Perdagangan berusaha mengendalikan lewat program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat pra-sejahtera. Terdapat juga program

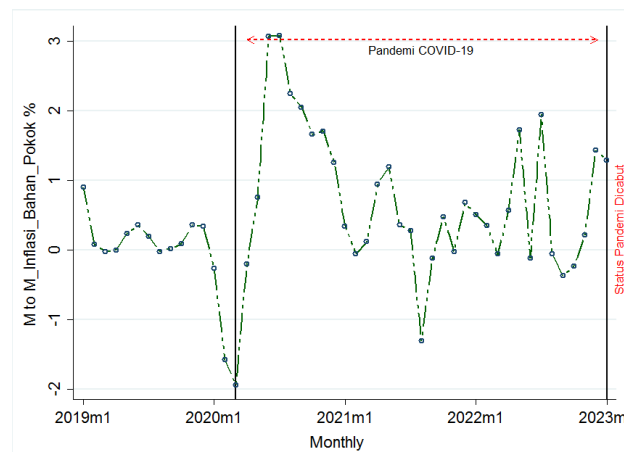
untuk penguatan produk lokal daerah agar terserap di pasar, sehingga berdampak kepada pelaku usaha kecil dalam meningkatkan kesejahteraan.

Tabel 42 Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2022

Program	Indikator	Realisasi 2022		Target 2022	
		Kinerja	Pagu	Target	Pagu Indikatif
Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Persentase distribusi barang bersubsidi, bahan pokok dan barang penting lainnya yang diawasi	100%	373,056,060	100%	402,000,000
Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase pelaku usaha produk lokal yang masuk pasar	-	25,679,500	36.76%	33,000,000

Sumber :Dinas Perdagangan Kota Palopo

Realisasi kinerja urusan perdagangan untuk program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya telah sesuai target. Program tersebut memberikan kontribusi dalam stabilisasi harga bahan pokok di Kota Palopo. Hasil capaian kinerja pada urusan perdagangan dapat diukur dari kenaikan harga bahan pokok (gambar.44). Bahan pokok merupakan bagian dari *volatile food*, dimana ada harga pada kelompok bahan pokok tersebut sangat bergejolak jika ada perubahan *supply and demand* di pasar. Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2022 menargetkan inflasi pada kelompok ini < 2% *month to month* (M to M). Akhir tahun 2022 inflasi M to M kelompok bahan pokok sebesar 1,43%, sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu kurang dari 2%. Kinerja urusan perdagangan telah berhasil sesuai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPKD Kota Palopo tahun 2022.



Gambar 44 Inflasi Menurut Kelompok Bahan Pokok Kota Palopo Tahun 2019-2023 (M to M)

Sumber : BPS Kota Palopo 2019-2022 & Berita Statistik 2023

3.2.12 Koperasi

Koperasi adalah pelaku usaha yang mempunyai jatidiri berbeda dengan pelaku usaha lain yang bertujuan mensejahterakan anggota, menjamin keadilan pemerataan penguasaan sumberdaya ekonomi, meningkatkan produktifitas serta partisipasi anggota koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi merupakan model yang tepat untuk mengurangi kemiskinan, karena keanggotaan terbuka, usaha dilakukan secara bersama untuk memenuhi kepentingan bersama, dan pembagian keuntungan didasarkan pada transaksi anggota dengan koperasi.

3.2.12.1 Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif pada tahun 2018-2022, jumlah seluruh koperasi di Kota Palopo sebanyak 298 unit dan setiap tahun terus meningkat yang pada awal *baseline* mencapai 290 unit pada tahun 2018. Namun dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif terus mengalami penurunan. Permasalahan dari menurunnya persentase koperasi aktif, yakni adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT.

Tabel 43 Persentase Koperasi Aktif

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koperasi Aktif	206	74	69	77	76
Jumlah Seluruh Koperasi	290	292	292	296	298
%	71,03	25,34	24	37.38	25.50

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM Kota Palopo

3.2.12.2 Usaha Kecil dan Mikro (UKM)

Selain mengampu kegiatan perkoperasian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo juga mengampu program dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha mikro. Seperti diketahui bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak cabang yang dimiliki ataupun dikuasai oleh perusahaan lain baik secara langsung dan tidak langsung yang memenuhi kriteria yaitu jumlah asset maksimal > Rp.50.000.000,- s/d Rp.500.000.000,- dan jumlah omzet maksimal > Rp.300.000.000,- s/d Rp.2.500.000.000,-. Kemudian definisi dari usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria dengan jumlah asset maksimal Rp.50.000.000,- dan omzet maksimal Rp.300.000.000,-. Sejak tahun 2018-2022 jumlah UKM di Kota Palopo mengalami tren peningkatan (Tabel.44).

Tabel 44 Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah usaha mikro dan kecil	6.664	6.764	9.021	10.503	12.047
Jumlah seluruh UKM	8.824	8.975	11.022	12.504	14.048
Persentase	75,52	75,37	81.84	84	85,76

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM

Pada tahun 2018 persentase jumlah UKM hanya 75,52%, tetapi setelah lima tahun berjalan mengalami peningkatan menjadi 85,76% atau mengalami kenaikan 10,52%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi kecil bergerak secara perlahan dan pasti memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi walaupun tidak secara signifikan, dan yang perlu diapresiasi adalah sektor ini tahan dan kuat dalam segala pasang surutnya ekonomi makro regional dan nasional.

3.2.13 Pekerjaan Umum

Pekerjaan umum termasuk dalam urusan wajib pemerintahan. Hal yang masuk dalam pelayanan dasar yang berkaitan dengan penduduk miskin adalah penyediaan sarana sistem penyediaan air minum (SPAM) dan instalasi pembuangan air limbah (IPAL). Kemiskinan berkaitan erat dengan sarana prasarana kumuh, oleh karena itu penduduk miskin membutuhkan intervensi dalam penyediaan sarana air minum dan sistem pembuangan limbah domestik. Tetapi selain dari hal itu (sanitasi dan air bersih / minum) terdapat program lainnya yang menunjang program pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan masyarakat lainnya yang berhubungan dengan barang publik yaitu program pada bidang kebinamargaan dan cipta karya.

3.2.13.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jumlah panjang jalan yang dimaksud dalam indikator ini, adalah total keseluruhan panjang jalan yang berada di wilayah Kota Palopo termasuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara yang ada. Kondisi jaringan jalan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan. Salah satunya adalah Jalan Kondisi Baik (B) yang didefinisikan sebagai semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Proporsi panjang jaringan jalan berkondisi baik di Kota Palopo setiap tahunnya mengalami peningkatan (Tabel.45).

Tabel 45 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berkondisi Baik

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Berkondisi Baik (Km)	296.68	342.09	373.81	384.91	405.78	412,37
Panjang Jalan Keseluruhan (Km)	503.16	503.16	503.16	503.16	503.16	503.16
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	58.96	67.99	74.29	76.50	80.65	81.96

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Berdasarkan data sajian pada tabel.45 menunjukkan bahwa jalan merupakan bagian dari infrastruktur dasar dan masuk dalam prioritas pembangunan baik nasional maupun provinsi, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian ini tidak lepas dari *mandatory spending* bidang infrastruktur dasar 25%. Hasilnya peningkatan signifikan kondisi jalan baik di Kota Palopo dari 58,96% menjadi 81,96% pada tahun 2022.

3.2.13.2 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Jumlah panjang jalan yang dimaksud dalam indikator ini, adalah total keseluruhan panjang jalan yang berada di wilayah Kota Palopo termasuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara yang ada. Jaringan yang baik sangat mempengaruhi mobilitas dan aksesibilitas pergerakan di dalam jaringan tersebut. Pendekatan yang biasanya digunakan untuk perencanaan jaringan adalah pendekatan ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan nasional dan tidak boleh melupakan hambatan fisik yang mungkin ditemui. Di dalam sektor transportasi aksesibilitas adalah ukuran kemudahan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga dikatakan kalau aksesibilitas tinggi adalah bila alternatif rute menuju suatu tempat banyak sehingga dapat dicapai dengan gampang dari beberapa tujuan. Di sisi lain jumlah panjang jalan tidak bertambah secara signifikan, tetapi jumlah penduduk meningkat secara eksponensial. Kondisi ini berpengaruh terhadap kepadatan yang akan terjadi di jalan raya. Sepanjang tahun 2018-2022 rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mengalami penurunan (Tabel.46).

Tabel 46 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah panjang jalan (Jalan Negara + Jalan Propinsi + Jalan Kewenangan Pemkot)	503.16	503.16	503.16	503.16	503.16
Jumlah penduduk	180.678	184.614	184.681	187331	190867

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (per 10.000)	28	27,32	27,24	26,86	26,36

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Perlu diketahui bahwa meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya akan berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan pribadi. Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi akan berdampak kepada kepadatan lalu lintas di jalan. Semakin padatnya arus kendaraan menyebabkan terjadinya kemacetan, sehingga diperlukan perintisan jalan baru yang bersifat memecah arus ataupun sebagai jalan alternative. Pemerintah Kota Palopo telah membuka alternative baru untuk memecah kepadatan jalan arteri nasional yaitu jalan lingkar pelabuhan tanjung ringgit sampai dengan wilayah kelurahan Balandai. Kemudian jalan Sampoddo-Purangi yang tembus jalan Yogi.S Memet Songka dan terhubung dengan jalan lingkar barat Kota Palopo yang tembus di Kecamatan Bara.

3.2.13.3 Kondisi Jalan Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) dalam indicator ini dibatasi pada ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo, tidak termasuk jalan kewenangan Propinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara. Jalan berkondisi baik dikategorikan jika mampu dilewati kendaraan roda empat dengan kecepatan di atas 40 Km/Jam. Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Persentase jalan Kota Palopo yang tersedia selama tahun 2018-2021 (Tabel.47).

Tabel 47 Persentase Jalan Kabupaten / Kota Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Berkondisi Baik yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Km)	317,34	328,,44	340,31	355,90	-
Panjang Jalan Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Km)	443.39	443.39	443.39	443.39	-
Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan Pemerintah Kota Palopo yang dalam kondisi baik (%)	71,57	74,07.60	78,78	80,27	-

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Berdasarkan data sektoral yang diberikan perangkat daerah pengampu persentase jalan Kota Palopo yang berkondisi baik sebesar 80,27% di tahun 2021 atau terjadi peningkatan sebesar 8,7% dari tahun 2018. Kondisi ini cukup baik dikarenakan untuk mendapatkan angka

>80% dibutuhkan anggaran pemeliharaan pada bidang bina marga yang tidak sedikit, dan sejalan dengan *mandatory spending* bidang infrastruktur dasar 25%

3.2.13.4 Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Merujuk pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2014 dikatakan bahwa trotoar adalah jalur pejalan kaki yang sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki. Fungsi utama dari trotoar ini adalah sebagai fasilitas pelayanan bagi pejalan kaki. Kemudian drainase menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 tahun 2014 adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan penerima air. Seperti diketahui dilapangan bahwa tidak semua jalan memiliki drainase dan trotoar, walaupun sebenarnya idealnya satu paket dalam infrastruktur jalan raya. Seperti halnya Kota Palopo yang hanya memiliki persentase yang hanya 58,81% (Tabel.48).

Walupun demikian, proses pembangunan Kota Palopo bisa dilihat dari sisi infrastruktur sudah terlihat bagus, karena pada tahun 2018 baru mencapai 1,79%, yang kemudian secara signifikan terjadi kenaikan pada tahun 2020 menjadi 58,81% sampai dengan kondisi saat ini

Tabel 48 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	8,06	10,76	260.76	260.76	260.76
Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	443,39	503,16	443.39	443.39	443.39
Persentase	1,79	2,14	58.81	58.81	58.81

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

3.2.13.5 Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Menurut definisi sempadan adalah batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu yang sejajar dengan as jalan yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan ataupun dilaksanakan kegiatan aktivitas diatasnya. Sempadan jalan merupakan bagian dari RUMIJA (ruang milik jalan) yang masuk dalam perencanaan pelebaran jalan. Untuk data tersebut perangkat daerah pengampu belum memiliki dan mendata secara akurat, hanya sebatas panjang sempadan jalan saja yang ada di Kota Palopo yaitu 886,78 Km (Tabel.49).

Tabel 49 Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km)	-	-	-	-	-
Panjang seluruh sempadan jalan kabupaten (km)	886,78	886,78	886,78	886,78	886,78
Persentase	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

3.2.13.6 Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah Tinggal Bersanitasi adalah hunian yang memiliki fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah. Sementara menurut UU No 1 Tahun 2011, rumah tinggal adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Tabel 50 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rumah Tinggal berakses sanitasi	42.622	42.772	33.066	34.872	38.992
Jumlah Rumah Tinggal	44.209	44081	39.514	41.220	43.467
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	96,41	97,03	83.68	84,59	89,70

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Hasil tabel.49 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga bersanitasi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2018-2022, dimana pada mulanya 96,14% turun di tahun 2018 menjadi 83,68% kemudian kembali meningkat kembali tahun 2022 menjadi 89,70%. Hal ini dipengaruhi meningkatnya jumlah populasi di Kota Palopo sehingga membutuhkan tempat bernaung, disisi lain semakin besarnya permintaan akan rumah tinggal yang murah atau semi permanen maka sanitasi layak dikorbankan demi mendapatkan tempat bernaung yang layak. Kondisi tersebut umumnya terjadi di wilayah kumuh di daerah pesisir pantai dan pinggiran kota.

3.2.13.7 Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Sempadan sungai merupakan daerah yang seringkali menjadi lokasi untuk mendirikan bangunan liar yang memberikan kesan kumuh dan kotor. Umumnya yang mendirikan bangunan liar di sempadan sungai adalah warga miskin maupun warga pendatang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2015 garis sempadan sungai adalah garis maya di sisi kiri kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Sesuai aturan garis sempadan sungai berjarak 10 meter dari sisi kiri kanan alur sungai dengan kedalaman sungai ≤ 3 meter. Jarak 15 meter apabila kedalaman sungai > 3 meter dan ≤ 20 meter. Jarak 20 meter apabila kedalaman sungai > 20 meter. Di Kota Palopo masih terdapat bangunan liar yang berdiri di sempadan sungai (Tabel.51).

Tabel 51 Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km)	9.041,97	9.492,93	7.929,27	7.240,02	6.965,27
Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (km)	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97
Persentase (%)	47,72	50,10	41.85	38,21	36,76

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Selama tahun 2018-2022 persentase sempadan sungai yang terdapat bangunan liar mengalami tren penurunan. Tahun 2022 sempadan sungai yang terdapat bangunan liar hanya 36,76% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini pemerintah Kota Palopo telah melakukan revitalisasi sungai menggunakan dana dari Kementerian PU maupun dengan adanya program KOTAKU kota tanpa kumuh yang setiap tahunnya dilaksanakan melalui swakelola dengan pendampingan pihak yang telah ditunjuk oleh kementerian.

3.2.13.8 Drainase Dalam Kondisi Tidak Baik / Pembuangan Aliran Air Tersumbat

Drainase definisi secara umum adalah saluran tempat pembuangan air limbah rumah tangga maupun limpasan air hujan dari badan jalan. Drainase berperan vital dalam memberikan keindahan tata kota serta sanitasi yang sehat, dan yang paling utama adalah melindungi badan jalan dari kerusakan karena adanya genangan air. Setiap tahun pemerintah Kota Palopo telah melakukan revitaliasi maupun pembangunan drainase baru di lingkungan perumahan dan diluar lingkungan perumahan. Walaupun demikian masih terdapatnya drainase yang mengalami kerusakan akibat pembuangan air limbah domestic yang melebihi daya tampung, dan

ketidakpedulian masyarakat karena membuang sampah di drainase. Tahun 2022 persentase drainase yang berada kondisi tidak baik akibat tersumbat 7,96% (Tabel.52).

Tabel 52 Persentase Drainase Dalam Kondisi Tidak Baik / Pembuangan Aliran Air Tersumbat

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)	47,24	46,90	43,20	43,20	42,02
Panjang seluruh drainase di Kota Palopo (km)	524,89	529,04	530,197	530,197	530,197
Persentase	8,99	8,86	8,14	8,14	7,96

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Berdasarkan tabel 52 panjang drainase secara keseluruhan di Kota Palopo sebesar 530.197 Km. Selama tahun 2020-2022 tidak mengalami peningkatan panjang dikarenakan pemerintah berfokus melakukan revitalisasi drainase utama sepanjang jalan arteri di Kota Palopo yang volumenya sudah tidak sesuai dengan meningkatnya jumlah rumah dan curah hujan yang tinggi.

3.2.13.9 Luasan Genangan Saat Hujan

Genangan saat terjadi hujan merupakan hal yang lumrah karena air mencari tempat yang mengalir yang lebih rendah. Terkadang masyarakat masih belum bisa membedakan kategori mana yang masuk dalam banjir dan genangan. Genangan adalah ketinggian air yang disebabkan oleh hujan yang kurang dari 40 cm dan hanya mencakup area kurang dari 100 M² , sedangkan dikatakan banjir apabila memiliki ketinggian lebih dari 40 cm dan cakupan area lebih dari 100 M² dalam tempo lebih dari 1X24 jam.

Tabel 53 Persentase Terjadi Genangan Saat Hujan

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luasan daerah yang tergenang (Ha)	12.78	11.85	11.70	11.52	11.37
Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang (Ha)	43.04	42.11	41.96	41.78	41.63
Persentase	29.69	28.14	27.89	27.57	27.31

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Berdasarkan tabel.52 persentase terjadi genangan saat hujan mengalami penurunan sebesar 27,31%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas drainase yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya (sub bab 3.2.13.8) telah bekerja secara optimal. Setiap tahunnya persentase terjadinya genangan mengalami penurunan.

3.2.13.10 Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor.

Pembangunan turap merupakan bagian dari tindakan preventif dalam menanggulangi bencana longsor. Seperti diketahui bahwa Kota Palopo memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga potensi terjadinya bencana longsor sangat tinggi, terlebih terdapat kecamatan yaitu Wara Barat yang berada di lereng pegunungan perbatasan dengan wilayah Toraja Utara. Selain itu juga terdapat banyak anak sungai di Kota Palopo yang perlu diturap karena berdekatan dengan lokasi permukiman penduduk. Untuk membangun turap penahan longsor tidak mudah dikarenakan biaya pengerjaan yang sangat mahal. Oleh karena itu dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, dan total panjang turap di wilayah potensi longsor Kota Palopo mencapai 21,774,98 Km (Tabel.54).

Tabel 54 Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (Km)	19.713,18	21.021,28	21.198,98	21.354,93	21.774,98
Jumlah seluruh wilayah rawan longsor (Km)	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94
Persentase	62.42	66.57	67.13	67.62	68.95

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Selama tahun 2018-2022 terjadi tren peningkatan pembangunan turap baik di wilayah jalan dan sungai. Tahun 2022 sebesar lebih dari separuh (68,95%) ruas jalan dan sungai yang berpotensi longsor telah dilakukan pembangunan turap, dari total seluruh wilayah rawan longsor sepanjang 31.579,94 Km .

3.2.13.11 Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik

Irigasi merupakan hal yang berhubungan dengan penyediaan air bagi lahan pertanian maupun perkebunan. Walaupun Kota Palopo berstatus kota madya, masih terdapatnya lahan pertanian produktif (sub bab 3.2.7). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2022 tentang irigasi, bahwa irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Total luasan irigasi di Kota Palopo sebesar 907,90 Ha (Tabel.55).

Tabel 55 Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas irigasi kota dalam kondisi baik (Ha)	743,29	667,77	707,71	709,19	710,32

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas irigasi kota (Ha)	980,54	907,90	907,90	907,90	907,90
Persentase	75,80	73,55	77,95	78,11	78,24

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Kondisi irigasi di Kota Palopo sepanjang tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, persentase irigasi yang berkondisi baik meningkat 78,24% di tahun 2022, dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penjelasan pada sub bab 3.2.7, bahwa untuk menjaga konsistensi hasil panen lahan sawah yang produktif diperlukan daya dukung jaringan irigasi.

3.2.13.12 Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Rasio jaringan irigasi ini berkaitan dengan sub bab sebelumnya yaitu jaringan irigasi yang memiliki kondisi baik. Dukungan jaringan irigasi yang baik berdampak pada optimalnya panjang saluran irigasi dalam bekerja mengalirkan air. Rasio jaringan irigasi dalam mengairi persawahan mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020 kemudian selanjutnya stagnan pada angka 82,61 dan panjang 75.005 Km (Tabel.56).

Tabel 56 Persentase Rasio Jaringan Irigasi

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Saluran Irigasi (Km)	72.210	73.721	75.005	75.005	75.005
Luas Lahan Budidaya Pertanian (Sawah) (Ha)	907.90	907.90	907.90	907.90	907.90
Rasio Jaringan Irigasi (Per 1000 Ha)	76.54	81.20	82.61	82.61	82.61

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

3.2.13.13 Penduduk Berakses Air Minum

Kemiskinan berkaitan erat dengan sarana prasarana kumuh, oleh karena itu penduduk miskin membutuhkan intervensi dalam penyediaan sarana air minum. Penyediaan air bersih maupun air minum adalah hal yang saling berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Setiap ada konsumsi air bersih, pasti akan ada residu yang dihasilkan yaitu air limbah/kotor. Apabila satu orang menggunakan 100 liter air perhari untuk MCK, maka air yang terbuang menjadi limbah sekitar 85 liter. Pengelolaan air bersih berkaitan dengan pengelolaan fasilitas sanitasi. Berkaitan dengan kondisi tersebut pemerintah Kota Palopo perlu menyiapkan fasilitas sanitasi dasar tersebut. Penyediaan air bersih yang layak minum dan sanitasi. Berdasarkan data WHO, IUWASH (*Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene*) Indonesia memiliki sanitasi terburuk / tidak layak ketiga didunia setelah Tiongkok dan India. Berdasarkan fakta yang ada menunjukkan bahwa penyediaan sarana dasar ini perlu ditingkatkan untuk mencapai

masyarakat yang sehat dan sejahtera. Penduduk Kota Palopo yang memiliki akses bersih sebesar 94,38% (Tabel.57).

Tabel 57 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Berakses Air Minum (jiwa)	171.359	176.521	175.646	177.105	180.145
Jumlah Penduduk (jiwa)	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867
Persentase	94,84	95,61	95.11	94.54	94.38

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Pada dasarnya selama tahun 2018-2022 persentase penduduk yang berakses air minum trennya fluktuatif. Hal yang mempengaruhi adalah faktor meningkatnya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama yang dilakukan oleh perusahaan daerah pengelola air minum.

3.3 ANALISIS PERMASALAHAN KEMISKINAN

Dalam menganalisis permasalahan kemiskinan tidak hanya menggunakan pendekatan kualitatif melalui intervensi program kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah pengampu. Diperlukan juga pendekatan kuantitatif melalui perhitungan statistik berdasarkan dengan teori yang ada sebagai pembuktian apakah sejalah atau tidak, sehingga hasil tersebut dapat dijadikan rujukan sebagai pembuatan perencanaan program kegiatan pada perangkat daerah.

3.3.1 Analisis Makro

Permasalahan kemiskinan dapat diukur melalui pendekatan makro secara keseluruhan baik dari level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pendekatan makro dalam dokumen perencanaan ini menggunakan teori makro ekonomi. Indonesia merupakan negara yang masuk dalam *developing countries*, negara yang masuk dalam kategori negara berkembang masih berkuat dengan permasalahan kemiskinan. Maka dari itu bagaimana cara untuk menurunkan kemiskinan dengan membangun ekonominya. Pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Secara teori pertumbuhan ekonomi inilah yang berdampak kepada menurunnya angka kemiskinan. Tetapi hasil ini bisa berbeda-beda baik antar Negara, antar provinsi di Indonesia, maupun antar kabupaten/kota yang semuanya hasil dan kebijakannya tidak bisa direplikasi oleh daerah. Semua daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang

berbeda, sehingga membutuhkan formula kebijakan yang berbeda dalam menanggulangi kemiskinan.

Menurut BPS kemiskinan dipengaruhi oleh garis kemiskinan, dimana orang yang hidup dibawah garis tersebut masuk dalam kategori miskin. Garis kemiskinan diukur dari pengeluaran konsumsi, maka fungsi dari kemiskinan adalah pengeluaran konsumsi (1).

$$f(\text{Pengeluaran Konsumsi}_t) \dots \dots \dots (1)$$

t adalah periode waktu. Selain dari pengeluaran konsumsi secara makro kemiskinan (2) juga dipengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tingkat pengangguran, jumlah populasi penduduk, dan terakhir menambahkan variabel dummy sebelum terjadi dan selama pandemic COVID-19 di tahun 2020. Menggunakan data yang bersumber dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2022, model panel data kabupaten / kota.

$$y_{it} = \alpha_0 + \beta_1 \log(\text{Cons_Exp})_{i,t} + \beta_2 \log(\text{PDRB})_{i,t} + \beta_3 \log(\text{Jobless})_{i,t} + \beta_4 \log(\text{Pop})_{i,t} + \beta_5 \text{Dummy_Covid}_{i,t} + \mu_{i,t} \dots \dots \dots (2)$$

$Y_{i,t}$ adalah persentase kemiskinan 24 kabupaten/kota Sulawesi Selatan tahun 2015-2021. $\log(\text{Cons_Exp})_{i,t}$ adalah total pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan, di kabupaten / kota i di tahun t . $\log(\text{PDRB})_{i,t}$ adalah pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, di kabupaten / kota i di tahun t . $\log(\text{Jobless})_{i,t}$ adalah tingkat pengangguran terbuka, di kabupaten / kota i di tahun t . $\log(\text{Pop})_{i,t}$ adalah jumlah populasi, di kabupaten / kota i di tahun t . $\text{Dummy_Covid}_{i,t}$ adalah dummy sebelum adanya pandemi yang bernilai 0 dan 1 selama pandemi, di kabupaten / kota i di tahun t . $\mu_{i,t}$ merupakan *error term*.

Model ini menggabungkan data *cross section* dan data *time series* kabupaten / kota di Sulawesi Selatan 2015-2021, kemudian dengan menggunakan model data panel tersebut dapat dilihat perbedaan antar individu dan perbedaan antar waktu karena interseptnya maupun slope sama. Model ini tidak memperhatikan adanya perbedaan karakteristik dalam *cross section* maupun *time series*.

Dalam estimasi model panel data penentuan model terbaik ada dua yaitu *fixed effects* dan *random effects*. Untuk melihat apakah model yang digunakan adalah *fixed effects* atau *random effects* maka harus dilakukan uji *correlated random effects–hausman test*. Penentuan model terbaik antara *ordinary least square*, *fixed effect*, dan *random effect* menggunakan dua teknik estimasi model. Dua teknik ini digunakan dalam regresi data panel untuk memperoleh model yang tepat dalam mengestimasi regresi data panel. Dua uji yang digunakan, pertama *chow test* digunakan untuk memilih antara model *common effect* atau *fixed effect*. Kedua, *hausman test* digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau *random effect* yang terbaik dalam mengestimasi regresi data panel (Draper & Smith, 1996).

Tabel 58 Hasil Estimasi Model (2)

Variabel	Koefisien	S.E
<i>Cons_Exp</i>	-0.3437***	0.0594
<i>PDRB</i>	0.0027	0.0014
<i>Jobless</i>	0.0092***	0.0034
<i>Pop</i>	-0.0671	0.3041
<i>Dummy_Covid</i>	-0.0095	0.0122
Intersep	4.4282	0.0594

Level signifikansi : 1%***; S.E (standart error)

Sumber : Hasil olah

Hasil estimasi menunjukkan bahwa di Kota Palopo yang berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin adalah pengeluaran konsumsi per kapita per bulan, dan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi, jumlah populasi, dan pandemi covid tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Palopo. Meningkatnya pengeluaran konsumsi sebesar 1 % akan menurunkan presentase kemiskinan di Kota Palopo sebesar 0,34%, dan meningkatnya pengangguran sebesar 1% akan meningkatkan persentase kemiskinan sebesar 0,0092%.

$$\widehat{y}_{it} = 4,4282 - 0,3437(Cons_Exp)_{i,t} + 0,0027(PDRB)_{i,t} + 0,0092(Jobless)_{i,t} - 0,0671(Pop)_{i,t} - 0,0095 Dummy_Covid_{i,t} + e_{i,t} \dots \dots \dots (3)$$

Berdasarkan hasil tersebut (Tabel.58) menunjukkan bahwa, intervensi yang harus diambil pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Kota Palopo dengan upaya bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat miskin agar pengeluaran konsumsi juga meningkat dan membuka lapangan pekerjaan karena kedua variable tersebut berpengaruh signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan.

Menggunakan hasil permodelan persamaan (3) maka proyeksi kemiskinan di Kota Palopo tahun 2024-2026 dengan skenario I setiap tahun pengeluaran konsumsi meningkat 5%, dan TPT tetap pada angka 8%; Skenario II setiap tahun pengeluaran konsumsi meningkat 5% dan TPT menurun 1% setiap tahunnya (Tabel.59).

Tabel 59. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Palopo 2024-2026

Tahun	Skenario I	Skenario II	Proyeksi
2024	7.13	7.63	7.58
2025	5.41	7.28	7.38
2026	3.69	6.93	7.06

Sumber : Hasil Olah

3.3.2 Analisis Mikro

Analisis mikro dilihat berdasarkan karakteristik sosial ekonomi individu yang masuk dalam status miskin dan miskin ekstrim. Sumber data yang digunakan dalam analisis ini adalah data BNBA (*by name by address*) P3KE (Percepatan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Ekstrim) tahun 2022 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Berdasarkan data dari Kemenko PMK total penduduk miskin dan miskin ekstrim Kota Palopo sebesar 53.900 jiwa (tabel.60).

Tabel 60 Jumlah Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrim per Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Kategori		Jumlah
	Miskin	Miskin Ektrim	
Wara	4842	2106	6948
Wara Utara	4128	1662	5790
Wara Selatan	2801	1013	3814
Telluwanua	5277	3641	8918
Wara Timur	6525	3003	9528
Wara Barat	2656	1166	3822
Sendana	2392	1090	3482
Mungkajang	2417	876	3293
Bara	5700	2605	8305
	36738	17162	53900

Sumber : P3KE, 2022

Setelah dilakukan estimasi secara makro terhadap variable yang berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kota Palopo, maka selanjutnya adalah dilakukan estimasi secara mikro untuk melihat karakteristik miskin dan miskin ekstrim secara individu. Estimasi yang digunakan menggunakan model regresi logistic, karena variable respon (y) berkategori dikotomi (dua kategori) yaitu miskin dan miskin ekstrim. Regresi logistic adalah metode analisis data yang digunakan untuk mencari hubungan antara variable respon (y) yang bersifat dikotomi atau biner 0 dan 1. Kemudian variable predictor (x) terdiri dari jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikanm status pekerjaan, dan bansos (3).

$$\log \left[\frac{miskin}{1-miskin} \right] = \beta_0 + \beta_1 \text{Jenis_Kelamin}_i + \beta_2 \text{Umur}_i + \beta_3 \text{Status_Perkawinan}_i + \beta_4 \text{Pendidikan}_i + \beta_5 \text{Status_Pekerjaan}_i + \beta_6 \text{Bansos}_i \dots\dots\dots (3)$$

Berdasarkan pada persamaan (3) definisi operasional variable respon (y) dan variable predictor (x) adalah sebagai berikut,

Tabel 61 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Keterangan	Sumber Data
Miskin	Kategori Miskin (variable respon (y))sesuai dengan desil kesejahteraan 1,2,3 pada data BNBA. Miskin yang masuk dalam desil 2 &3 bernilai 1. Miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 bernilai 0.	
Jenis Kelamin	Jenis kelamin terdiri dari laki-laki bernilai 1 dan perempuan bernilai 0.	Data BNBA Kemenko PMK Tahun 2022

Variabel	Keterangan	Sumber Data
Umur	Umur yang masuk dalam estimasi adalah usia angkatan kerja >15 tahun	dengan jumlah observasi 28.689
Status Perkawinan	Status perkawinan terdiri dari belum kawin 0, kawin 1, dan cerai hidup/mati 2.	
Pendidikan	Status Pendidikan terdiri dari tdak sekolah 1, tamat pendidikan dasar 2, tamat Pendidikan menengah 3, dan tamat Pendidikan tinggi 4.	
Status Pekerjaan	Status pekerjaan terdiri dari belum bekerja bernilai 0, subsisten (pekerjaan berkaitan dengan kegiatan ekstraktif) bernilai 1, dan pekerjaan formal bernilai 2.	
Bansos	Bansos adalah individu penerima bantuan sosial (PKH,Ranstra, PBI,dll). Bernilai 0 jika tidak pernah menerima bantuan,dan 1 pernah menerima bantuan.	

Hasil estimasi menunjukkan seluruh variable predictor (x) signifikan terhadap variable respon (y) dengan level signifikansi 1%. Untuk melihat kecenderungan yang menjadikan seseorang individu sesuai dengan atribut prediktornya untuk menjadi miskin atau miskin ekstrim adalah nilai arah koefisiennya + atau -. Nilai *odds ratio* adalah nilai kecenderungan dan persentasenya dilihat dari nilai dy/dx . Jenis kelamin memiliki nilai negative yang artinya jenis kelaimin perempuan memiliki kecendurangan lebih tinggi 0,823 kali dan 3,9% untuk menjadi miskin ekstrim dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. Umur memiliki koefisien positif, artinya semakin meningkatnya umur memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menjadi miskin 1,015 kali dan 0,3%. Status perkawinan memiliki koefisien positif yang artinya status perkawinan kawin, dan cerai hidup/cerai mati memiliki kecenderungan lebih tinggi menjadi miskin 1,18 kali dan 3,2%. Pendidikan memiliki koefisien positif yang artinya Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi memiliki kecenderungan lebih tinggi menjadi miskin 1,5 kali dan 8,1%. Status pekerjaan memiliki koefisien positif yang artinya pekerjaan subsisten, dan formal memiliki kecenderungan lebih tinggi menjadi miskin 1,16 kali dan 3%. Bansos memiliki koefisien negative yang artinya individu yang belum pernah menerima bansos memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menjadi miskin ekstrim 0,94 kali dan 1,2%.

Tabel 62 Hasil Estimasi Persamaan Model (3)

	koefisien	<i>Odds ratio</i>	dy/dx	S.E
Jenis Kelamin	-0,194***	0,823	-0,039	0,034
Umur	0,015***	1,015	0,003	0,001
Status Perkawinan	0,165***	1,180	0,032	0,032
Pendidikan	0,405***	1,500	0,081	0,016
Status Pekerjaan	0,148***	1,160	0,030	0,018
Bansos	-0,060***	0,942	-0,012	0,011
Intersep	-0,632***			

	koefisien	Odds ratio	dy/dx	S.E
<i>n-obs</i> 28.689				
Keterangan : level signifikansi 1%***; S.E (Standart Errors)				

Kesimpulan dari hasil estimasi menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan, angkatan kerja yang memiliki umur muda, status perkawinan yang belum kawin, pendidikan yang belum pernah sekolah, status pekerjaan yang tidak bekerja, dan belum pernah menerima bantuan social memiliki kecenderungan tinggi untuk menjadi miskin ekstrim. Oleh karena itu karakteristik individu yang ditunjukkan pada hasil estimasi sebelumnya perlu dijadikan prioritas sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pensasaran penanggulangan kemiskinan ekstrem oleh perangkat daerah pengampu.

3.3.3 Hasil Analisis Perkembangan antar Waktu, Relatif, Relevansi, dan Efektifitas, Profil Kemiskinan Kota Palopo Tahun 2017-2022

Berdasarkan hasil analisis menggunakan hasil capaian indikator kinerja pada bab sebelumnya (Bab.3.2) dengan perangkat daerah yang mengampu urusan ketenagakerjaan, Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan indikator makro kemiskinan yang dirilis oleh BPS adalah sebagai berikut,

Tabel 63. Hasil Analisis Perkembangan antar Waktu, Relatif, Relevansi, dan Efektifitas Kemiskinan Kota Palopo Tahun 2017-2022

Indikator	Analisis						
	Perkembangan Antar Waktu		Posisi Relatif	Analisis Efektivitas		Analisis Relevansi	
	Awal	Akhir	Perbandingan dengan Capaian Provinsi /Nasional	Efektif	Tidak Efektif	Capaian Provinsi/ Nasional	Capaian antar Indikator
Kemiskinan Makro BPS							
Persentase Penduduk Miskin	8.78%	7.78%	Lebih Rendah Dari Capaian Provinsi Dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.75%	1.43%	Lebih Rendah Dari Capaian Provinsi Dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.60%	0.35%	Lebih Tinggi Dari Capaian Provinsi Dan Lebih Rendah Dari Capaian Nasional	√	(-)	Relevan	(-)

Indikator	Analisis						
	Perkembangan Antar Waktu		Posisi Relatif	Analisis Efektivitas		Analisis Relevansi	
	Awal	Akhir	Perbandingan dengan Capaian Provinsi /Nasional	Efektif	Tidak Efektif	Capaian Provinsi/ Nasional	Capaian antar Indikator
Jumlah Penduduk Miskin	15.440 jiwa	14.780 jiwa	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	Relevan dengan Persentase Penduduk Miskin
Garis Kemiskinan	Rp 274.319,-	Rp 403.144,-	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi, Lebih Rendah dari Capaian Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
Persentase Penduduk Miskin Ekstrem	1.92%	2.18%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Tidak Relevan	(-)
Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Gini Rasio)	0.34%	0.37%	Lebih rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Tidak Relevan	(-)
Bidang Ketenagakerjaan							
Angkatan kerja	75.563 jiwa	91.960 jiwa	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	Relevan dengan Persentase Penduduk Miskin
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59.56%	63.65%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
Tingkat Pengangguran Terbuka	10.96%	8.20%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Relevan dengan Provinsi. Tidak Relevan dengan Nasional	(-)
Bidang Pendidikan							

Indikator	Analisis						
	Perkembangan Antar Waktu		Posisi Relatif	Analisis Efektivitas		Analisis Relevansi	
	Awal	Akhir	Perbandingan dengan Capaian Provinsi /Nasional	Efektif	Tidak Efektif	Capaian Provinsi/ Nasional	Capaian antar Indikator
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	106%	105.20%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	83.33%	89.43%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Lebih Rendah Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99.18%	98.19%	Sama dengan Capaian Provinsi Lebih Tinggi dari Nasional	(-)	√	Tidak Relevan	(-)
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	80.30%	80.37%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi, dan Lebih Rendah dari Capaian Nasional	(-)	√	Tidak Relevan	(-)
Harapan Lama Sekolah	15.05 tahun	15.10 tahun	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
Angka Buta Huruf Penduduk 15+	2.29%	2.06%	Lebih Rendah Dari Capaian Provinsi, dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi	27.36%	24.83%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi, Tidak tersedia data Nasional	(-)	√	(-)	Relevan dengan Persentase Rumah Tangga yang Menerima PIP
Bidang Kesehatan							
Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih	95.79%	84.60%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi, dan Nasional	(-)	√	Tidak Relevan	(-)

Indikator	Analisis						
	Perkembangan Antar Waktu		Posisi Relatif	Analisis Efektivitas		Analisis Relevansi	
	Awal	Akhir	Perbandingan dengan Capaian Provinsi /Nasional	Efektif	Tidak Efektif	Capaian Provinsi/ Nasional	Capaian antar Indikator
Angka Kesakitan	11.87%	9.47%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi, Tidak tersedia data Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir	38.97%	36.33%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi, dan Tidak Tersedia Data Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup)	0.99%	5.22%	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	(-)	√	(-)	Relevan dengan Kelahiran ditolong tenaga Kesehatan Terlatih
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	99.0%	278.65%	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	(-)	√	(-)	Relevan dengan Kelahiran ditolong tenaga Kesehatan Terlatih
Bidang Infrastruktur Dasar							
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	91.71%	92.09%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	95.13%	97.36%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik	99.64%	99.88%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Tidak Relevan dengan Provinsi, Relevan dengan Nasional	(-)
Bidang Ketahanan Pangan							

Indikator	Analisis						
	Perkembangan Antar Waktu		Posisi Relatif	Analisis Efektivitas		Analisis Relevansi	
	Awal	Akhir	Perbandingan dengan Capaian Provinsi /Nasional	Efektif	Tidak Efektif	Capaian Provinsi/ Nasional	Capaian antar Indikator
Perkembangan Harga Beras	Rp 10.038,-	Rp 8.981,-	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Tidak Relevan	(-)
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Raskin/BPNT	24.91%	24.40%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi Tidak tersedia data Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
Indeks Ketahanan Pangan	72.14%	75.48%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi Tidak Tersedia Data Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
Perkembangan Harga Bahan Pokok	Stabil	Stabil	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	(-)

Sumber : Hasil Olah

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

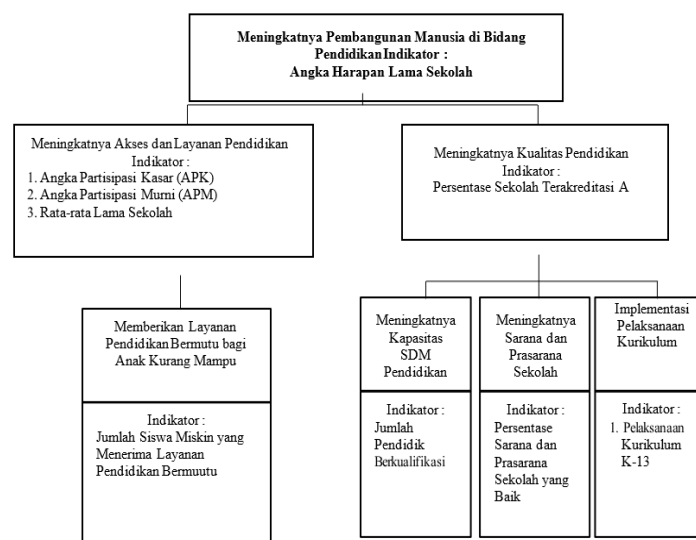
4.1 PRIORITAS INTERVENSI

4.1.1 Teori Perubahan/*Theory of Change*

Bab ini akan memberikan informasi lebih lanjut tentang: Prioritas Intervensi (teori perubahan) atau theory of change (ToC); Analisis keterkaitan; dan Analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan identifikasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui permasalahan di Kota Palopo terdapat dibidang apa saja yang tercermin dari hasil analisis indikator-indikator perbidangnya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut akan dilakukan intervensi dan disajikan ke dalam bentuk theory of change (ToC) yang terbagi menjadi beberapa bidang yaitu konsumsi pengeluaran, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan.

4.1.1.1 Urusan Pendidikan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya Pemerintah Kota Palopo berhasil menaikkan secara persisten Harapan lama sekolah selama kurun waktu lima tahun terakhir, dan capaiannya sudah melebihi capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Angka partisipasi kasar (APK) dan Angka partisipasi murni (APM) SD/MI mengalami penurunan dalam periode lima tahun terakhir, hal ini membutuhkan program yang inovatif agar masyarakat tertarik untuk menyekolahkan anaknya. Tujuan yang akan dicapai oleh Kota Palopo di bidang pendidikan yaitu meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dengan indikator Harapan Lama Sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC (gambar.45).

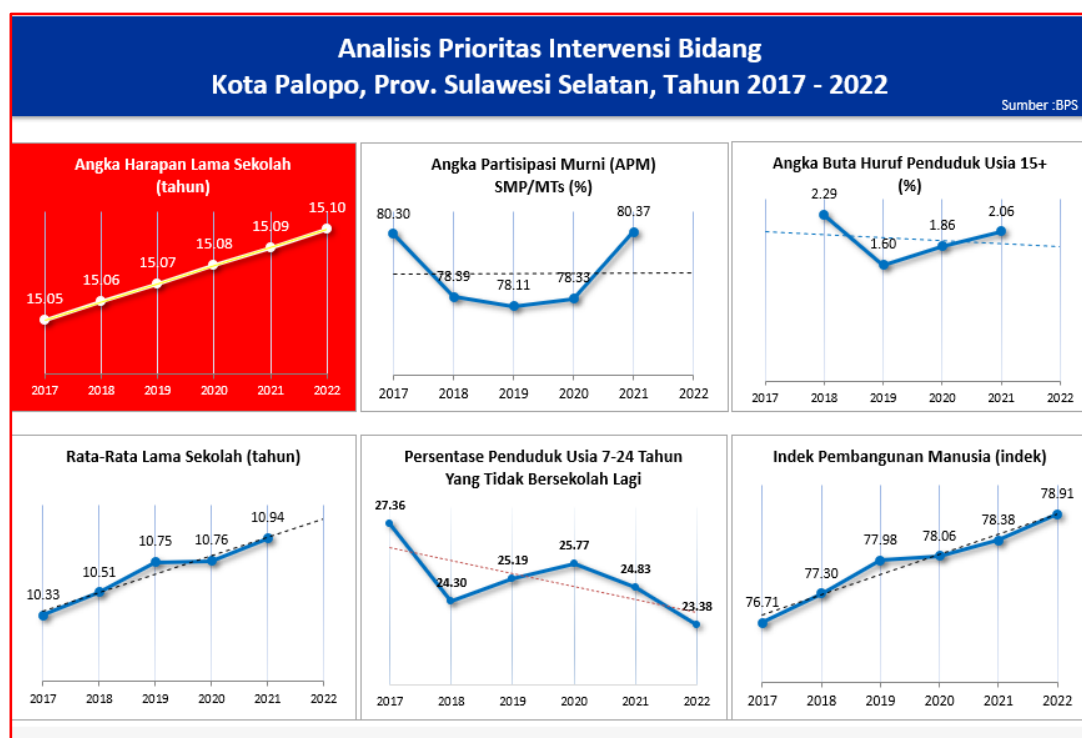


Gambar 45 Teori Perubahan/ToC Bidang Pendidikan

Agar tujuan meningkatkan Harapan Lama Sekolah dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal yaitu:

1. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan melalui :
Pemberian layanan pendidikan bermutu bagi anak kurang mampu
2. Meningkatnya kualitas pendidikan melalui :
Peningkatan kapasitas SDM pendidikan
Peningkatan sarana dan prasarana sekolah
Implementasi pelaksanaan kurikulum 2013 (K13)

Pada sektor pendidikan, permasalahan yang perlu diintervensi di Kota Palopo yaitu harapan lama sekolah. Adapun APK dan APM dan rata-rata lama sekolah sebagai sasaran antara yang harus tercapai, termasuk juga peningkatan kualitas pendidikan. Gambaran jelas mengenai keterkaitan sasaran antara dan tujuan utama.

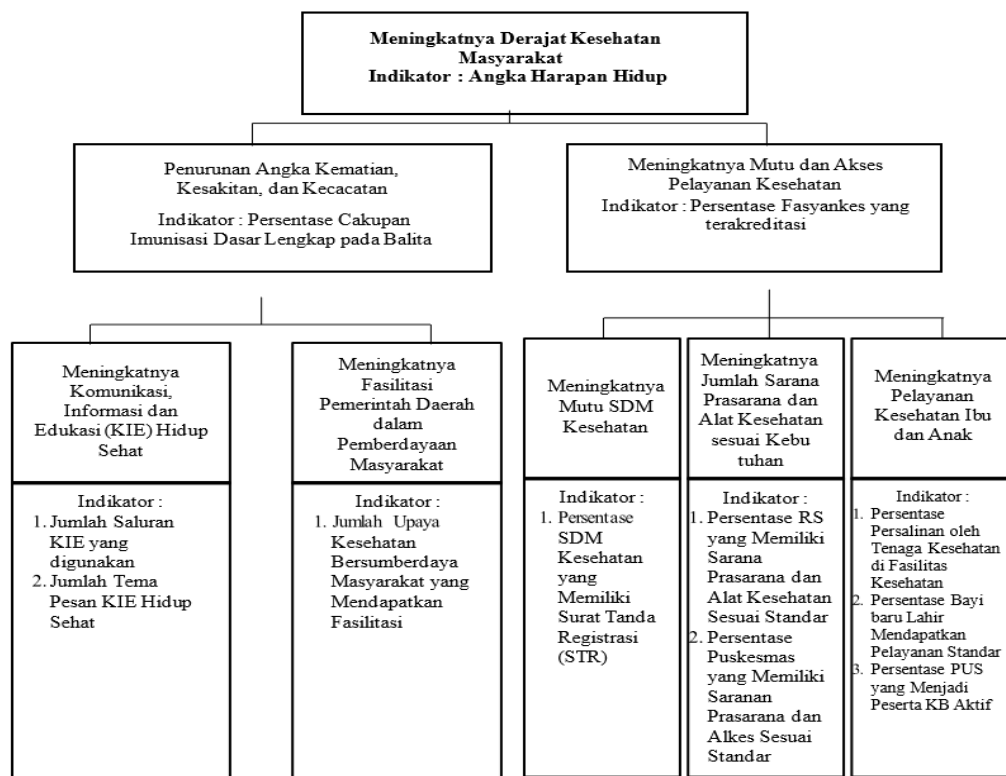


Gambar 46 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan

Dari gambar analisis keterkaitan diatas, diperoleh gambaran bahwa yang berkaitan kuat dengan peningkatan IPM adalah peningkatan Rata-rata lama sekolah, APM SMP/MTs juga peningkatan capaian Harapan Lama Sekolah. Hal ini juga terjadi pada penurunan capaian indikator angka buta huruf penduduk usia 15+ dan penurunan capaian indikator persentase penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi yang juga mempengaruhi peningkatan IPM. Jika harapan lama sekolah mengalami kenaikan maka akan sejalan dengan peningkatan capaian indeks pembangunan manusia (IPM).

4.1.1.2 Urusan Kesehatan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya masalah yang dihadapi oleh Kota Palopo di Bidang Kesehatan adalah penurunan capaian persentase kelahiran ditolong tenaga Kesehatan terlatih, Angka kematian bayi, kematian balita dan juga Angka kematian Ibu yang ikut mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Sehingga Tujuan yang akan dicapai oleh Kota Palopo di bidang kesehatan yaitu Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat yang tercermin dari Angka Harapan Hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaianantara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam *ToC* (gambar.47).



Gambar 47 Teori Perubahan/*ToC* Bidang Kesehatan

Agar tujuan meningkatkan Angka Harapan Hidup dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam *ToC* ini ada 2 hal yaitu:

1. Menurunnya angka kematian, kesakitan, dan kecacatan, melalui:

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi hidup sehat

Fasilitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat

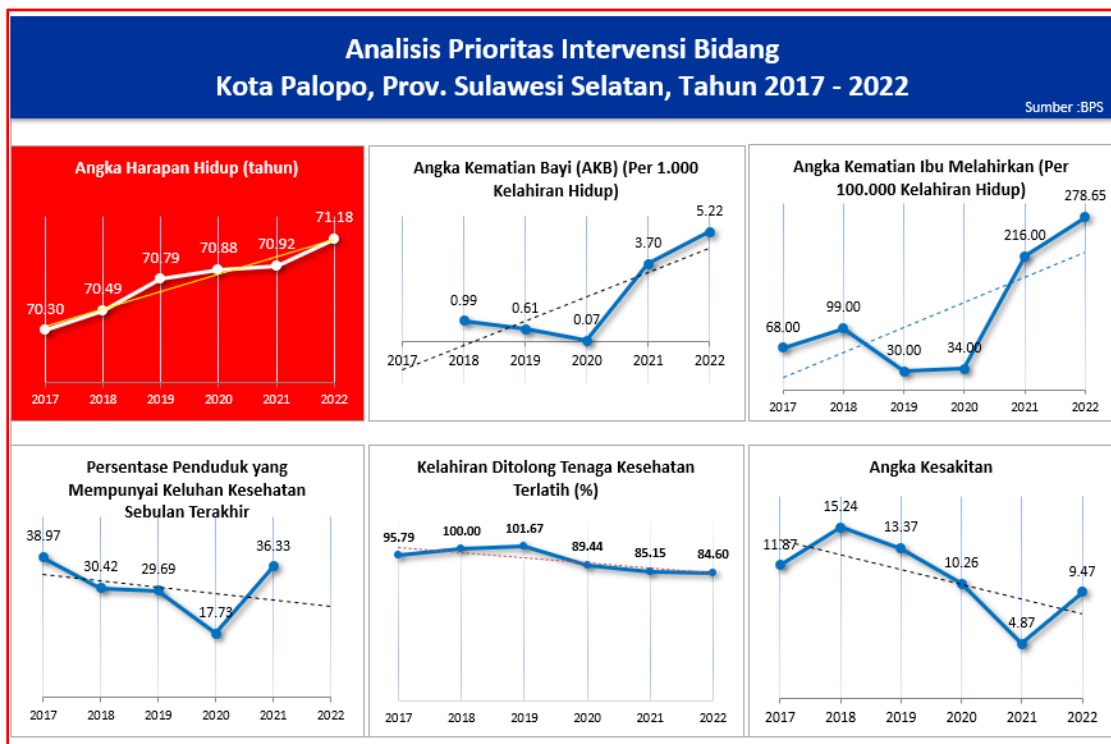
2. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan, melalui:

Meningkatnya mutu SDM Kesehatan

Meningkatnya jumlah sarana prasarana Kesehatan

Meningkatnya pelayanan Kesehatan ibu dan anak

Pada sektor kesehatan, permasalahan yang perlu diintervensi di Kota Palopo yaitu angka kematian bayi, angka kematian Ibu melahirkan, dan kelahiran ditolong tenaga Kesehatan terlatih karena ketiga indikator ini menunjukkan capaian yang tidak sesuai ekspektasi. Tren peningkatan capaian indikator angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan akan memperlambat optimalisasi capaian angka harapan hidup. Sementara penurunan capaian indikator persentase penduduk yang mempunyai keluhan Kesehatan dan indikator angka kesakitan secara langsung dapat mempengaruhi tren kenaikan capaian angka harapan hidup. Adapun keterkaitan antar indikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 48 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan

4.1.1.3 Urusan Ketenagakerjaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya Tingkat pengangguran daerah yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palopo masih mengalami peningkatan dalam periode 5 tahun terakhir. Masih tingginya tingkat pengangguran Kota Palopo tersebut terutama disebabkan oleh faktor kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah. Rendahnya minat pencari kerja untuk meningkatkan kapasitasnya disamping itu ketersediaan Pendidikan vokasional belum mampu menciptakan *link and macth* antara kurikulum vokasional dengan kebutuhan dunia industri. Faktor lain yang menyebabkan

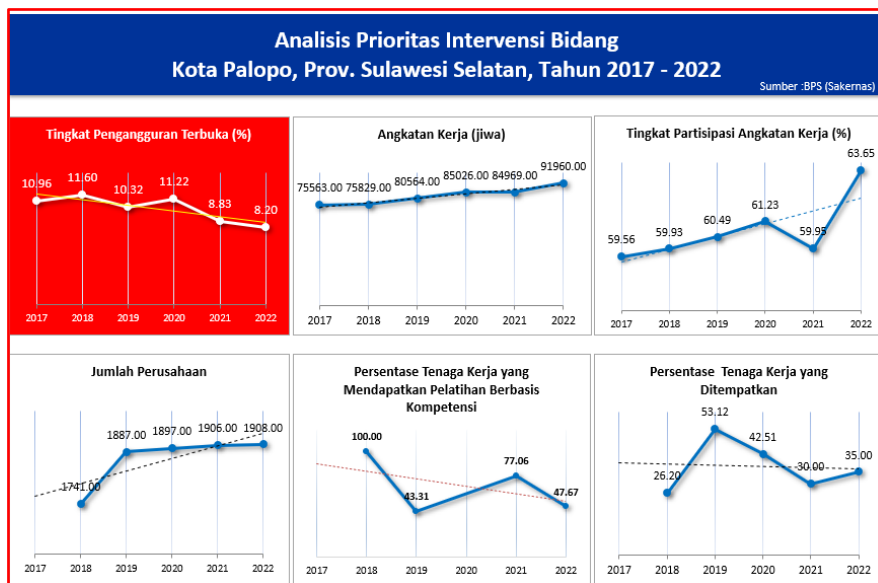
meningkatnya angka pengangguran di sebagian besar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah adanya pandemi covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Kota Palopo. Selain pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kota Palopo di bidang ketenagakerjaan yaitu Pembukaan lapangan kerja baru yang bersifat padat karya, dan pelatihan kewirausahaan dengan indikator penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC (gambar.49).

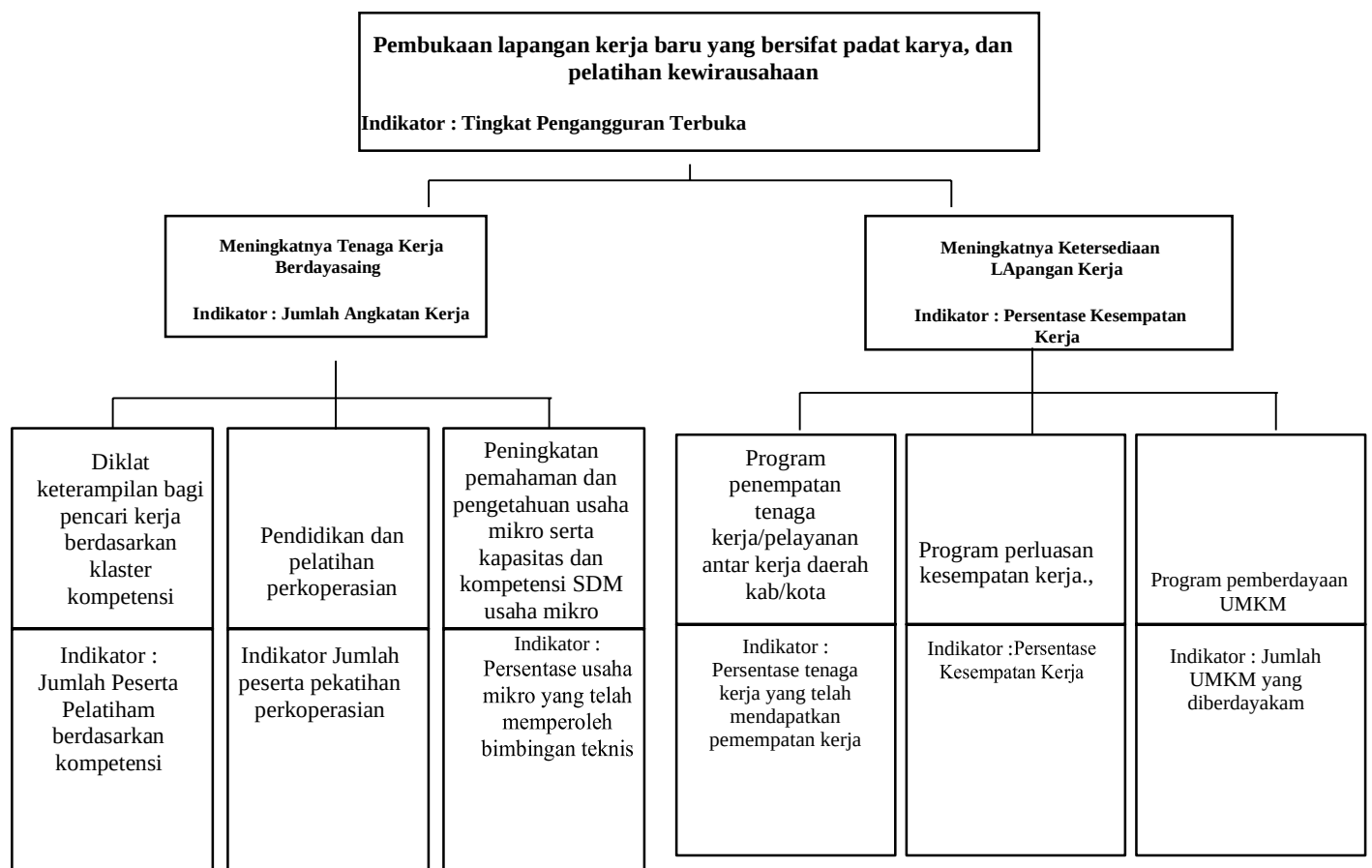
Agar tujuan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal yaitu:

1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja, melalui:
 - Diklat keterampilan pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi;
 - Pendidikan dan pelatihan perkoperasian; Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro.
2. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, melalui:
 - Program penempatan tenaga kerja/pelayanan antar kerja daerah kab/kota
 - Program perluasan kesempatan kerja
 - Program pemberdayaan UMKM

Pada sektor ketenagakerjaan, yang masih menjadi permasalahan di Kota Palopo yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Tujuan tersebut akan tercapai dengan meningkatkan daya saing dan memperluas kesempatan kerja sebagai sasaran antara yang harus diraih. Untuk melihat keterkaitan sasaran antara tersebut dengan tujuan utamanya dapat dilihat berdasarkan gambar sebagai berikut,



Gambar 49 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan



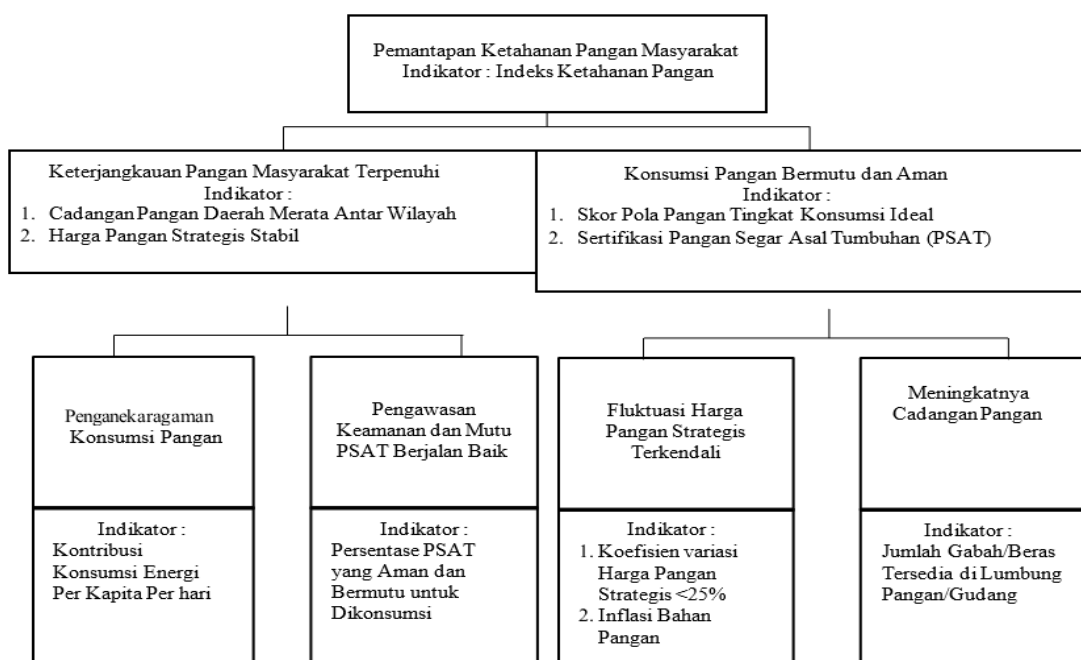
Gambar 50 Teori Perubahan/ToC Bidang Ketenagakerjaan

Perkembangan tenaga kerja formal berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), dimana ketika terjadi kenaikan Angkatan kerja ternyata tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan, begitu juga dengan tingkat partisipasi Angkatan kerja dan jumlah penempatan tenaga kerja juga jumlah perusahaan yang menunjukkan tren kenaikan seiring

dengan penurunan TPT. Hal sebaliknya terjadi pada indikator persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dimana penurunan capaian indikator tersebut ternyata diikuti dengan kenaikan penurunan TPT. Ini menunjukkan bahwa penurunan persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tidak mempengaruhi penurunan TPT. Namun penurunan capaian persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi ini merupakan salah satu penyebab lambannya penurunan capaian TPT. Salah satu penyebab utama peningkatan TPT adalah semakin berkurangnya kesempatan kerja. Walaupun persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan. Jika capaian indikator kesempatan kerja menurun maka hal ini akan mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran terbuka. Sehingga kondisi ekonomi yang stabil dengan tersedianya kesempatan kerja yang luas akan mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka.

4.1.1.4 Urusan Ketahanan Pangan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya yaitu capaian indeks ketahanan pangan yang masih kurang optimal peningkatannya dan penurunan capaian rumah tangga penerima manfaat program Raskin/BPNT walaupun perkembangan harga beras dan bahan pokok lainnya masih stabil. Sehingga tujuan yang akan dicapai oleh Kota Palopo di bidang ketahanan pangan yaitu Pemantapan Ketahanan Pangan Masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC (gambar.51).

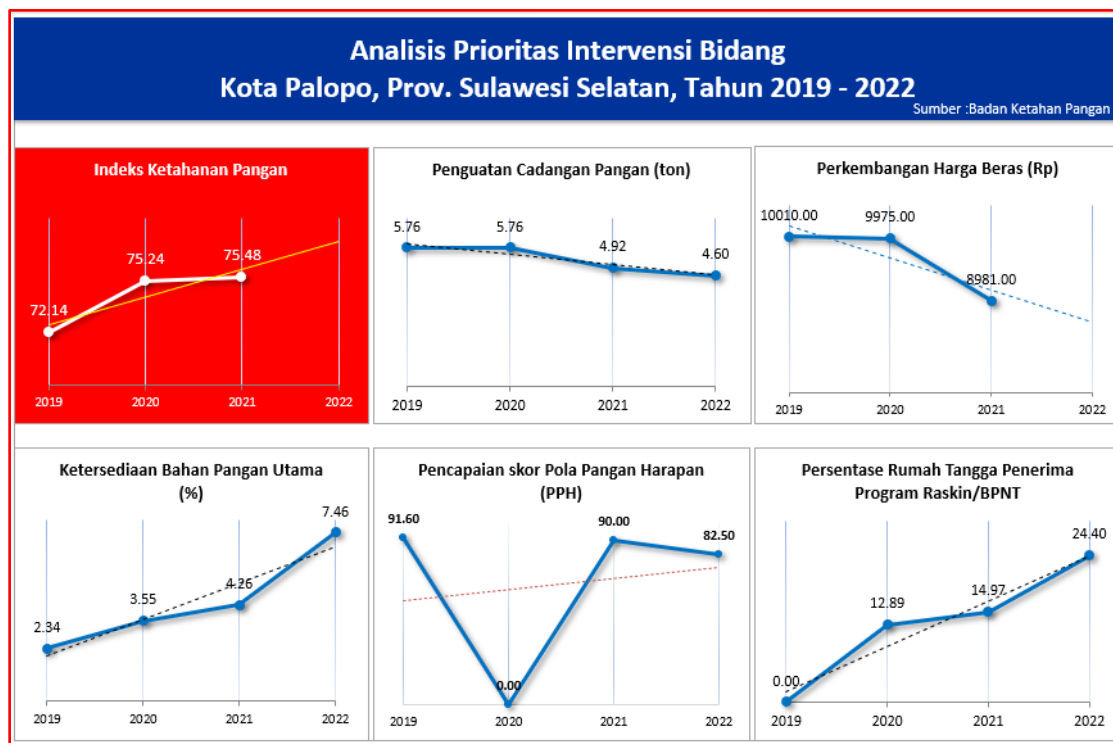


Gambar 51 Teori Perubahan/ToC Bidang Ketahanan Pangan

Agar tujuan Pemantapan Ketahanan Pangan dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal yaitu:

1. Terpenuhiya Keterjangkauan Pangan Masyarakat, melalui:
 - Fluktuasi harga pangan strategis yang terkendali
 - Peningkatan cadangan pangan
2. Konsumsi Pangan Bermutu dan Aman, melalui:
 - Penganekaragaman konsumsi pangan
 - Pengawasan keamanan dan mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang berjalan baik

Akses rumah tangga terhadap pangan secara umum dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, institusi, jaringan distribusi dan kapasitas produksi antar wilayah dan musim, yang berdampak pada pasokan dan stabilitas harga. Dari semua indikator tersebut bisa tergambarkan dari indeks ketahanan pangan (IKP) yang dijadikan sebagai tujuan utama yang ingin diraih dibidang ketahanan pangan. Sementara sasaran antara yang ingin dicapai yaitu keterjangkauan pangan yang bisa terpenuhi dan konsumsi pangan yang aman dan bermutu. Adapun gambaran keterkaitan indikator sasaran antara dan tujuan utama bisa tergambar dari perbandingan pola perkembangannya (gambar.52).



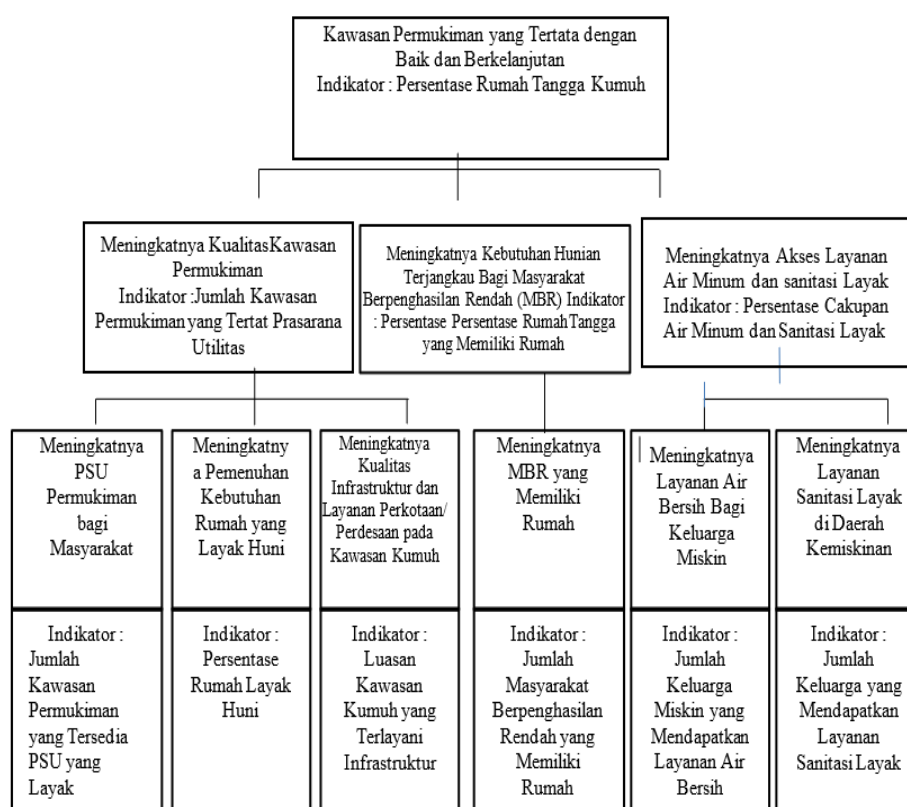
Gambar 52 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Pangan

Adanya peningkatan capaian Indeks Ketahanan Pangan berkaitan dengan peningkatan

capaian indikator persentase rumah tangga yang menerima program Raskin/BPNT, ketersediaan bahan pangan utama dan pencapaian skor pola pangan harapan (PPH). Sementara itu, pola keterkaitan juga terlihat antara perkembangan harga beras dengan indeks ketahanan pangan, dimana penurunan harga beras berkaitan dengan kenaikan indeks ketahanan pangan. Terkhusus untuk indikator penguatan cadangan pangan yang capaiannya menunjukkan tren penurunan menunjukkan hubungan keterkaitan yang tidak langsung berpengaruh pada capaian indikator indeks ketahanan pangan. Idealnya semakin meningkat capaian indikator penguatan cadangan pangan maka akan semakin bagus capaian indeks ketahanan pangan. Penurunan capaian indikator penguatan cadangan pangan hanya mengakibatkan pelambatan peningkatan capaian indeks ketahanan pangan.

4.1.1.5 Urusan Infrastruktur Dasar (Perumahan dan Pekerjaan Umum)

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya yaitu masih belum maksimalnya capaian proporsi rumah tangga dengan akses listrik dan capaian proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak juga capaian indikator proporsi rumah tangga dengan air minum layak, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kota Palopo di bidang infrastruktur dasar adalah Kawasan Permukiman yang Tertata dengan Baik dan Berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam *ToC* (gambar.53).

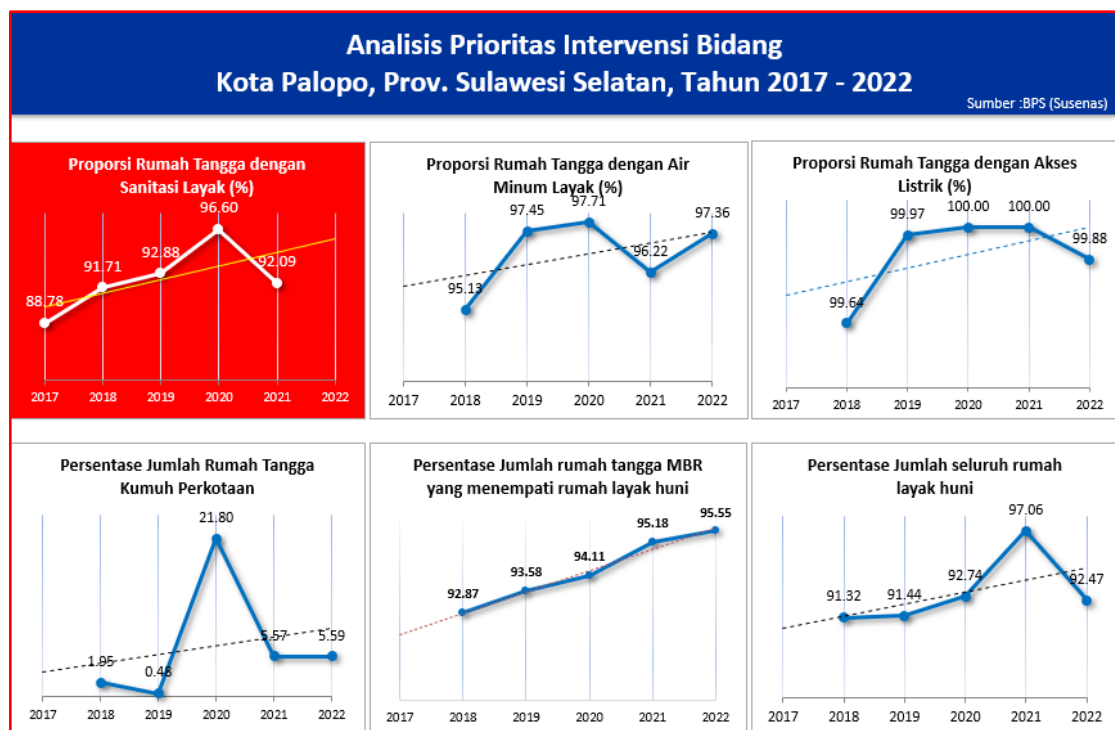


Gambar 53 Teori Perubahan/ToC Bidang Infrastruktur Dasar (Perumahan)

Agar tujuan meningkatkan kawasan permukiman yang berkelanjutan dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam *ToC* ini ada 3 hal yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, melalui:
Meningkatnya PSU permukiman bagi masyarakat
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan perkotaan/pedesaan pada kawasan kumuh.
2. Meningkatnya kebutuhan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui peningkatan masyarakat MBR yang memiliki rumah
3. Meningkatnya akses layanan air minum dan sanitasi yang layak, melalui:
Meningkatnya layanan air bersih bagi keluarga miskin
Meningkatnya layanan sanitasi layak di daerah kemiskinan

Pada sektor infrastruktur, permasalahan yang perlu diintervensi di Kota Palopo yaitu akses sanitasi dan air minum yang layak, serta kepemilikan rumah sebagai sasaran antara, sementara tujuan utamanya menurunnya rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni (gambar.54).



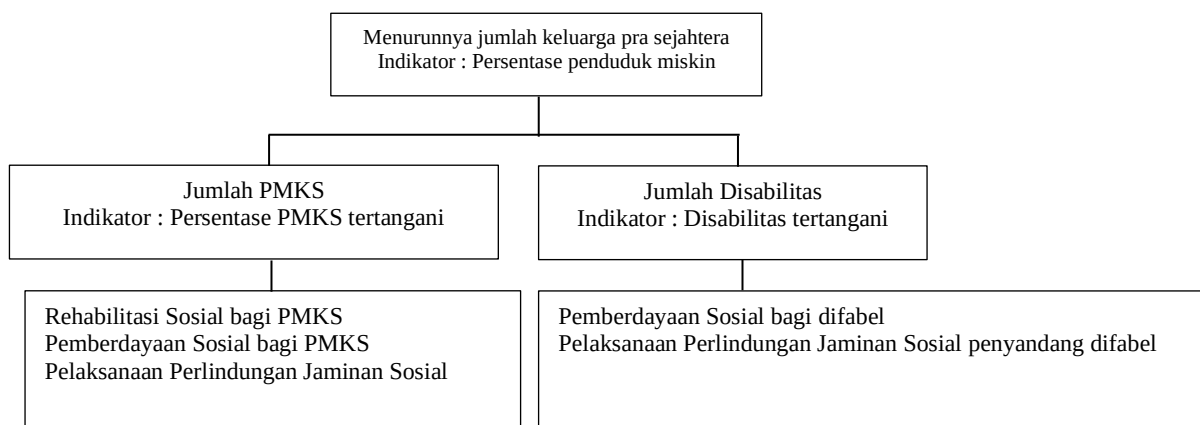
Gambar 54. Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar (Perumahan dan Pekerjaan Umum)

Hampir semua indikator sasaran antara berkaitan erat dengan tujuan utama, yaitu meningkatnya capaian rumah layak huni atau menurunnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah kumuh. Peningkatan capaian Indikator Proporsi Rumah tangga dengan sanitasi layak sangat

erat kaintannya dengan peningkatan capaian proporsi rumah tangga dengan air minum layak, proporsi rumah tangga dengan akses listrik, persentase jumlah rumah tangga kumuh perkotaan, persentase jumlah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang menempati rumah layak huni dan dan persentase jumlah seluruh rumah layak huni.

4.1.1.6 Urusan Sosial

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya yaitu meningkatnya jumlah penduduk miskin ekstrim di Kota Palopo walaupun capaian persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tujuan yang akan dicapai oleh Kota Palopo di bidang sosial adalah menurunnya jumlah keluarga miskin pra sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam *ToC*

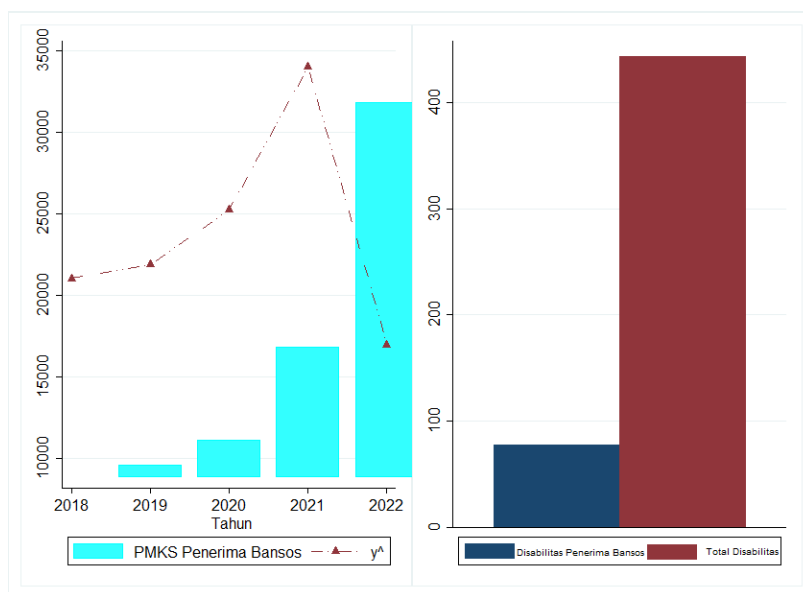


Gambar 55. Teori Perubahan/*ToC* Bidang Sosial

Agar tujuan jumlah keluarga pra sejahtera dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam *ToC* ini ada 2 hal yaitu:

1. Jumlah PMKS yang tertangani, melalui:
 - Program rehabilitasi sosial.
 - Melakukan pemberdayaan social bagi PMKS
 - Melaksanakan program perlindungan jaminan sosial.
2. Jumlah disabilitas yang tertangani, melalui :
 - Pemberdayaan sosial bagi difabel dan fasilitasi program perlindungan jaminan sosial

Pada sektor sosial, permasalahan yang perlu diintervensi di Kota Palopo yaitu pelaksanaan program perlindungan social yang berbasis data DTKS maupun data P3KE yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sehingga tujuan utamanya menurunnya jumlah keluarga miskin / pra sejahtera dapat tercapai.

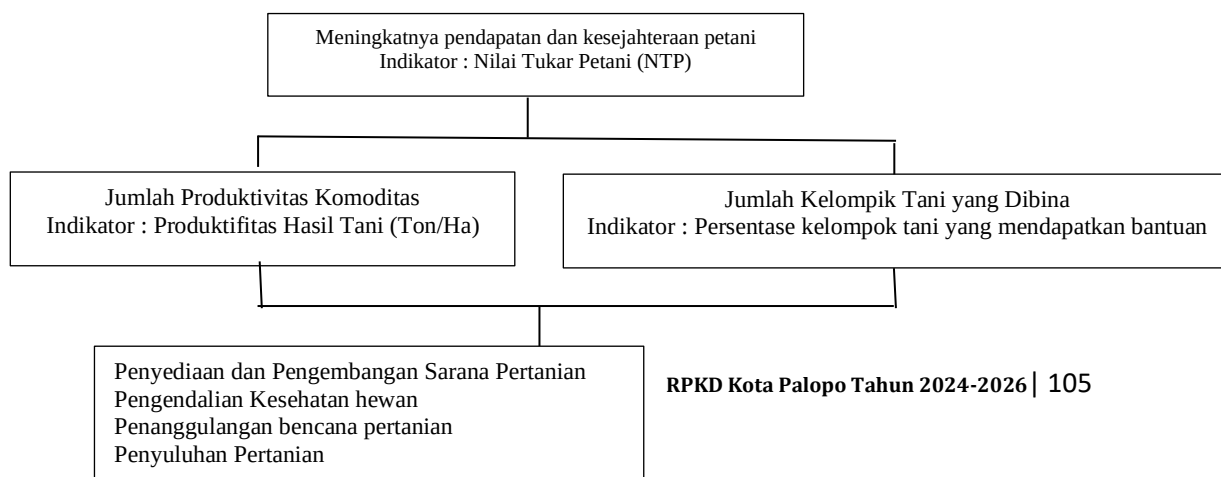


Gambar 56. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Urusan Sosial

Berdasarkan hasil analisis prioritas intervensi bidang urusan sosial indikator persentase PMKS tertangani dan persentase disabilitas tertangani (Hasil ToC gambar.55), persentase PMKS yang tertangani setiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi disini lain jumlah disabilitas yang tertangani dengan bansos jumlah masih sedikit dibandingkan dengan total keseluruhan disabilitas di Kota Palopo. Kondisi ini berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah miskin ekstrim dari tahun sebelumnya, walaupun angka kemiskinan menurun. Prioritas intervensi urusan social diprioritaskan bagi difabel sebagai sasaran penanganan melalui program pemberdayaan social bagi difabel dan fasilitasi perlindungan jaminan sosial.

4.1.1.7 Urusan Pertanian Perkebunan dan Peternakan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab II hasil capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya yaitu meningkatkan pendapatan yang diterima oleh petani, peternak, dan pekebun. Tujuan yang akan dicapai oleh Kota Palopo di bidang pertanian adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam *ToC*.

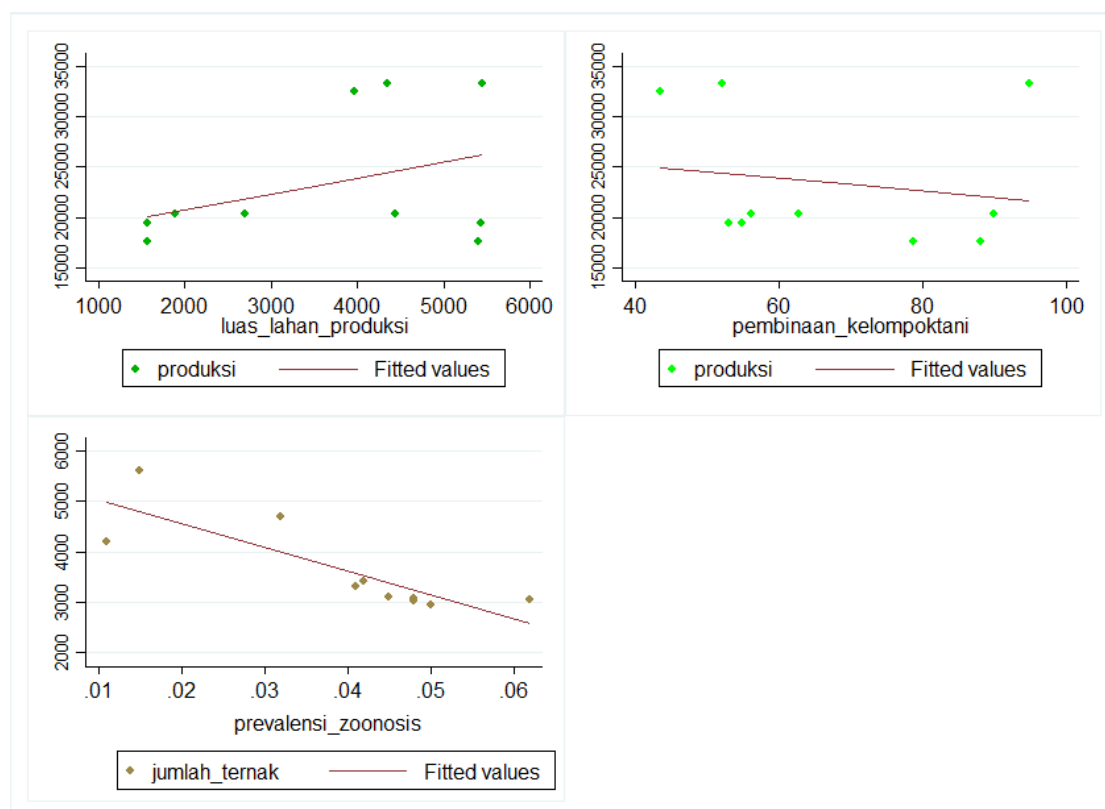


Gambar 57. Teori Perubahan/ToC Bidang Pertanian Peternakan dan Perkebunan

Agar tujuan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam *ToC* ini ada 2 hal yaitu:

1. Jumlah produktifitas komoditas, melalui:
Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
Pengendalian Kesehatan hewan
Penanggulangan bencana pertanian.
Penyuluhan pertanian.
2. Jumlah kelompok tani yang dibina

Pada sektor pertanian peternakan dan perkebunan, permasalahan yang perlu diintervensi di Kota Palopo yaitu melaksanakan pendampingan dan fasilitasi pemberian bantuan bagi kelompok petani, agar tujuan utamanya meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani yang diukur melalui NTP.



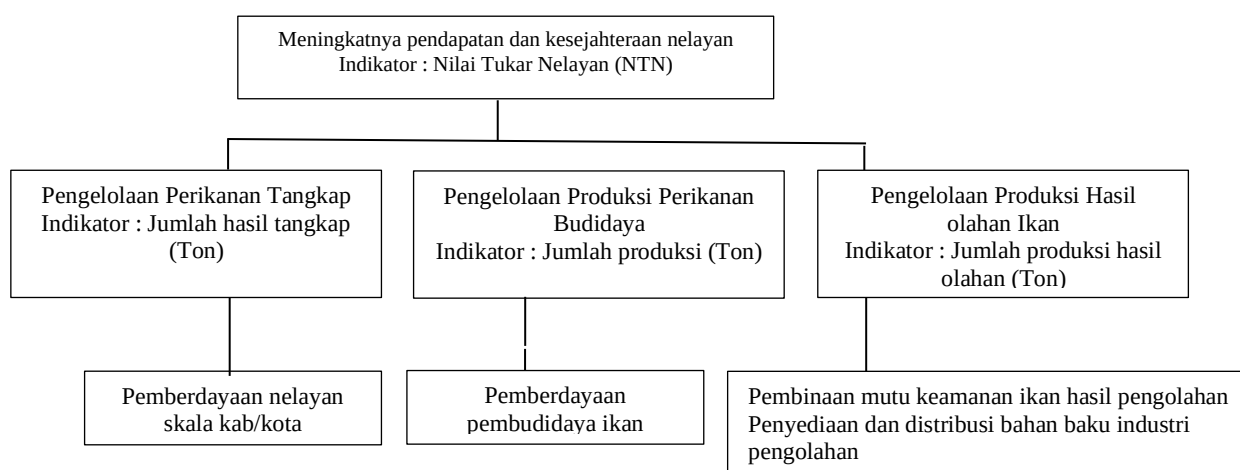
Gambar 58. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Urusan Pertanian dan Peternakan

Berdasarkan hasil analisis prioritas intervensi bidang urusan pertanian, menunjukkan bahwa produksi hasil pertanian mengalami penurunan karena jumlah lahan pertanian di Kota Palopo mengalami penurunan, ditambah persentase pembinaan yang dilakukan kepada kelompok tani mengalami stagnasi (gambar.58). Sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menyiasati keterbatasan lahan prioritas yang diambil adalah melakukan pembinaan

kepada kelompok tani melalui penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Kemudian dari bidang peternakan jumlah ternak di Kota Palopo pernah mengalami puncak tertinggi pada tahun 2016-2019, tetapi terjadi penurunan signifikan yang diakibatkan adanya pandemi virus PMK (penyakit mulut dan kuku). Prioritas yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan peternak adalah pengendalian Kesehatan hewan ternak.

4.1.1.8 Urusan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab III hasil capaian pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan yaitu meningkatkan pendapatan yang diterima oleh nelayan. Tujuan yang akan dicapai oleh Kota Palopo di bidang kelautan dan perikanan adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam *ToC*.

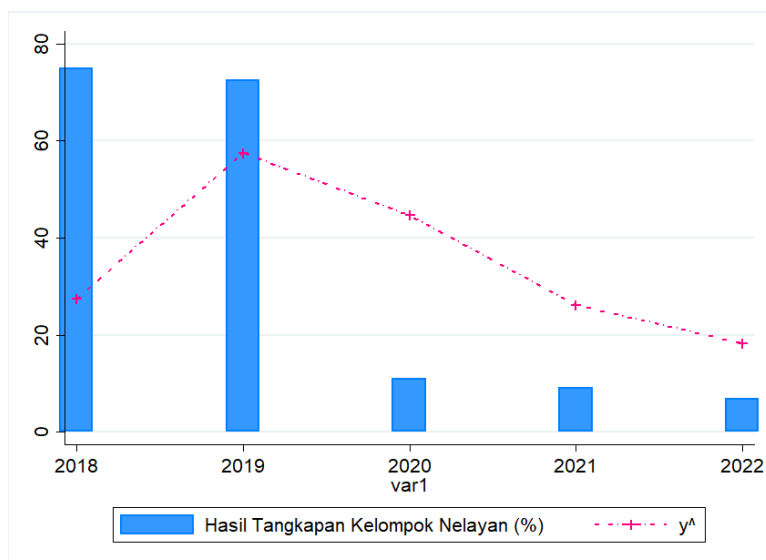


Gambar 59. Teori Perubahan/*ToC* Bidang Kelautan dan Perikanan

Agar tujuan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam *ToC* ini ada 3 hal yaitu:

1. Pengelolaan perikanan tangkap, melalui pemberdayaan nelayan skala kab/kota.
2. Pengelolaan produksi perikanan budidaya melalui pemberdayaan pembudidaya ikan.
3. Pengelolaan produksi hasil olahan ikan, melalui :
 - Pembinaan mutu keamanan hasil olahan ikan
 - Penyediaan dan distribusi bahan baku industri pengolahan.

Pada sektor kelautan dan perikanan, permasalahan yang perlu diintervensi di Kota Palopo yaitu melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan bagi kelompok nelayan, agar tujuan utamanya meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang diukur melalui NTN.



Gambar 60. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Urusan Perikanan

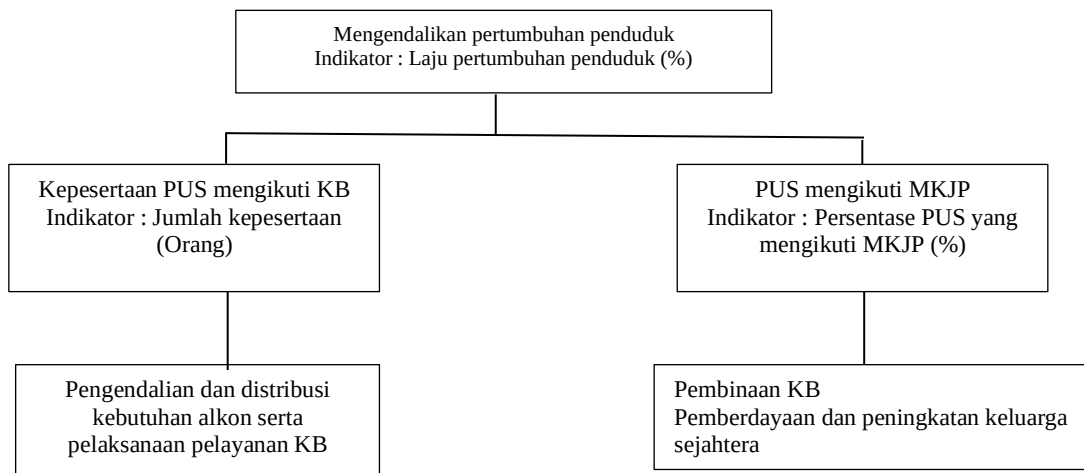
Berdasarkan hasil analisis prioritas intervensi bidang perikanan dan kelautan menunjukkan bahwa persentase hasil tangkapan kelompok nelayan dipengaruhi oleh cakupan kelompok nelayan yang dibina. Selama tahun 2018-2022 cakupan kelompok nelayan yang dibina mengalami trend penurunan (garis putus-putus gambar.60), sehingga berpengaruh terhadap menurunnya hasil tangkapan nelayan. Kota Palopo merupakan kota pesisir yang berada di teluk bone maka prioritas intervensi yang dilakukan adalah pemberdayaan nelayan skala kota.

4.1.1.9 Urusan Kependudukan dan Pengendalian Penduduk

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab III hasil capaian pelaksanaan urusan pengendalian penduduk yaitu mengendalikan pertumbuhan penduduk. Tujuan yang akan dicapai oleh Kota Palopo di bidang pengendalian penduduk adalah menekan laju pertumbuhan penduduk melalui kepesertaan PUS (pasangan usia subur) mengikuti MKJP (metode kontrasepsi jangka Panjang). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC (gambar.61).

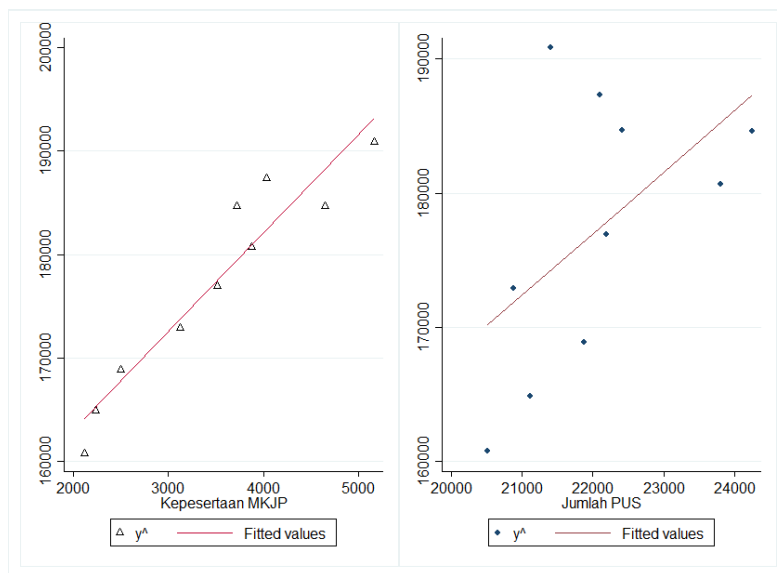
Agar tujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal yaitu:

1. Kepesertaan PUS mengikuti KB, melalui pengendalian dan distribusi kebutuhan alat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB.
2. Kepesertaan PUS mengikuti MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang), melalui :
Pembinaan KB.
Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).



Gambar 61. Teori Perubahan/ToC Bidang Pengendalian Penduduk

Pada sektor pengendalian penduduk, permasalahan yang perlu diintervensi di Kota Palopo yaitu melaksanakan ketersediaan alat kontrasepsi dan pemberdayaan keluarga PUS melalui UPPKA, agar tujuan utamanya mengendalikan pertumbuhan penduduk.

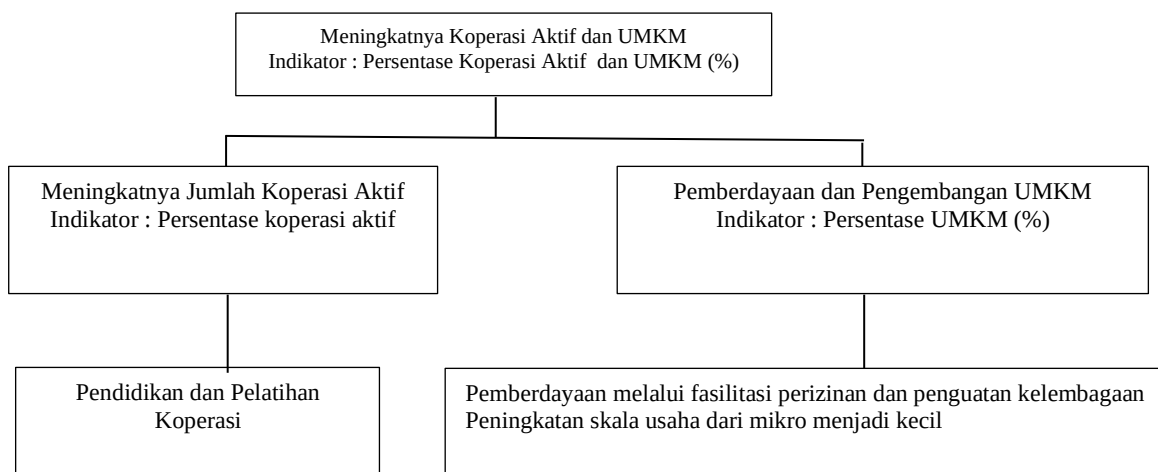


Gambar 62. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Urusan Pengendalian Penduduk

Berdasarkan hasil analisis prioritas intervensi bidang pengendalian penduduk menunjukkan bahwa efektifitas penggunaan MKJP belum maksimal dalam mengendalikan jumlah penduduk termasuk meningkatnya jumlah PUS di Kota Palopo berpengaruh dalam mempercepat kenaikan jumlah penduduk. Intervensi prioritas yang paling signifikan untuk mengendalikan jumlah penduduk adalah mendorong PUS untuk mengikuti program KB, melalui upaya pendistribusian alkon dan pelayanan KB di fasilitas Kesehatan setempat.

4.1.1.10 Urusan Koperasi

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab III hasil capaian pelaksanaan urusan koperasi yaitu meningkatnya kepesertaan masyarakat dalam keanggotaan koperasi dan pemberdayaan UMKM. Tujuan yang akan dicapai oleh Kota Palopo di bidang koperasi adalah meningkatnya koperasi aktif dan UMKM . Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam *ToC*.

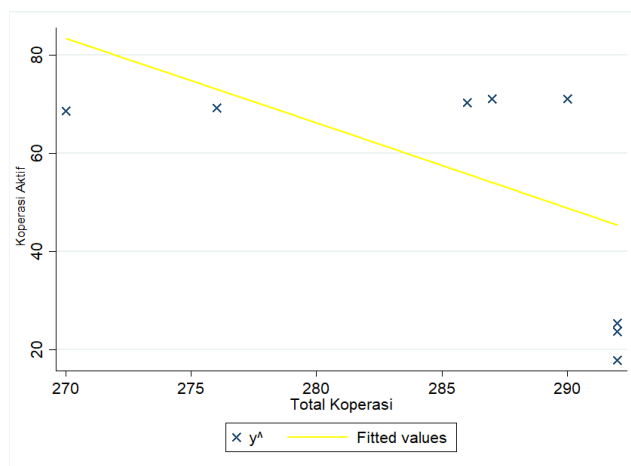


Gambar 63. Teori Perubahan / TOC Bidang Koperasi

Agar tujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam *ToC* ini ada 2 hal yaitu:

1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif, melalui Pendidikan dan pelatihan koperasi.
2. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM, melalui :
Pemberdayaan melalui fasilitasi perizinan dan penguatan kelembagaan.
Peningkatan skala usaha.

Pada sektor koperasi, permasalahan yang perlu diintervensi di Kota Palopo yaitu pendidikan pelatihan koperasi dan pemberdayaan pengembangan UMKM, agar tujuan utamanya meningkatnya jumlah koperasi aktif dan peningkatan skala usaha.

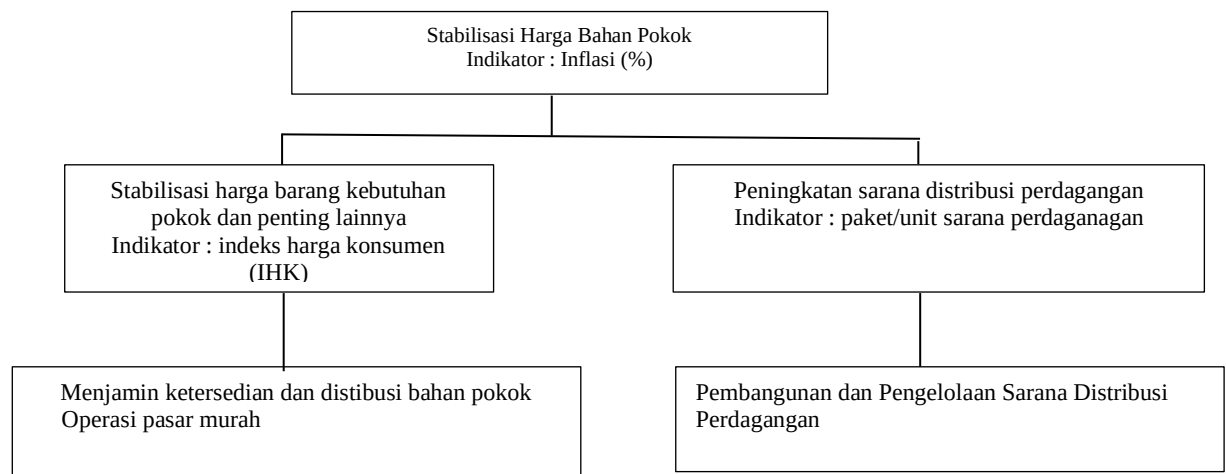


Gambar 64. Analisis Prioritas Intervensi Urusan Bidang Koperasi

Berdasarkan hasil analisis prioritas intervensi urusan bidang koperasi menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah koperasi yang ada di Kota Palopo berpengaruh terhadap meningkatnya koperasi yang non aktif. Hal ini membuktikan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi masyarakat belum berhasil. Intervensi prioritas yang perlu dilaksanakan adalah diklat bagi masyarakat maupun penguatan kelembagaan terhadap koperasi agar koperasi menjadi sehat dan terlaksana RAT setiap tahunnya.

4.1.1.11 Urusan Perdagangan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab III hasil capaian pelaksanaan urusan perdagangan yaitu mengendalikan harga bahan pokok. Tujuan yang akan dicapai oleh Kota Palopo di bidang perdagangan adalah stabilisasi harga bahan pokok. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam *ToC*.

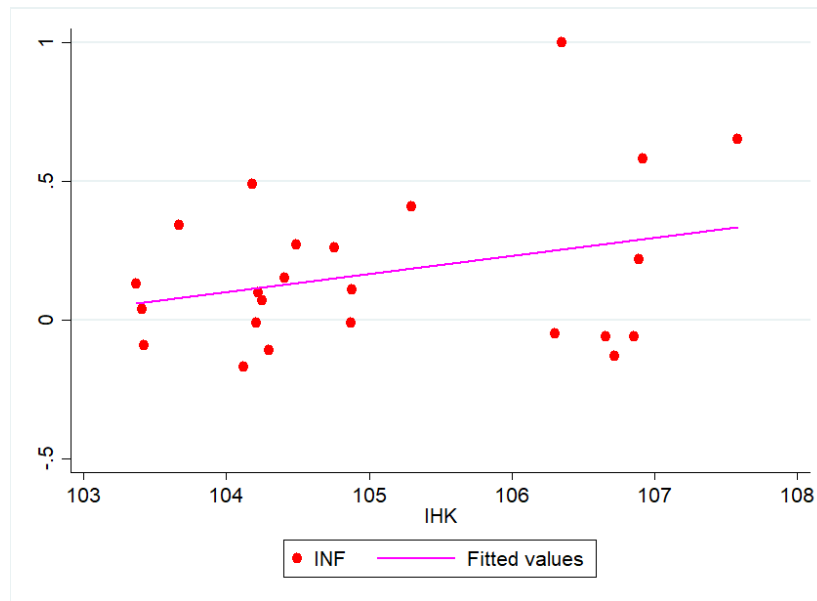


Gambar 65. Teori Perubahan / TOC Bidang Perdagangan

Agar tujuan mengendalikan harga barang kebutuhan pokok dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam *ToC* ini ada 2 hal yaitu:

1. Stabilisasi harga bahan pokok, melalui menjamin ketersediaan dan distribusi barang, dan operasi pasar.
2. Peningkatan sarana distribusi perdagangan, melalui pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Pada sektor perdagangan, permasalahan yang perlu diintervensi di Kota Palopo yaitu pengendalian harga bahan pokok.



Gambar 66. Analisis Prioritas Intervensi Urusan Bidang Perdagangan

Berdasarkan hasil analisis prioritas intervensi urusan bidang perdagangan menunjukkan bahwa stabilitas harga bahan pokok dipengaruhi oleh indeks harga konsumen. Intervensi prioritas pengendalian stabilitas harga di tingkat konsumen, dapat dilakukan melalui penjaminan ketersediaan bahan pokok dan kelancaran rantai distribusi. Kemudian secara insidental dapat dilakukan operasi pasar untuk perlakuan jangka pendek menekan kenaikan harga bahan pokok.

4.1.2 Program Kegiatan Perangkat Daerah

Logika program yang akan digunakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo merujuk pada hasil analisis makro pada bab 3.3.1 dan urutan prioritas variable social ekonomi didasarkan dari hasil analisi mikro bab 3.3.2 yang menggunakan data mikro bersumber dari BNBA P3KE Kemenko PMK, 2022. Berdasarkan hasil estimasi analisis makro menunjukkan bahwa variable yang berpengaruh dalam meningkatkan angka kemiskinan adalah pengeluaran konsumsi per kapita dan angka pengangguran. Kemudian dari variable social ekonomi hasil analisis mikro diprioritaskan untuk individu yang berpeluang tinggi masuk dalam kategori miskin ekstrim yaitu : Angkatan kerja yang berusia muda berstatus belum menikah, jenis kelamin perempuan, pendidikan tidak pernah sekolah, status pekerjaan yang belum bekerja dan belum pernah mendapat bantuan sama sekali.

Tabel 64. Solusi Permasalahan Permasalahan Kemiskinan Melalui Logika Program Kegiatan Perangkat Daerah Pengampu

Urusan	Permasalahan	Solusi	*Program/Kegiatan dan sub-kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
Pendidikan	Masih tingginya angka putus sekolah di tingkat SD (170 murid) dan SMP (153 murid).	Penyelenggaraan biaya personil dan kelengkapan sekolah peserta didik	Program pengelolaan Pendidikan/Pendidikan Dasar dan Menengah. Sub-Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan
Kesehatan	Masih adanya angka kematian ibu pasca melahirkan (8 ibu) dan kematian bayi (15 bayi).	Penyediaan dan pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu pasca melahirkan dan bayi.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Sub-Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota Sub penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kab/kota.	Dinas Kesehatan
Perumahan Permukiman	Luasan permukiman kumuh yang tertangani masih terbatas baru 10%, disisi lain jumlah permukiman kumuh mengalami peningkatan menjadi 303,40 Ha	Diperlukan kerjasama lintas sectoral dengan perangkat daerah lain tidak hanya bangunan fisik saja, melainkan juga pola kebiasaan hidup sehat dan bersih penghuninya.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, sub-pelaksanaan sehat dalam rangka promotive preventif tingkat daerah kab/kota. Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan SPAM, sub-perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan. Program pengelolan dan pengembangan system air limbah, sub-pembangunan/penyediaan sub system pengolahan setempat. Program Kawasan permukiman peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas <10 Ha, sub-perbaikan RTLH	Dnas Perumahan dan Permukiman; Dinas PUPR, dan Dinas Kesehatan.
Sosial	Meningkatnya jumlah penduduk miskin ekstrim di Kota Palopo	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin ekstrim dan	Program Pemberdayaan Sosial/pengembangan potensi sumber kesejahteraan social daerah, sub-peningkatan kemampuan potensi sumber	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi UKM

Urusan	Permasalahan	Solusi	*Program/Kegiatan dan sub-kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		pemberdayaan social ekonomi agar tercipta kemandirian	kesejahteraan social keluarga kewenangan kab/kota. Program perlindungan dan jaminan social/pengelolaan data faikir miskin cakupan daerah, sub-pengeloan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota; fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja/Pelaksanaan pelatihan berdasar unit kompetensi, sub-proses diklat keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi; Program penempatan tenaga kerja/pelayanan antar kerja daerah kab/kota, sub-perluasan kesempatan kerja. Program Pendidikan dan pelatihan perkeroperasian/Pendidikan dan pelatihan SDM usaha mikro dalam satu daerah, sub-peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro; Program pemberdayaan UMKM/Pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	
Kewilayahan (Kecamatan & Kelurahan)	Hasil indeks kepuasan masyarkat selama tahun 2018-2022 stagnan, tidak ada peningkatan signifikan.	Diperlukan program yang menyentuh langsung masyarakat melalui program pemberdayaan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan/Kegiatan pemberdayaan kelurahan, Sub-Pemberdayaan masyarakat di kelurahan; Sub-Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Unsur Kewilayahan 9 Kecamatan, dan 48 Kelurahan.

Urusan	Permasalahan	Solusi	*Program/Kegiatan dan sub-kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
		yang melibatkan LPMK, PKK, dan organisasi masyarakat.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
Ketenagakerjaan	Tingkat pengangguran yang masih tinggi 8,20%	Pembukaan lapangan kerja baru yang bersifat padat karya, dan pelatihan kewirausahaan	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja/Pelaksanaan pelatihan berdasar unit kompetensi, sub-proses diklat keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi; Program penempatan tenaga kerja/pelayanan antar kerja daerah kab/kota, sub-perluasan kesempatan kerja. Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian/Pendidikan dan pelatihan SDM usaha mikro dalam satu daerah, sub-peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro; Program pemberdayaan UMKM/Pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi UKM
Ketahanan Pangan	Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan peningkatan jumlah cadangan pangan daerah	Pemanfaatan lahan pekarangan rumah sebagai lahan budidaya tanaman pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan/ Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat/ Pelaksanaan Pencapaian Target	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan.

Urusan	Permasalahan	Solusi	*Program/Kegiatan dan sub-kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
			Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, Sub- emberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Program penyuluhan pertanian/ Pelaksanaan penyuluhan pertanian, Sub- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, Sub- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota; Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian/ Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam kab/kota, Sub- Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain	
Pertanian perkebunan peternakan	Masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Pengembangan kapasitas pengetahuan petani dan pemasaran pasca panen	Program penyuluhan pertanian/ Pelaksanaan penyuluhan pertanian, Sub- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, Sub- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota; Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kab/kota, Sub-Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Sub-	Dinas Pertanian perkebunan peternakan; Dinas Perdagangan

Urusan	Permasalahan	Solusi	*Program/Kegiatan dan sub-kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Sub-Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan; Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri/Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Sub- peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	
Kelautan Perikanan	Minimnya fasilitas alat penangkap ikan bagi nelayan dan rendahnya nilai tambah hasil perikanan tangkap	Memberikan bantuan sarana alat tangkap nelayan dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan menjadi produk olahan.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Sub- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, Sub- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil; Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan/ Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Sub- Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM.

Urusan	Permasalahan	Solusi	*Program/Kegiatan dan sub-kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
			dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri/Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Sub-peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan; Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian/Pendidikan dan pelatihan SDM usaha mikro dalam satu daerah, sub-peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro; Program pemberdayaan UMKM/Pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	
Kependudukan	Rendahnya PUS (pasangan usia subur) yang mengikuti program KB aktif.	Mengkampanyekan program KB, dan penggunaan MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) bagi PUS	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)/ Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Sub- Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang; Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, Sub- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Urusan	Permasalahan	Solusi	*Program/Kegiatan dan sub-kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
Perdagangan	Kesulitan dalam pemasaran hasil produksi lokal	Perluasan akses pasar baik secara <i>off-line</i> maupun <i>online</i>	Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri/Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Sub-peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan; Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian/Pendidikan dan pelatihan SDM usaha mikro dalam satu daerah, sub-peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro; Program pemberdayaan UMKM/Pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja/Pelaksanaan pelatihan berdasar unit kompetensi, sub-proses diklat keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja
Koperasi	Menurunnya jumlah koperasi aktif, Pemahaman masyarakat akan manfaat menjadi anggota koperasi relatif rendah	Pengawasan kelembagaan dan kinerja koperasi, Peningkatan kegiatan pendidikan perkoperasian bagi masyarakat	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi/ Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Sub- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota; Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi/ Penilaian	Dinas Koperasi UKM

Urusan	Permasalahan	Solusi	*Program/Kegiatan dan sub-kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu
			Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub-Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
Pekerjaan Umum	Perluasan rumah tangga berakses air minum yang stagnan, tetapi disisi lain jumlah rumah tangga semakin meningkat	Peningkatan kapasitas dan pembukaan jaringan SPAM (Sistem penyediaan air minum)	Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan SPAM, sub-perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan; Sub- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan; Sub- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR

4.3 ANALISIS ANGGARAN

Analisis anggaran dalam penyusunan RPKD 2024-2026 disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di dalam peraturan tersebut terdapat gambaran umum pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya terdapat berbagai sumber informasi yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan analisa anggaran dokumen ini. Indikator yang digunakan dalam melakukan analisis anggaran meliputi kinerja keuangan masa lalu (5 Tahun terakhir) dan kerangka pendanaan.

4.3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja Keuangan Masa Lalu berisi analisis terhadap capaian atas pengelolaan keuangan daerah dari Tahun 2018-2022. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah terdiri dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih berfokus kepada Kinerja yang terukur dari setiap aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran pelayanan publik.

Kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan peran dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah yang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palopo sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023. Analisis kinerja pelaksanaan APBD, selama tahun 2018-2022 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

4.3.1.1 Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen pendapatan daerah Kota Palopo terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dengan ditetapkannya peraturan ini mengubah struktur pendapatan daerah khususnya realisasi Tahun 2021 dan 2022.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat, transfer antar-daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan transfer antar-daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis realisasi pendapatan daerah Kota Palopo menggunakan data dari tahun 2018-2022 dimana untuk tahun 2022 masih menggunakan data LKPD Kota Palopo Unaudited pertanggal 13 Januari 2023. Dari data tersebut menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata realisasi pendapatan daerah pertahun mencapai 97,44 persen. Fluktuatifnya pertumbuhan pendapatan ini merupakan dampak dari penyebaran COVID-19 yang mengakibatkan pada tahun 2020 dan 2021 pendapatan transfer dan PAD yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 sudah menunjukkan trend positif. Secara persentase realisasi pendapatan daerah dalam kurun waktu 2018-2022 telah mencapai lebih dari 90 persen. Berikut disajikan table.65 yang berisi target dan realisasi pendapatan daerah serta tingkat perkembangan pertumbuhan anggaran dan realisasi dari tahun 2018-2022,

Tabel 65 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2018-2022

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2018	1.001.107.733.585	964.783.951.705,73	96,37	3,72	3,28
2019	1.005.856.128.898	984.500.257.290,51	97,88	0,47	2,04
2020	969.562.250.067	969.408.934.593,27	99,98	-3,61	-1,53
2021	957.596.278.224	936.589.797.578,17	97,81	-1,23	-3,39
2022	1.035.363.603.924	985.211.887.731,29	95,16	0,08	0,05
Rata-Rata			97,44	-0,11	0,09

Sumber: LKPD 2018-2021 dan LKPD 2022 *unaudited*

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah tahun 2018-2022 didominasi oleh sumber dana perimbangan/ pendapatan transfer dengan porsi rata-rata 76,61 persen, disusul oleh pendapatan asli daerah sebesar 16,53 persen dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar 6,85 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam menyusun arah kebijakan karena besarnya kontribusi dari Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kota Palopo masih cukup tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Pusat sehingga kemandirian dalam menentukan alokasi belanja akan terikat dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Berikut disajikan dalam table.66 terkait kontribusi masing-masing komponen dalam pendapatan daerah Kota Palopo tahun 2018-2022.

Tabel 66. Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah 2018-2022

Uraian	Kontribusi terhadap pendapatan (%)					Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pendapatan Asli Daerah	14,44	16,83	18,28	14,96	18,14	16,53
Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer	77,44	73,83	68,66	82,31	80,83	76,61
Lain-lain pendapatan yang sah	8,13	9,34	13,06	2,73	1	6,85

Sumber: LKPD 2018-2021 dan LKPD 2022 *unaudited*

Selanjutnya Tabel.67 menunjukkan pertumbuhan setiap jenis Pendapatan Daerah, adanya perubahan nomenklatur APBD pada tahun 2020 yang di implementasikan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022 berdampak pada pergeseran Dana Bagi Hasil Provinsi dari Lain-Lain Pendapatan Daerah menjadi Pendapatan Transfer. Hal ini tentu akan mempengaruhi pertumbuhan jenis pendapatan tersebut, sehingga dalam melakukan proyeksi pendapatan akan dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. Selain DBH Provinsi yang mengalami perpindahan jenis, Pendapatan BOS dan Pendapatan JKN FKTP juga mengalami pergeseran.

Tabel 67. Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah 2018-2022

Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)							Rata-rata Pertumbuhan (%)
Permendagri 13 Tahun 2006	2018	2019	2020	Permendagri 77 Tahun 2020	2021	2022	
PENDAPATAN DAERAH	964.783.951.705,73	984.500.257.290,51	969.408.934.593,27	PENDAPATAN DAERAH	936.589.797.578,17	985.211.887.731,29	0,525
Pendapatan Asli Daerah	139.282.846.484,07	165.664.354.780,08	177.205.052.456,65	Pendapatan Asli Daerah	140.133.041.613,17	178.677.929.800,29	6,425
Pendapatan Pajak Daerah	31.505.802.321,00	34.860.944.165,02	34.031.809.461,00	Pajak Daerah	35.622.582.580,00	41.418.904.125,00	7,078
Pendapatan Retribusi Daerah	8.022.878.576,00	9.074.168.785,55	8.880.154.097,48	Retribusi Daerah	11.587.793.535,64	18.045.681.733,00	22,465
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	6.635.170.716,00	7.496.932.396,00	6.801.973.147,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.799.016.092,00	7.036.243.575,00	1,478
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	93.118.994.871,07	114.232.309.433,51	127.491.115.751,17	Lain-lain PAD yang Sah	85.123.649.405,53	112.177.100.367,29	4,765
Dana Perimbangan	747.082.593.924,00	726.842.067.622,00	665.583.965.763,00	PENDAPATAN TRANSFER	770.932.817.337,00	796.693.253.157,00	1,620
Dana Bagi Hasil Pajak	10.960.605.312,00	8.223.532.627,00	13.444.909.193,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	722.950.633.455,00	734.693.761.781,00	186,133
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	4.562.512.247,00	4.886.273.038,00	4.934.485.300,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.982.183.882,00	61.999.491.376,00	91,998
Dana Alokasi Umum	516.167.587.000,00	537.722.702.000,00	497.008.966.000,00				
Dana Alokasi Khusus	215.391.889.365,00	176.009.559.957,00	150.195.605.270,00				
Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	78.418.511.297,66	91.993.834.888,43	126.619.916.373,62	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.523.938.628,00	9.840.704.774,00	- 40,482
Pendapatan Hibah	19.445.810.000,00	20.449.560.150,00	65.516.179.506,00	Pendapatan Hibah	5.203.692.128,00	388.586.620,00	- 62,402

Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)							Rata-rata Pertumbuhan (%)
Permendagri 13 Tahun 2006	2018	2019	2020	Permendagri 77 Tahun 2020	2021	2022	
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.953.517.276,00	50.159.951.545,43	46.443.640.112,62	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.320.246.500,00	9.452.118.154,00	- 30,688
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10.250.000.000,00	13.007.644.000,00	6.983.797.000,00				
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.639.440.139,00	8.141.883.200,00	7.664.639.200,00				
Pendapatan Lain-Lain	129.743.882,66	234.795.993,00	11.660.555,00				

Sumber : DPPKAD Kota Palopo, 2022

4.3.1.2 Belanja Daerah

Analisis belanja daerah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Kota Palopo pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan belanja daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas pemerintah daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Palopo, aspek belanja dititikberatkan pada kebijakan belanja yang sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah yang tercermin pada APBD. Melalui belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi yang bermanfaat langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tabel.68 berikut menyajikan tingkat capaian dan pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2018- 2022.

Tabel 68. Alokasi dan Realisasi Belanja

Tahun	Alokasi Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2018	1.020.380.935.465	982.922.627.365,89	96,63	0,45	1,98
2019	1.008.057.603.046	956.451.857.030,95	94,88	-1,21	-2,69
2020	1.094.240.116.346	943.885.796.203,19	86,26	8,55	-1,31
2021	1.001.572.261.730	935.475.348.254,12	93,40	-8,47	-0,89
2022	1.007.426.946.659	1.011.287.069.740,38	93,86	7,57	8,10
Rata-Rata			92,25	1,38	1,04

Sumber: LKPD 2018-2021 dan LKPD 2022 *unaudited*

Selama tahun 2018-2021 realisasi belanja daerah Kota Palopo mengalami penurunan dari Rp. 982.922.627.366,- pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 935.475.348.254,12,- pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan. Fluktuatifnya realisasi belanja daerah tidak lepas dari target pendapatan pada tahun berkenaan dan kemajuan realisasi kegiatan fisik khususnya kegiatan multiyears yang menyerap banyak anggaran.

Rata-rata realisasi belanja daerah sebesar 92,95 persen, dimana realisasi terendah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 86,26 persen. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 dianggarkan pembangunan Pusat Kuliner dan Cinderamata yang bersumber dari Pinjaman Daerah, namun sampai tahun anggaran 2020 berakhir, pinjaman tersebut tidak dapat direalisasikan.

4.3.1.3 Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 69.Pembiayaan Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Realisasi Pembiayaan Daerah (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Penerimaan Pembiayaan daerah	37.844.544.937,74	51.517.849.148,34	70.649.876.279,26	48.531.641.540,10	45.004.717.734,91	4,43
Pengeluaran Pembiayaan daerah	14.563.020.129,24	45.516.373.129,24	49.341.373.129,24	4.641.373.129,24	2.941.373.129,24	32,96
Pembiayaan Netto	23.281.524.808,50	6.001.476.019,10	21.308.503.150,02	43.890.268.410,86	42.063.344.605,67	15,94

Sumber: LKPD 2018-2021 dan LKPD 2022 *unaudited*

Pembiayaan daerah dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah baik terjadi defisit atau surplus anggaran karena Kebijakan yang dibuat dalam penganggaran adalah kebijakan anggaran berimbang artinya SILPA harus bernilai Nol. Hal ini berarti semua SiLPA tahun sebelumnya direncanakan untuk digunakan menggerakkan pembangunan pada tahun berikutnya. SiLPA juga menunjukkan adanya upaya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Palopo pada tahun anggaran tersebut.

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagian besar bersumber dari SilPA tahun anggaran sebelumnya dan Pinjaman Jangka Pendek yang dilakukan oleh BLUD RSUD sawerigading dalam menutupi kekurangan Kas akibat keterlambatan pembayaran oleh BPJS Kesehatan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah digunakan untuk pembayaran Hutang Jangka Pendek BLUD RSUD Sawerigading dan Pembayaran cicilan pokok Hutang Jangka Panjang atas Pinjaman Pembangunan City Market Palopo.

4.3.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektifitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah dalam mengisi masa transisi Pemerintahan menunggu Kepala Daerah yang akan dipilih pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024.

4.3.2.1 Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2024-2026. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Tabel 70. Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kota Palopo Tahun 2023-2026

Indikator	*2022	**2023	**2024	**2025	** 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,83	5,69	5,98	6,05	6,62
Pendapatan per Kapita (Juta/Tahun)	51,18	44	58	62	65
Tingkat Pengangguran (%)	8,20	8,07	8,07	8	7,75
Inflasi (%)*)	5,13	2	2	2	2
Tingkat Kemiskinan (%)	7,78	5,99	7,58	7,38	7,06
Indeks Pembangunan Manusia	78,91	79,25	79,60	79,82	79,98

*Data rilis BPS 2023; ** Proyeksi dan Asumsi Indikator Makro

Asumsi makro ekonomi daerah Kota Palopo yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah untuk tiga tahun ke depan, yakni mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan PDRB per kapita. Keempat indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi daerah Kota Palopo ke depan diasumsikan dan ditargetkan bertumbuh secara konsisten melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini, tidak hanya diharapkan secara konsisten meningkat, tetapi juga diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkualitas tinggi sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun secara signifikan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

Selanjutnya, asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal juga diperkirakan menunjukkan tren positif (Tabel.68). Pertumbuhan PAD secara rata-rata diperkirakan akan bertumbuh 6,66 persen per tahun dengan kecenderungan yang meningkat. Sedangkan, Dana Perimbangan diperkirakan bertumbuh rata-rata 4,60 persen selama periode 2024-2026 dengan kecenderungan yang melambat. Perkiraan melambatnya pertumbuhan Dana Perimbangan bersumber dari pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperkirakan akan melambat karena kondisi penerimaan negara yang tidak mencapai target.

Tabel 71. Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kota Palopo Tahun 2024-2026

Indikator	2024	2025	2026
Pertumbuhan PAD	6.04	6.56	7.32
Pertumbuhan Dana Perimbangan	4,26	5,08	5,52
Pertumbuhan DBH	4.06	5.51	8.51
Pertumbuhan DAU	2.00	3.00	3.00
Pertumbuhan DAK	6.31	6.84	7.34

Sumber: Hasil Proyeksi

4.3.2.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Dasar utama dalam proyeksi pendapatan daerah mencakup empat determinan, yakni: (1) asumsi indikator makro ekonomi daerah, (2) kebijakan di bidang keuangan negara, (3) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah, serta (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap obyek pendapatan daerah. Sedangkan untuk proyeksi belanja daerah, selain mengacu pada analisis asumsi indikator makro ekonomi daerah, juga mengacu pada analisis kebijakan pembiayaan daerah, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi belanja Operasi, Belanja Modal dan belanja lainnya, serta didasarkan pada angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat dan prioritas utama daerah. Hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Palopo untuk periode 2024-2026 yang akan datang disajikan pada tabel.69.

Selama periode 2024-2026, pendapatan daerah Kota Palopo diharapkan meningkat secara signifikan dari Rp 985 Milyar lebih pada tahun 2022 menjadi Rp 1,09 Triliun lebih pada tahun 2026. Peningkatan ini diyakini akan lebih banyak didorong oleh pertumbuhan pendapatan asli daerah dan dari dana bagi hasil pajak/non pajak. Dana perimbangan, khususnya DAU dan DAK, meskipun masih cukup dominan, tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih kecil dari PAD. Hal ini karena komponen DAU dan DAK tidak sepenuhnya mampu dikontrol oleh pemerintah daerah, karena merupakan komponen yang berasal dari luar daerah. Sedangkan PAD merupakan komponen pendapatan yang betul-betul berasal dari Kota Palopo sendiri, sehingga lebih mampu dikontrol oleh pemerintah melalui kebijakan keuangan daerahnya.

Optimisme pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari daerah sendiri untuk beberapa tahun ke depan didasari pada berbagai aspek. Salah satunya dari besarnya pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang diasumsikan akan bertumbuh signifikan ke depan. Potensi pendapatan daerah dari berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, akan direspon dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berupa intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang semakin membaik. Kebijakan ekstensifikasi berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kota Palopo

seperti Pemanfatan Ruko Sawerigading dan Ruko sekitar Terminal Dangerakko akan berdampak sangat signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Palopo.

Selain itu, diperkirakan kebijakan keuangan negara ke depan, akan semakin mendorong optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Ekspektasi pertumbuhan kinerja pendapatan daerah yang diharapkan sebagian besar merupakan kontribusi dari dalam daerah sendiri. Kondisi ini akan semakin memperbaiki tingkat kemandirian fiskal Kota Palopo ke depannya. Ketergantungan pada sumber pendapatan dari luar daerah diharapkan akan semakin mengecil, sehingga akan menuju keseimbangan sumber keuangan daerah yang baik pada periode-periode pembangunan selanjutnya.

Oleh karena itu, ada rasa optimisme yang tinggi dari bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat walaupun beberapa tahun terakhir sempat melambat karena dampak penyebaran Covid-19. Tantangan terbesarnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk secara kreatif dan inovatif menghadirkan sejumlah alokasi belanja daerah yang secara nyata mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru, baik berupa pajak dan retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 72. Proyeksi Neraca Keuangan Daerah Tahun 2024-2026

Uraian	Pertumbuhan	Realisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi		
				2024	2025	2026
Pendapatan	2,63	985.211.887.731,29	994.836.195.311	1.040.149.939.418,97	1.063.671.164.843,32	1.093.064.727.505,39
PAD	3,91	178.677.929.800,29	239.578.584.000	195.292.252.298,45	201.079.265.885,67	208.273.427.234,81
Pajak Daerah	6,44	41.418.904.125	43.567.000.000	45.014.170.668,94	48.921.515.499,22	53.168.027.838,93
Retribusi Daerah	15,65	18.045681.733	11.746.844.000	21.906.150.451,46	26.592.479.859,75	32.281.344.288,91
Hasil Pengelolaan yang dipisahkan	0,11	7.036.243.575	7.000.000.000	7.047.034.240,42	7.057.841.454,23	7.068.665.241,80
Lain-lain PAD yang sah	0,79	112.177.100,.367,29	177.264.740.000	121.324.896.987,63	118.507.429.072,48	115.755.389.865,18
Pendapatan transfer	1,83	796.699.253.157	722.876.284.181	831.030.123.014,30	842.950.135.623,89	856.724.071.957,24
Pendapatan transfer pemerintah pusat	1,62	725.685.574.781	655.464.976.000	756.297.224.084,11	764.267.991.300,19	773.855.292.964,13
Dana transfer umum-DBH Pajak	0,23	14.550.624.158	8.742.001.000	14.595.076.885,50	14.639.665.417,83	14.684.390.169,87
Dana transfer umum-DBH Bukan Pajak	5,68	12.704.669.704	3.545.576.000	6.097.813.474,46	10.397.192.898,04	15.844.844.008,16
Dana transfer umum-DAU	0,34	485.869.974.472	504.787.511.000	504.027.289.920,73	498.254.864.830,96	492.551.854.318,47
Dana transfer umum-DAK	4,22	212.560.306.447	138.389.888.000	231.577.043.803,42	240.976.268.153,37	250.774.204.467,62
Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya	2,79	9.008.187.000	-	9.344.425.782,27	9.693.214.983,26	10.055.023.058,77
Dana insentif daerah (DID)	2,79	9.008.187.000	-	9.344.425.782,27	9.693.214.983,26	10.055.023.058,77
Pendapatan Transfer antar daerah	4,10	61.999.491.376	67.411.308.181	65.388.473.147,92	68.988.929.340,43	72.813.755.934,34
Pendapatan bagi hasil	4,55	56.338.647.376	57.991.212.181	59.785.507.340,23	63.443.249.960,81	67.324.777.268,90
Bantuan Keuangan	-0,77	5.660.884.000	9.420.096.000	5.602.965.807,68	5.545.679.379,63	5.488.978.665,45
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan undang-undang	29,96	9.840.704.774	32.381.327.130	13.827.564.106,22	19.647.763.333,76	28.067.228.313,34
Hibah	-25,87	388.586.620	-	260.700.929,83	174.903.023,72	117.341.613,34
Bantuan Keuangan	0	-	-	-	-	-
Pendapatan lainnya	31,13	9.452.118.154	32.381.327.130	13.566.863.176,39	19.472.860.310,04	27.949.886.699,99
Belanja	2,13	1.011.287.069.740,38	1.066.894.820.311	1.047.208.564.418,97	1.070.735.789.843,32	1.100.123.352.505,39
Belanja Operasi	-3,05	747.142.055.384,83	778.934.470.443	628.319.824.396,80	642.437.129.424,52	660.070.459.825,58
Belanja pegawai	-4	439.392.166.906,20	466.410.800.917	357.265.496.105,69	364.323.663.733	373.139.932.531,61

Uraian	Pertumbuhan	Realisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi		
				2024	2025	2026
Belanja barang jasa	-1,27	293.114.165.218,97	299.650.324.536	256.854.329.722,67	264.319.616.348,82	278.516.635.720,42
Belanja bunga	-10,22	1.342.956.043,21	2.038.500.000	1.163.173.564,30	1.007.458.693,47	872.589.482,95
Belanja subsidi	-					
Belanja Hibah	-13,32	13.127.267.216	10.642.844.990	12.884.246.863,16	12.645.725.458,27	7.411.619.713,93
Belanja Bansos	-5,91	165.500.000	192.000.000	152.578.140,98	140.665.190,96	129.682.376,66
Belanja Modal	13,61	264.138.513.856	280.960.349.868	418.883.425.767,59	428.294.315.937,33	440.049.341.002,16
Belanja Tidak Terduga	-14,03	6.500.500	7.000.000.000	5.314.254,58	4.344.481,47	3.551.677,65
Belanja transfer	-	-	-	-	-	-
 Penerimaan Pembiayaan	 -18,35	 45.004.717.734,91	 75.000.000.000	 20.000.000.000	 20.000.000.000	 20.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	44,83	2.941.373.129,24	2.941.375.000	12.941.375.000	12.941.375.000	12.941.375.000
Jumlah Pembiayaan Netto	-36	42.063.344.605,67	72.058.625.000	7.058.625.000	7.058.625.000	7.058.625.000
Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA)		15.988.162.596,58	-	-	-	-

Sumber : DPPKAD Kota Palopo, 2022

4.3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yaitu: Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas Kedua, untuk membiayai penuntasan pembangunan daerah sambil menunggu visi misi Kepala Daerah yang terpilih; dan Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palopo dituangkan pada tabel.72 yang direncanakan berjalan selama 3 tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut,

Prioritas Pertama untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk mencapai target belanja infrastruktur daerah minimal 40 persen, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
- d. Belanja Moda Transportasi, besarnya 10 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 persen untuk BBH Kab./Kota, 30 persen hak Provinsi dengan komposisi : 50 persen *specific grant* dan 50 persen *block grant*, dari yang 50 persen *specific grant*, 75 persen untuk iuran JKN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Sedangkan Belanja Mengikat (*Mandatory Expenditure*), digunakan untuk sebagai berikut: Belanja Pegawai; Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok; Belanja DAK BOS; Belanja Operasional Kantor; dan Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK

BLUD), juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

Prioritas Kedua untuk memenuhi belanja dalam rangka menuntaskan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Palopo.

Prioritas Ketiga Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya. Nilai kapasitas riil pemerintah Kota palopo tahun 2024– 2026, serta pembagian alokasi anggaran berdasarkan prioritas tersebut diatas ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 73.Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota palopo Tahun 2024-2026

KELOMPOK PRIORITAS RPJMD 2024-2026	TAHUN 2024	%	TAHUN 2025	%	TAHUN 2026	%
KP 1	418.883.425.768	40	428.294.315.937	40	440.049.341.002	40
KP 2	366.522.997.547	35	374.757.526.445	35	385.043.173.377	35
KP 3	261.802.141.105	25	267.683.947.461	25	275.030.838.126	25
JUMLAH	1.047.208.564.419	100	1.070.735.789.843	100	1.100.123.352.505	100

Sumber : Hasil Proyeksi DPPKAD

4.3.3.4 Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah

Untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah yang berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di Daerah, sementara itu Pemerintah Kota Palopo mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, untuk itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan lain melalui Kemitraan Pembiayaan Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah, Swasta maupun dengan Dunia Usaha, melalui :

1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian risiko

diantara para pihak terkait. Manfaat penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; kesinambungan dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; serta mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah melalui pengalihan dana swasta, sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih dioptimalisasi. Dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres No.38/2015 dimana dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (user fee), pembayaran oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (availability payment), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur antara lain :

- a. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
- b. Termasuk ke dalam 19 jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
- c. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, Skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah

Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Palopo harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

Dalam beberapa tahun ke depan, kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU akan difokuskan pada percepatan pengimplementasian kegiatan yang mendukung pencapaian kerjasama atas aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palopo baik pengembangan objek wisata seperti Pantai Labombo, Sungai Latuppa, dll, Pengembangan pusat pertokoan di sekitar Terminal Songka dan Pusat Niaga/Cenderamata, maupun pengembangan pusat pendidikan agama di Islamic Center.

Untuk mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya, perlu disiapkan kelembagaan, pengorganisasian dan penguatan pelaksanaan skema KPBU yang efektif dan fleksibel serta mampu berperan dalam mengakselerasi pengimplementasiannya baik pada tataran Sekretariat Pengelolaan KPBU, Simpul KPBU, Tim KPBU maupun Panitia Pengadaan.

2. *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Pendanaan pembangunan selain APBN dan APBD Kota Palopo yang perlu dimaksimalkan yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mitra PKBL dan TJSL yang diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini harus berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL lebih diutamakan pada program yang mendukung prioritas pemerintah daerahserta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta berkesinambungan dan berdampak positif terhadap masyarakat, penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2021, dalam menunjang program dan kegiatan Pemerintah Kota Palopo maka beberapa perusahaan memberikan CSR dalam bentuk barang kepada Pemerintah Kota Palopo (Tabel.74).

Tabel 74. Daftar Hibah CSR yang diterima oleh Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021

Nama Perusahaan	Uraian	Nilai
PT. Pegadaian	Bank Sampah di Kelurahan To'Bulung	58.100.000,00
	Motor Sampah	43.180.000,00
	Perlengkapan Kebersihan	8.666.000,00
PT. Bank Sulselbar	Mobil Pick Up 2 Unit	277.150.000,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 2021

3. Pembiayaan melalui pinjaman daerah

Pembangunan Infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur yang layak dan memadai mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Salah satu komponen penting pada pembangunan infrastruktur yang baik didukung oleh pembiayaan yang layak dalam tahap perencanaan (*planning*), proses pembangunan (*construction*), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur (*operational and maintenance*). Konsep struktur pembiayaan meliputi pemilihan instrument keuangan, dan bentuk pembiayaan yang didasarkan pada analisis estimasi arus kas yang dihasilkan baik berupa initial cash outflow yaitu pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi, sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan, maupun operational cash inflow yaitu penerimaan kas dari hasil pembangunan proyek infrastruktur dan pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Struktur pembiayaan yang baik memegang peranan penting dalam menanggulangi risiko konstruksi dan risiko ekonomi yang merupakan 2 risiko utama dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena struktur pembiayaan mempengaruhi total *life-cycle cost* yang berdampak pada viabilitas keuangan suatu proyek pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, struktur pembiayaan yang baik juga akan mempengaruhi motivasi dan komitmen dari para pihak yang berpartisipasi sehingga mampu mencapai pembangunan infrastruktur yang efektif

dan efisien. Pertimbangan konsep struktur pembiayaan pada proyek pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan komponen investasi yang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini mengingat bahwa proyek infrastruktur memiliki karakteristik dan keunikan dibandingkan dengan proyek lainnya.

Pembiayaan melalui pinjaman merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk : 1) menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah. 2) Percepatan pencapaian target Program Pembangunan Daerah. 3) Adanya kegiatan Prioritas Daerah. 4) Pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Adapun alternative pinjaman yaitu melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”), Pemilihan PT. SMI, disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur.
2. Skema dan siklus pembiayaan tidak mengikuti tahun anggaran.
3. Tujuan pembiayaan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial serta manfaat lainnya.
4. Alternatif pembiayaan infrastruktur daerah

Manfaat Pinjaman Daerah :

1. Infrastruktur publik dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
2. Penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD).
3. Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah.
4. Akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah
5. Persiapan untuk mendapatkan akses instrumen pembiayaan yang lebih luas (salah satunya obligasi).

Jenis Pinjaman Daerah :

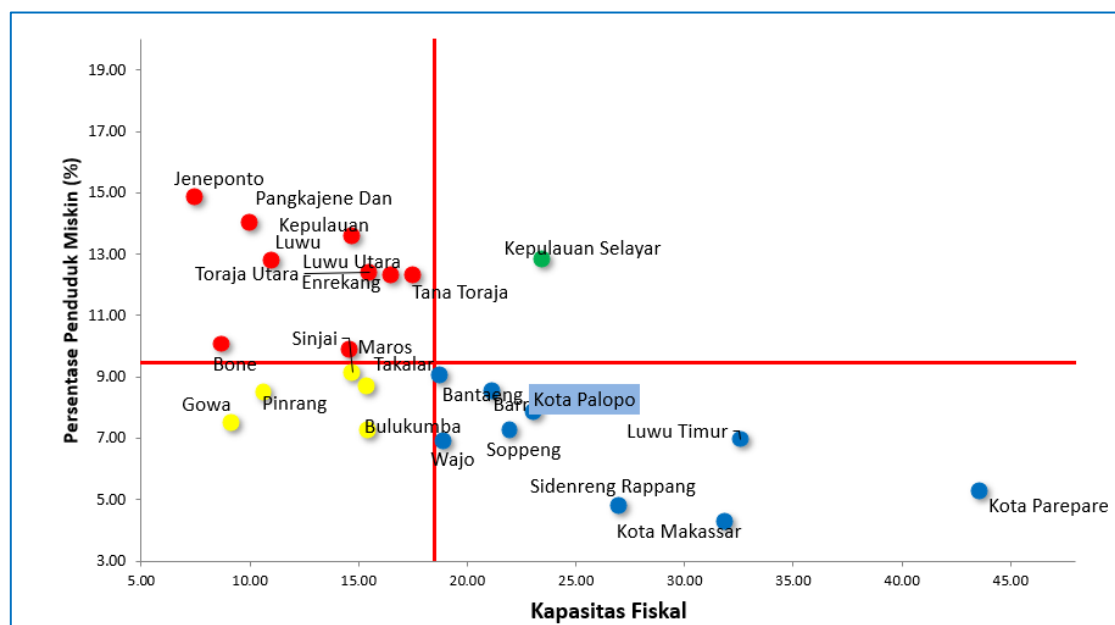
1. Pinjaman Jangka Pendek. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali

(pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

3. Pinjaman Jangka Panjang. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
 - b. Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
 - c. Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

4.4 ANALISIS KAPASITAS FISKAL PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dari sisi kapasitas/ruang fiskal, menurut peraturan Menteri Keuangan RI nomor 120/PMK.07/2020 tentang peta kapasitas fiskal daerah, indeks kapasitas fiskal Kota Palopo Tahun 2020 sebesar 0,483 dengan kategori **sangat rendah**, sehingga potensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya yang lebih kuat lagi terkait dengan anggaran yang tersedia. Secara pola hubungan, memang tidak terlihat pola korelasi yang jelas atau dengan kata lain angka korelasinya rendah. Namun demikian, kapasitas fiskal yang tinggi tentunya akan lebih memudahkan dalam penganggaran program-program penanggulangan kemiskinan terutama yang sifatnya langsung seperti bantuan sosial tunai. Kondisi pandemi covid-19 telah menambah beban fiskal bagi pemerintah daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, munculnya **refocusing** anggaran untuk penanggulan covid-19 tentu akan berdampak besar pada penganggaran penanggulangan kemiskinan, meskipun banyak program penanggulangan covid- 19 yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan. Jika dilihat dari data pengelompokan Kabupten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan dalam hubungannya dengan capaian indikator persentase penduduk miskin dan indeks kapasitas fiskal, Kota Palopo menempati posisi kuadran IV dengan kategori kapasitas fiskal tinggi dan persentase penduduk miskin rendah (gambar.67).



Gambar 67. Pengelompokan Kabupaten/Kota berdasarkan Kapasitas Fiskal dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2020

Sumber: Kemenkeu dan BPS 2020, diolah

Dari gambar.67 dapat dilihat hubungan kapasitas fiskal dan tingkat kemiskinan terbagi kedalam 4 kelompok kuadran kabupaten/kota, Kota Palopo masuk dalam kudran IV yaitu kategori kapistas fiskal tinggi dan kemiskinan yang rendah.

Kabupaten/kota yang berada pada kuadran I semestinya menjadi perhatian utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu kabupaten/kota yang berada di kuadran I perlu memprioritaskan kebijakan penganggarannya untuk efektivitas belanja daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Sementara Kota Palopo masih berada pada prioritas IV hal ini menggambarkan bahwa kondisi kapasitas fiskal untuk upaya penanggulangan kemiskinan masih efektif.

Tabel 75. Pengelompokan Kabupaten/Kota menurut Kapasitas Fiskal dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022

Kuadran I (Kapasitas fiskal rendah dan kemiskinan tinggi)	Kab Jeneponto, Kab Pangkajene Kepulauan, Kab Luwu Utara, Kab Luwu, Kab Enrekang, Kab Tana Toraja, Kab Toraja Utara, Kab Bone, Kab Maros
Kuadran II (Kapasitas fiskal tinggi dan kemiskinan tinggi)	Kab Sinjai, Kab Bulukumba, Kab Takalar, Kab Gowa, Kab Pinrang, Kab Wajo
Kuadran III (Kapasitas fiskal rendah dan kemiskinan rendah)	Kab Kepulauan Selayar
Kuadran IV (Kapasitas fiskal tinggi dan kemiskinan rendah)	Kab Barru, Kab Bantaeng, Kab Soppeng, Kota Palopo, Kab Sidenreng Rappang, Kab Luwu Timur, Kota Makassar, Kota Parepare

Sumber: Kemenkeu dan BPS 2022, diolah.

BAB V LOKASI PRIORITAS

5.1 LOKASI PRIORITAS

Penentuan lokasi prioritas dalam melakukan prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo berdasarkan hasil analisis mikro pada Bab III Sub-bab 3.3.2 yaitu jenis kelamin perempuan, angkatan kerja yang memiliki umur muda, status perkawinan yang belum kawin, pendidikan yang belum pernah sekolah, status pekerjaan yang tidak bekerja, dan belum pernah menerima bantuan social. Variabel sosial ekonomi dengan atribut tersebut diprioritaskan untuk mendapatkan intervensi prioritas pertama, sedangkan yang lain diprioritaskan sebagai urutan berikutnya.

5.1.1 Lokasi Prioritas Urusan Pendidikan

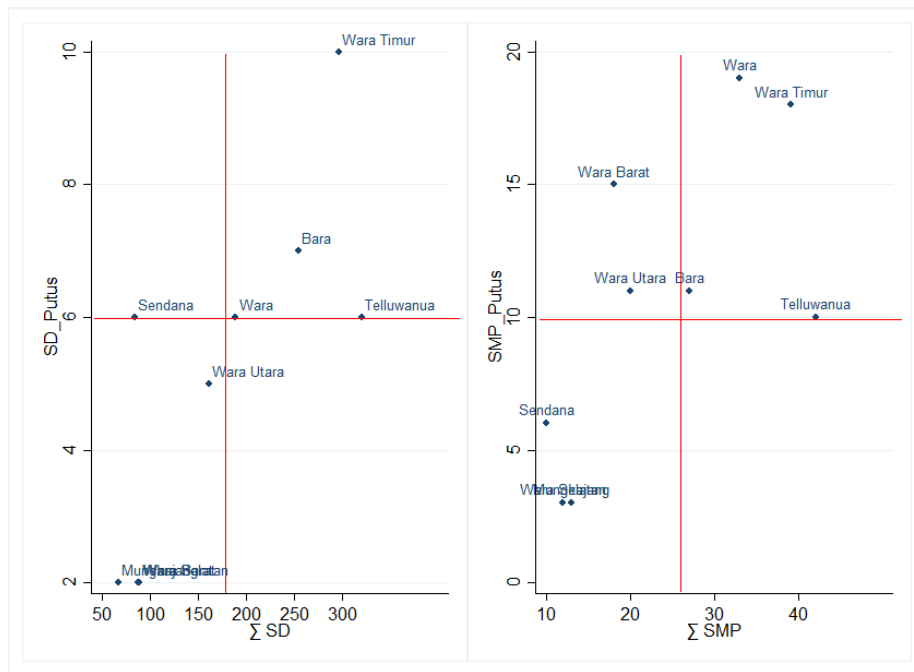
Indikator urusan pendidikan dilihat dari indikator angka putus sekolah jenjang pendidikan SD dan SMP di Kota Palopo, diprioritaskan pada prioritas 1, baik pada status miskin ekstrim dan miskin (Tabel.76). Kemudian urutan berikutnya diprioritaskan kepada status miskin dan miskin ekstrim prioritas 2.

Tabel 76.Hasil Statistik Deskriptif Prioritas Intervensi Urusan Pendidikan

Variabel Sosial Ekonomi	Miskin Ekstrim		Miskin		Σ
	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 1	Prioritas 2	
Jenis Kelamin					
Laki-Laki		10 (SD) 19 (SMP)		14 (SD) 35 (SMP)	
Perempuan	11 (SD) 17 (SMP)		11 (SD) 25 (SMP)		
Umur	9-12 Tahun (SD) 13-15 (SMP)	9-12 Tahun (SD) 13-15 (SMP)	9-12 Tahun (SD) 13-15 (SMP)	9-12 Tahun (SD) 13-15 (SMP)	
Pendidikan					
Tidak Tamat SD	11	10	11	14	46
Tidak Tamat SMP	17	19	25	35	96
Penerima Bansos	0	0	0	0	

Sumber : Hasil olah BNBA P3KE, 2022

Lokasi prioritas intervensi penanganan kemiskinan pada bidang urusan Pendidikan dengan indikator angka putus sekolah disajikan pada gambar.90 (sisi kiri SD dan sisi kanan SMP). Kecamatan prioritas yang memiliki angka putus sekolah SD terbanyak adalah kecamatan Wara timur, Bara, Wara, dan Telluwanua. Sedangkan prioritas untuk angka putus sekolah SMP adalah kecamatan Wara, Wara timur, Bara, dan Telluwanua.



Gambar 68.Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada Urusan Pendidikan
Sumber : BNBA P3KE 2022, diolah

5.1.2 Lokasi Prioritas Urusan Kesehatan

Indikator urusan kesehatan dilihat angka kematian ibu dan bayi. Kematian angka ibu dan bayi dipengaruhi oleh fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Fasilitas kesehatan dalam meng-*cover* urusan kesehatan adalah Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Indikator angka kematian ibu (8) dan anak (15) di Kota Palopo masih tinggi, disini lain capaian Kota Palopo sudah 95% UHC dan masih ada 5% yang belum mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan perlu dilakukan intervensi. Jumlah penduduk miskin yang belum menerima PBI Jaminan Kesehatan disajikan pada table. 77.

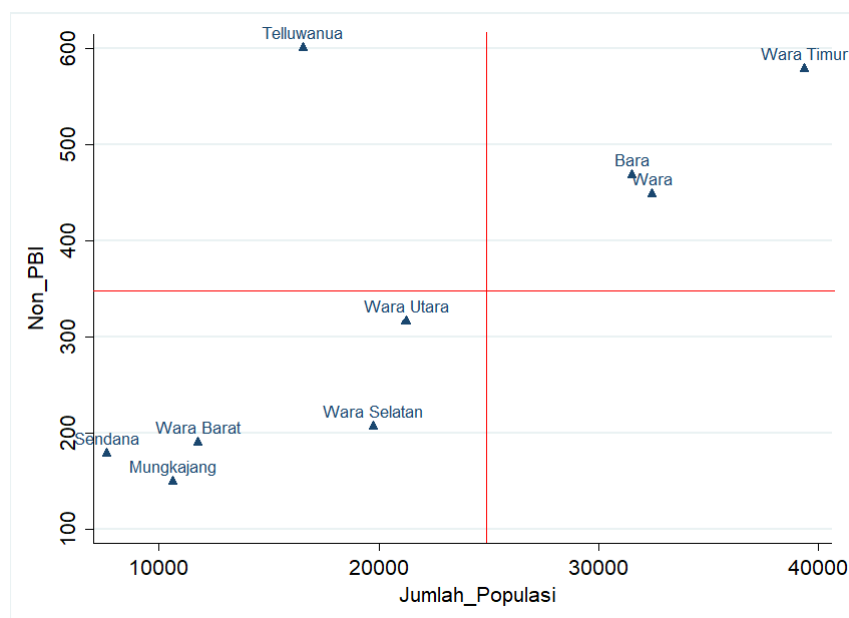
Tabel 77. Hasil Statistik Deskriptif Prioritas Intervensi Urusan Kesehatan

Variabel Sosial Ekonomi	Miskin Ekstrim		Σ
	Prioritas 1	Prioritas 2	
Jenis Kelamin			
Laki-Laki		1666	1666
Perempuan	1470		1470
Status Perkawinan			
Belum Kawin	740	1009	
Kawin	681	644	
Cerai Hidup/Mati	49	13	
Pendidikan			

Variabel Sosial Ekonomi	Miskin Ekstrem	Σ
	Prioritas 1	Prioritas 2
Tidak Pernah Sekolah	31	34
Pernah Sekolah	1439	1632
Status Pekerjaan		
Tidak Bekerja	1351	845
Bekerja	119	821
Penerima Bansos		
Tidak Menerima	1375	1656
Menerima	95	10

Sumber : Hasil olah BNBA P3KE, 2022

Lokasi prioritas intervensi penanganan kemiskinan pada bidang urusan kesehatan dengan indikator penduduk miskin ekstrem yang belum menerima PBI disajikan pada gambar.91. Kecamatan prioritas yang belum menerima PBI terbanyak adalah kecamatan Wara timur, Bara, dan Wara.



Gambar 69. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada Urusan Kesehatan
Sumber : BNBA P3KE 2022, diolah

5.1.3 Lokasi Prioritas Urusan Perumahan dan Permukiman

Indikator urusan perumahan dan permukiman dilihat dari indikator persentase jumlah masyarakat miskin yang memiliki RLH di Kota Palopo 98,10%, disisi lain capaian luasan RTLH Kota Palopo 303,40 Ha dan yang telah dilakukan penanganan 31,60 Ha. Jumlah penduduk miskin ekstrem yang masih menempati RTLH sebanyak 75 KK dari total penduduk

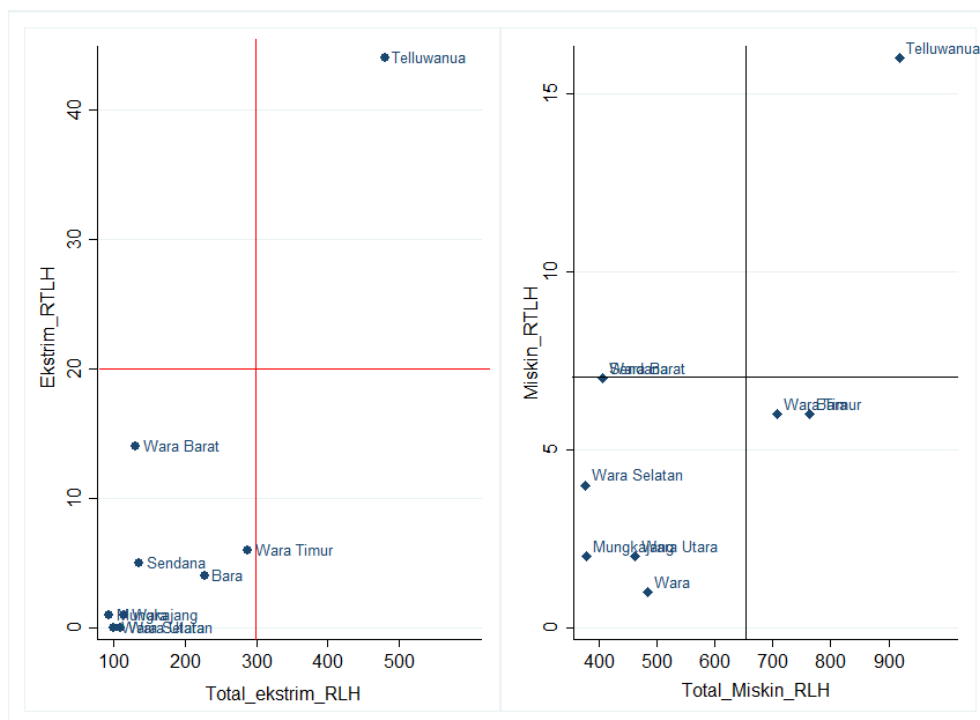
miskin yang telah memiliki RLH sebanyak 1678 KK, sedangkan miskin yang masih menempati RTLH sebanyak 51, dari total penduduk miskin yang telah memiliki RLH sebanyak 4904 KK.

Tabel 78. Hasil Statistik Deskriptif Prioritas Intervensi Urusan Perumahan Permukiman

Variabel Sosial Ekonomi	Miskin Ekstrem		Miskin		Σ
	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 1	Prioritas 2	
Jenis Kelamin					
Laki-Laki		71		41	112
Perempuan	4		10		14
Status Pekerjaan					
Tidak Bekerja	3		8	3	
Bekerja	1		2	38	
Penerima Bansos					
Tidak Menerima	1	70	4	40	
Menerima	3	1	6	1	

Sumber : Hasil olah BNBA P3KE, 2022

Lokasi prioritas intervensi penanganan kemiskinan pada bidang urusan perumahan dan permukiman dengan indikator penduduk miskin ekstrim dan miskin yang masih menempati RTLH disajikan pada gambar.57. Kecamatan prioritas yang perlu dilakukan pembangunan RLH adalah kecamatan Telluwanua. Kemudian prioritas kedua adalah kecamatan Wara Timur dan Bara.



Gambar 70. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada Urusan Perumahan

Sumber : BNBA P3KE 2022, diolah

5.1.4 Lokasi Prioritas Urusan Sosial

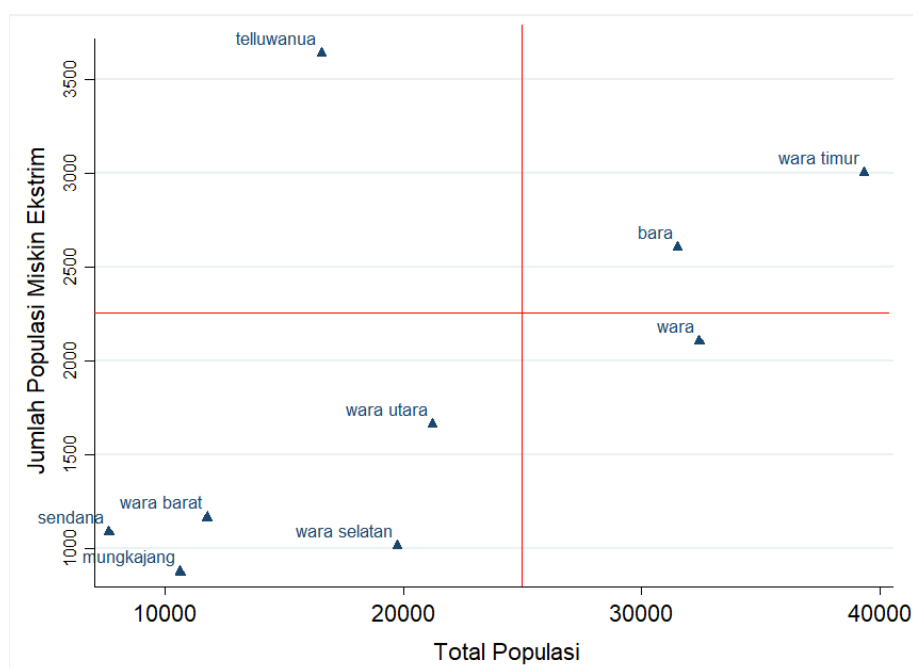
Indikator urusan sosial dilihat dari indikator persentase jumlah masyarakat miskin yang di Kota Palopo yang turun 7,78%, tetapi disisi lain terjadi peningkatan penduduk miskin ekstrim Kota Palopo dari 1,94% menjadi 2,18% dan perlu dilakukan intervensi. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah focus terhadap jumlah penduduk miskin ekstrim yang telah dipetakan jumlah penduduk yang disajikan pada tabel.79.

Tabel 79. Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim per Kelurahan Tahun 2022

Kec	JUMLAH PENDUDUK MISKIN EKSTRIM PER KELURAHAN							Total
	amasangan	boting	dangerako	lagaligo	pajalesang	tompotikka		17162
Wara	123	353	278	320	785	247		2106
Wara Utara	69	175	306	281	293	538		1662
Wara Selatan	348	142	145	378				1013
Telluwana	504	769	341	639	883	157	348	3641
Wara Timur	187	163	581	1168	184	383	337	3003
Wara Barat	298	82	225	214	347			1166
Sendana	106	394	401	189				1090
Mungkajang	210	293	96	277				876
Bara	235	454	479	855	582			2605

Sumber : BNBA data P3KE, 2022

Lokasi prioritas intervensi penanganan kemiskinan pada bidang urusan sosial dengan indikator penduduk miskin ekstrim disajikan pada gambar.58. Kecamatan prioritas yang perlu dilakukan intervensi untuk menekan jumlah penduduk miskin ekstrim adalah kecamatan Wara Timur dan Bara. Kemudian prioritas kedua adalah kecamatan Telluwana dan Wara. Kecamatan Wara Timur dan Bara menjadi prioritas dikarenakan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga berpeluang lebih tinggi individu di kedua wilayah tersebut semakin menurun tingkatannya dari miskin menjadi miskin ekstrim.



Gambar 71. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada Urusan Sosial
Sumber : BNBA data P3KE 2022; BPS Kota Palopo 2023, diolah

5.1.5 Lokasi Prioritas Urusan Kewilayahan (Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan)

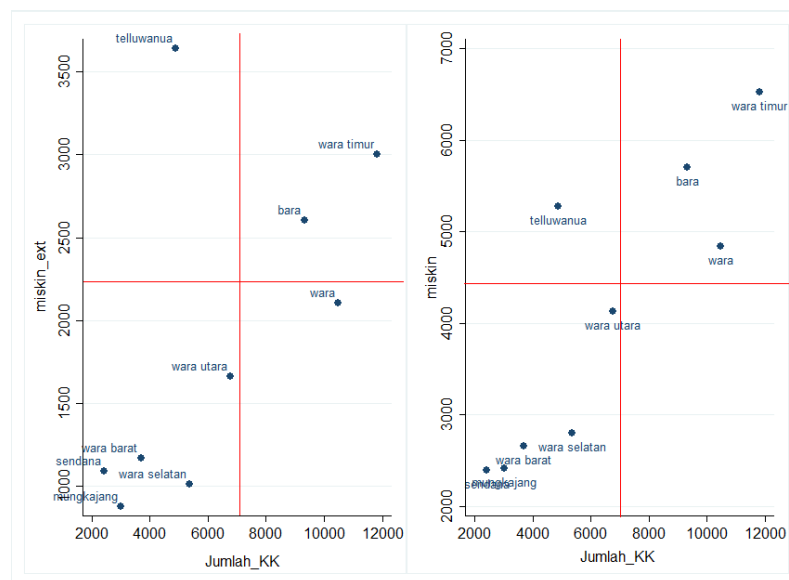
Indikator urusan pembangunan kelurahan dilihat dari indikator indeks pelayanan publik di Kota Palopo yang mengalami peningkatan menjadi 87,7, tetapi masih terdapat jumlah penduduk miskin yang tinggi di dua kecamatan yaitu kecamatan Wara Timur, Telluwanua, dan Bara yang jumlahnya >2000 KK (tabel.79). Walaupun demikian tidak hanya penduduk miskin yang harus ditekan tetapi ditambah beban dengan adanya penduduk miskin ekstri atau yang masuk dalam kategori desil.1. Program yang dilaksanakan dalam menanggulangi kemiskinan baik miskin/miskin ekstrim adalah program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan pemberdayaan kelurahan.

Tabel 80. Prioritas Intervensi Kemiskinan Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Keluarga					Prioritas Intervensi
	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	
Wara Timur	2561	519	801	631	610	1
Telluwanua	2348	692	791	472	393	2
Bara	2336	460	696	585	595	3

Kecamatan	Keluarga					Prioritas
	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Intervensi
Wara	1905	362	527	507	509	4
Wara Utara	1547	276	470	403	398	5
Wara Selatan	1061	177	306	297	281	6
Wara Barat	1035	200	308	267	260	7
Sendana	968	189	278	270	231	8
Mungkajang	903	147	264	257	235	9

Sumber : P3KE Kemenko PMK, 2022



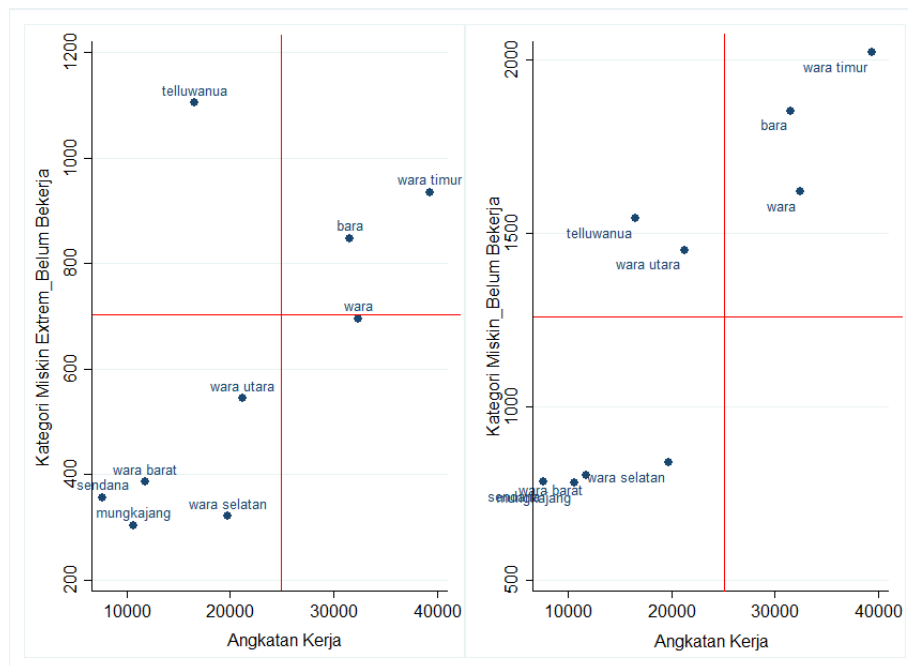
Gambar 72. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada Urusan Kewilayahan
Sumber : BNBA data P3KE 2022; BPS Kota Palopo 2023, diolah

Lokasi prioritas intervensi penanganan kemiskinan pada bidang urusan pembangunan kelurahan (kewilayahan) dengan indikator penduduk miskin ekstrim dan miskin relative dengan jumlah KK disajikan pada gambar.60. Kecamatan prioritas yang perlu dilakukan intervensi untuk menekan jumlah penduduk miskin ekstrim adalah kecamatan Wara Timur dan Bara. Kemudian prioritas kedua adalah kategori penduduk miskin yaitu kecamatan Wara Timur, Bara dan Wara.

5.1.6 Lokasi Prioritas Urusan Ketenagakerjaan

Indikator urusan ketenagakerjaan dilihat dari indikator tingkat pengangguran terbuka di Kota Palopo yaitu 8,20%, turun dari tahun sebelumnya 8,83%. Walaupun terjadi penurunan angka pengangguran, perlu dilakukan intervensi tepat sasaran kepada Penduduk miskin dan

miskin ekstrim yang belum bekerja dengan total sebanyak 17.185 individu, dengan total angkatan kerja laki-laki 54442 dan perempuan 35718. Lokasi prioritas intervensi penduduk miskin dan miskin ekstrim yang belum bekerja disajikan pada gambar.61.

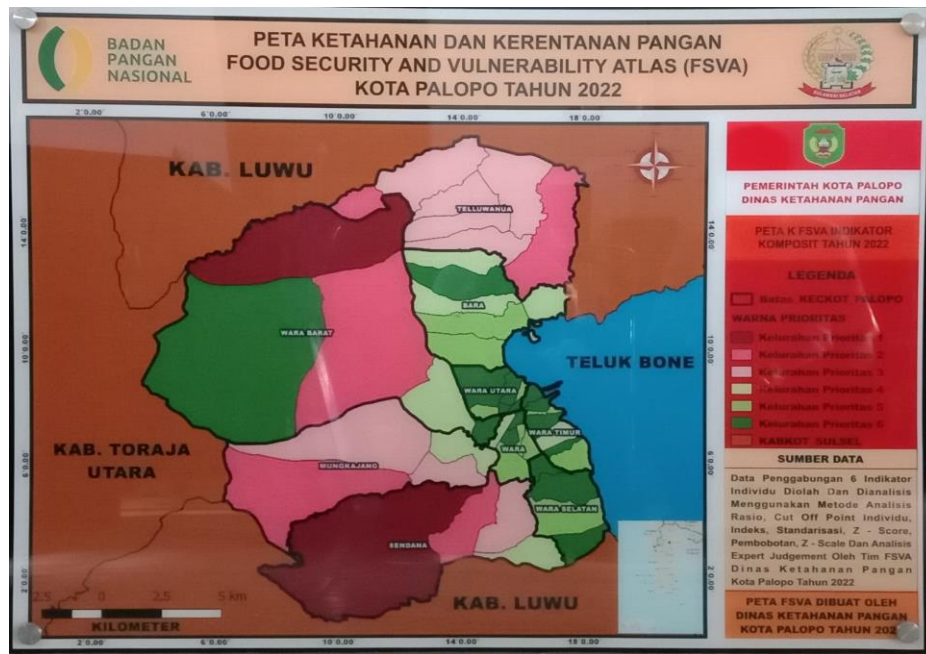


Gambar 73. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada Urusan Ketenagakerjaan
Sumber : BNBA P3KE, 2022

5.1.7 Lokasi Prioritas Urusan Ketahanan Pangan

Indikator urusan ketahanan pangan dilihat dari indikator berkurangnya persentase kelurahan yang masuk kategori rentan pangan. Tahun 2022 kategori kelurahan yang masuk dalam kerawanan pangan sebesar 4,16% atau kurang dari target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin kecil persentase kelurahan yang masuk kategori pangan semakin baik, dan apabila memungkinkan harus mencapai 0%. Indikator kerawanan pangan ditampilkan gambar.61.

Pada tahun 2022 terdapat dua kecamatan yang terindikasi potensi terjadi kerawanan pangan yaitu di daerah Kecamatan Sendana dan Wara barat. Meningkatnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap jumlah ketersediaan pangan minimal yang harus dicukupi, oleh karena itu urusan ini masuk dalam urusan wajib. Berdasarkan undang-undang No.18 tahun 2012 tentang pangan bahwa, ketersediaan dan keterjangkauan pangan pokok yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari disesuaikan dengan potensi sumber daya dan kearifan local. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan bagi masyarakat yang terjangkau dan berkelanjutan.



Gambar 74. Peta Ketahanan Pangan Tahun 2022
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2022

5.1.8 Lokasi Prioritas Urusan Pertanian Perkebunan Dan Peternakan

Indikator urusan pertanian perkebunan dan peternakan dilihat dari indikator indeks nilai tukar petani yang ditargetkan >100. Tahun 2022 NTP Kota Palopo 103,95 (menggunakan *proxy* NTP provinsi Sulawesi Selatan) menunjukkan petani mengalami peningkatan pendapatan karena nilai jual hasil produksi pertanian meningkat dari biaya operasional yang dikeluarkan dalam bercocok tanam satu kali musim. Jumlah petani miskin yang perlu diintervensi disajikan tabel.81.

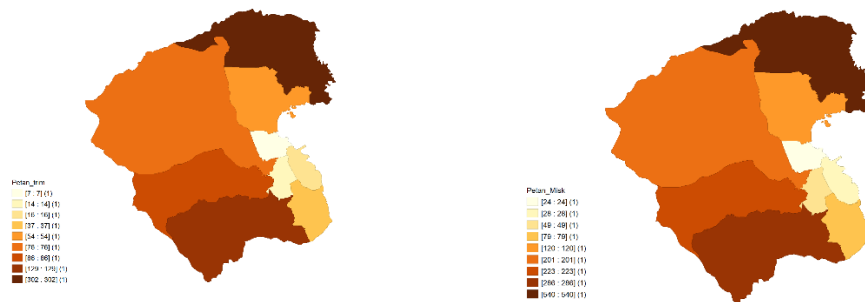
Tabel 81. Hasil Statistik Deskriptif Prioritas Intervensi Urusan Pertanian Perkebunan dan Peternakan

Variabel Sosial Ekonomi	Miskin Ekstrem		Miskin		Σ
	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 1	Prioritas 2	
Jenis Kelamin					
Laki-Laki		700		1502	2202
Perempuan	21		48		69
Penerima Bansos					
Tidak Menerima	3		8		

Sumber : Hasil olah BNBA P3KE, 2022

Lokasi prioritas intervensi penanganan kemiskinan pada bidang urusan pertanian perkebunan dan peternakan dengan indikator petani yang berstatus miskin ekstrim dan miskin disajikan pada gambar.62. Kecamatan prioritas yang perlu dilakukan intervensi untuk menekan jumlah petani yang berstatus miskin ekstrim adalah kecamatan Telluwanua dan Sendana

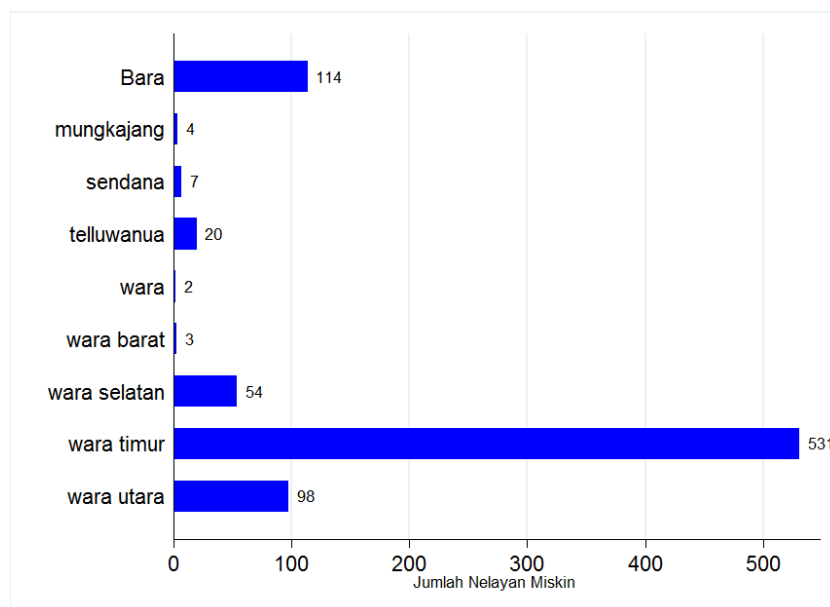
(gambar kiri warna coklat gelap). Kemudian prioritas kedua adalah kategori petani yang berstatus miskin yaitu kecamatan Telluwanua, dan Sendana (gambar kanan warna coklat gelap).



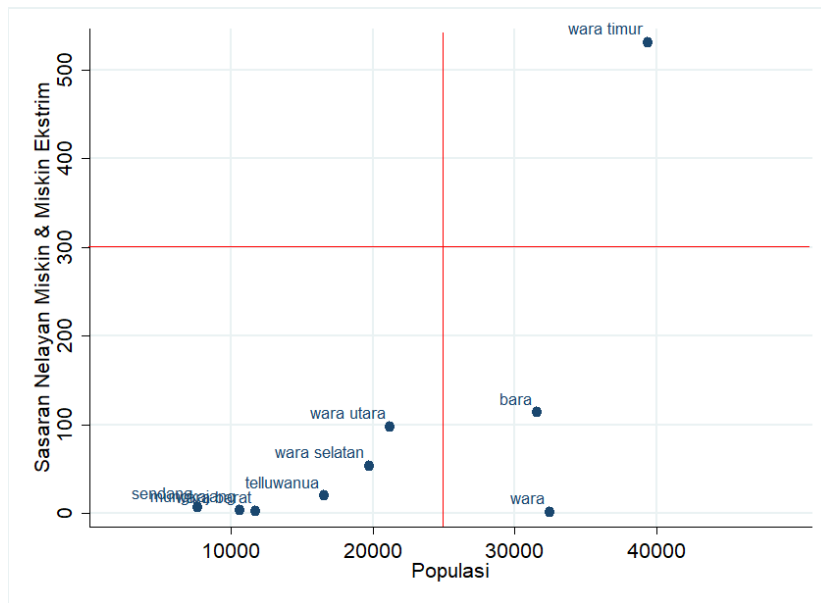
Gambar 75. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada Urusan Pertanian Perkebuan dan Peternakan
Sumber : BNBA P3KE,2022 diolah

5.1.9 Lokasi Prioritas Urusan Kelautan Dan Perikanan

Indikator urusan kelautan dan perikanan dilihat dari indikator persentase peningkatan nilai (rupiah) hasil produksi sektor perikanan yang diterima pelaku ekonomi sektor perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Target tahun 2022 sebesar 1% meningkatnya hasil produksi dalam rupiah, kemudian tahun 2022 terealisasi sebesar 3,38% peningkatan hasil produksi dalam rupiah. Walaupun demikian masih ada nelayan miskin dan miskin ekstrim yang perlu dilakukan intervensi, untuk mendapatkan fasilitasi oleh pemerintah setempat (gambar.64).



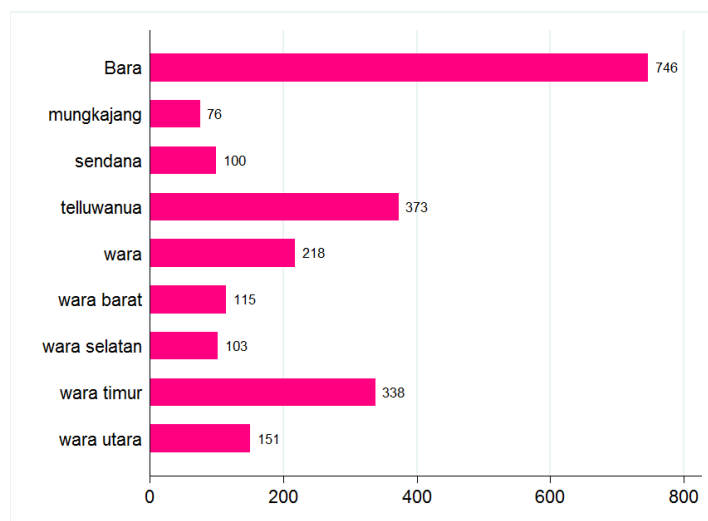
Gambar 76. Jumlah Nelayan Miskin dan Miskin Ekstrem
Sumber : BNBA P3KE, 2022



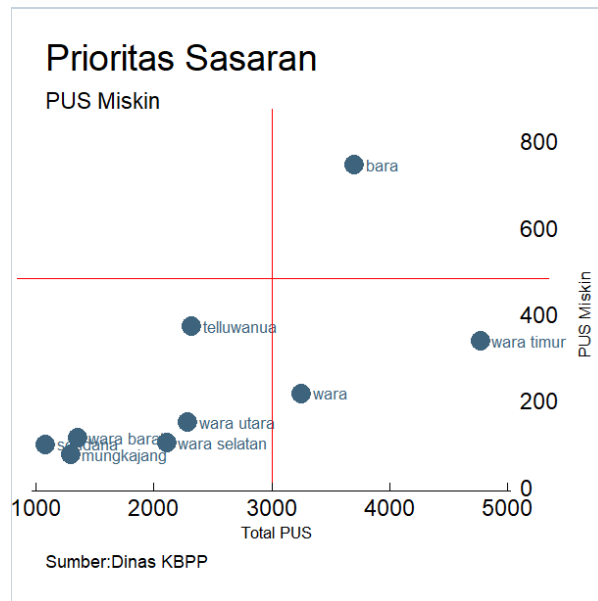
Gambar 77. Lokasi Prioritas Kampung Nelayan

5.1.10 Lokasi Prioritas Urusan Kependudukan

Indikator urusan kependudukan dilihat dari indikator pertumbuhan penduduk. Target tahun 2022 sebesar 2,80%, kemudian tahun 2022 terealisasi sebesar 1,89% atau dapat dikatakan pertumbuhan penduduk Kota Palopo dapat ditekan dibawah 2%. Walaupun demikian masih ada PUS (usia 15-49) masuk kategori miskin, yang perlu dilakukan intervensi untuk mengikuti program MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang). Lokasi prioritas PUS yang perlu dilakukan intervensi disajikan gambar.64.



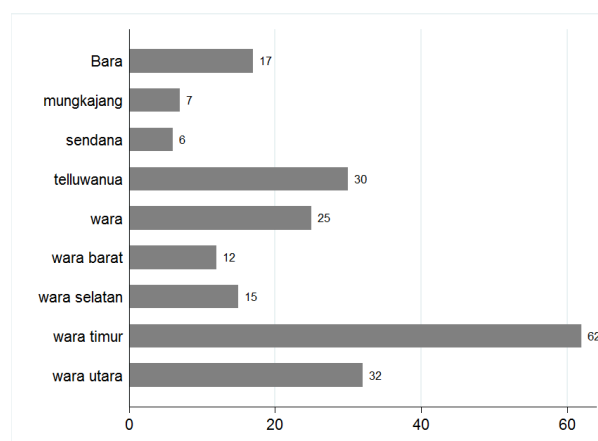
Gambar 78. Jumlah PUS yang Masuk Kategori Miskin dan Miskin Ekstrem
Sumber : BNBA P3KE, 2022



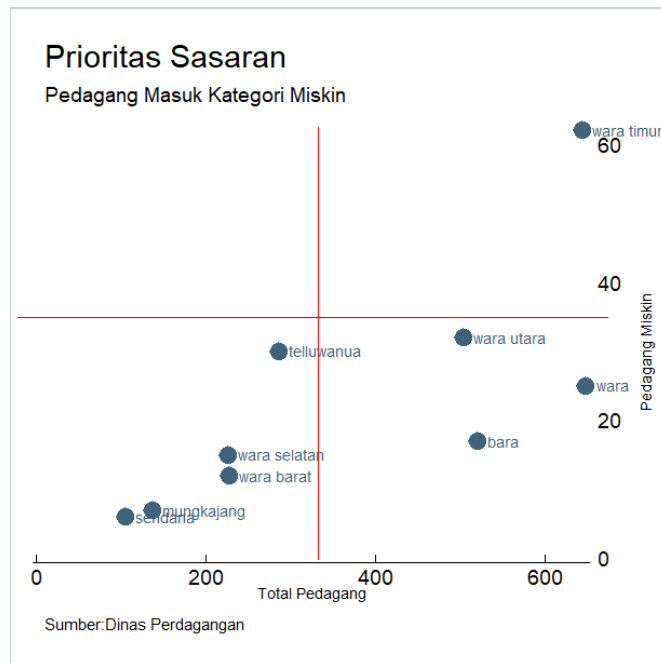
Gambar 79. Lokasi Prioritas Sasaran PUS Miskin

5.1.11 Lokasi Prioritas Urusan Perdagangan

Indikator urusan perdagangan dilihat dari indikator inflasi bulanan menurut kelompok bahan pokok. Target tahun 2022 sebesar <2%, kemudian tahun 2022 terealisasi sebesar 1,43% atau dapat dikatakan kenaikan harga bahan pokok di Kota Palopo dapat ditekan dibawah 2% atau stabilitas harga sembako di Kota Palopo masih terkendali. Walaupun demikian masih ada penduduk yang masuk kategori miskin, yang berprofesi sebagai pedagang perlu dilakukan intervensi untuk mengikuti program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Lokasi prioritas pedagang yang perlu dilakukan intervensi disajikan gambar.65.



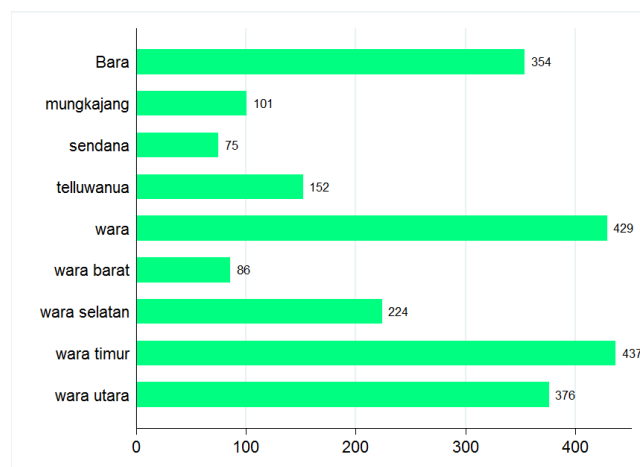
Gambar 80. Pedagang Masuk Kategori Miskin dan Miskin Ekstrem yang Perlu Intervensi
Sumber : BNBA P3KE, 2022



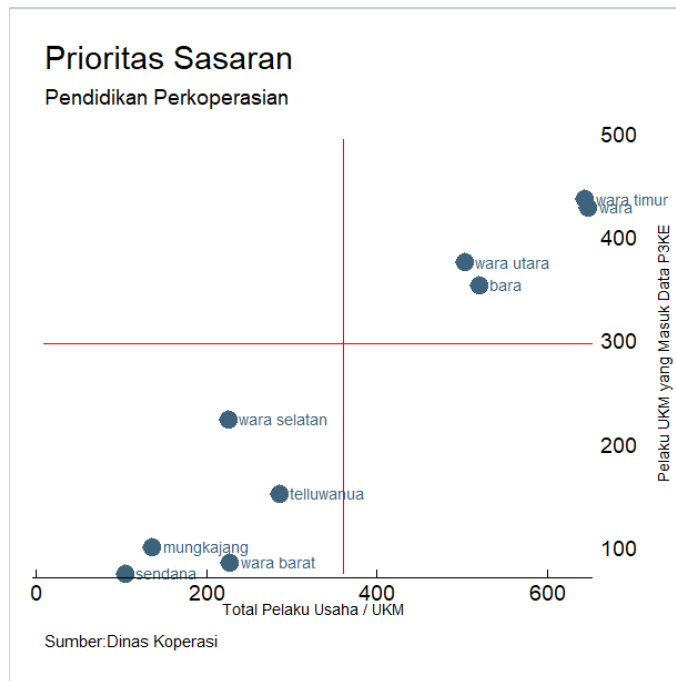
Gambar 81. Lokasi Prioritas Urusan Perdagangan

5.1.12 Lokasi Prioritas Urusan Koperasi

Lokasi prioritas urusan perkoperasian sasaran utama dalam target pengentasan kemiskinan adalah masyarakat yang masuk dalam data P3KE dengan status pekerjaan sebagai wiraswasta. Dari status pekerjaan tersebut dapat dilatih pendidikan perkoperasian maupun edukasi pembentukan koperasi, sehingga dampaknya dapat dinikmati sesama anggota masyarakat miskin lainnya. Lokasi prioritas wiraswasta yang perlu dilakukan intervensi disajikan gambar.67.



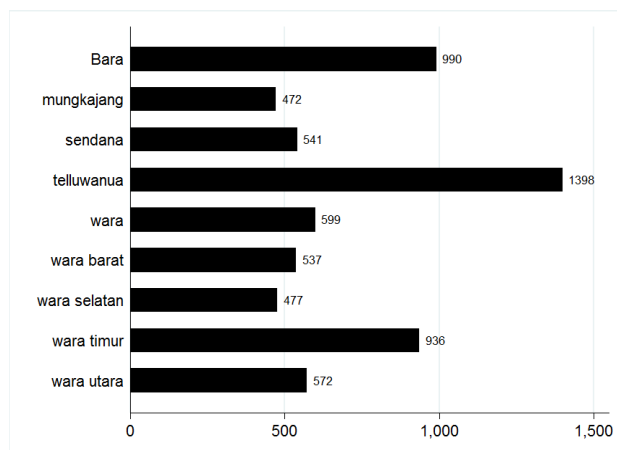
Gambar 82. Jumlah Wiraswasta masuk Data P3KE yang Menjadi Target Pelatihan Koperasi
Sumber : BNBA P3KE, 2022



Gambar 83. Lokasi Prioritas Urusan Koperasi

5.1.13 Lokasi Prioritas Urusan Pekerjaan Umum

Indikator urusan pekerjaan umum dilihat dari indikator rata-rata persentase infrastruktur pelayanan dasar (SPAM dan IPAL) yang terbangun. Target tahun 2022 sebesar 92,50%, kemudian realisasi sebesar 80,64% . Walaupun demikian masih ada penduduk yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrim, belum memiliki sanitasi dasar layak perlu dilakukan intervensi sesuai dengan lokasi prioritas (gambar. 68).



Gambar 84. Jumlah KK Miskin dan Miskin Ekstrim yang Belum Memiliki Sanitasi Dasar Layak
Sumber : BNBA P3KE, 2022

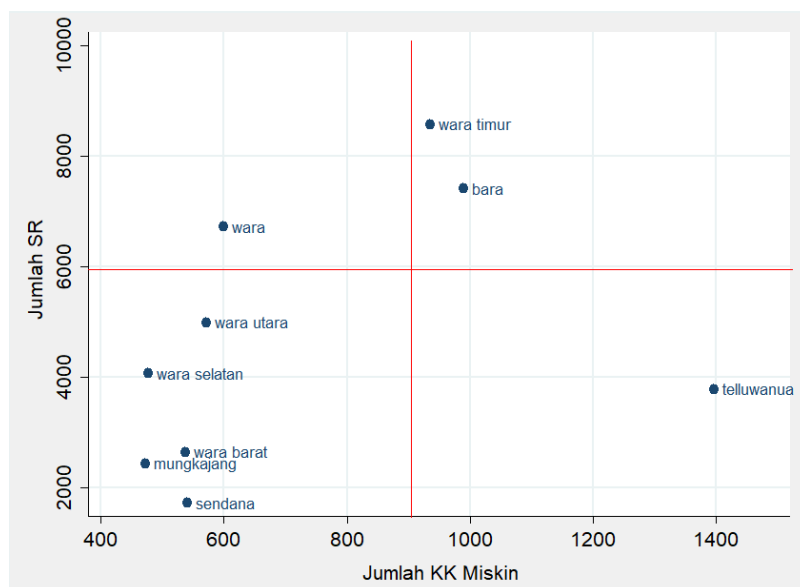
Berdasarkan penyandingan data kemiskinan P3KE dengan dokumen reuiu RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum), indikator urusan pemerintahan umum memberikan kontribusi percepatan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan air bersih dan air minum bagi keluarga miskin. Hasil proyeksi kebutuhan air minum per SR (sambungan rumah), selama tahun 2027-2032 mengalami peningkatan karena meningkatnya jumlah populasi setiap kecamatan. Kebutuhan air pada tahun 2022 Kota Palopo 361 Ltr/Detik dengan jumlah SR 37878. Tahun 2027 kebutuhan meningkat menjadi 383 Ltr/Detik dengan jumlah SR 40016, dan tahun 2032 404 Ltr/Detik dengan jumlah SR 42298.

Tabel 82. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Tahun 2027-2032 dan Jumlah Kepala Keluarga Miskin Belum Terakses Air Minum

Kecamatan	Eksisting			Proyeksi						Jumlah KK Miskin
	Tahun 2022			Tahun 2027			Tahun 2032			
	Pop	Kebutuhan Air Bersih(Ltr/Dtk)	Jumlah SR	Pop	Kebutuhan Air Bersih(Ltr/Dtk)	Jumlah SR	Pop	Kebutuhan Air Bersih(Ltr/Dtk)	Jumlah SR	
Wara Selatan	19748	37	3853	19781	38	3956	20310	39	4062	477
Sendana	7635	14	1516	8046	15	1609	8540	16	1708	541
Wara	32429	61	6412	32821	63	6564	33599	64	6720	599
Wara Timur	39356	75	7824	40951	78	8190	42870	82	8574	936
Mungkajang	10638	20	2096	11288	22	2258	12160	23	2432	472
Wara Utara	21228	41	4245	23002	44	4600	24927	48	4985	572
Bara	31525	60	6305	34161	65	6832	37019	71	7404	990
Telluwanua	16550	31	3281	17597	34	3519	18873	36	3775	1398
Wara Barat	11758	22	2346	12441	24	2488	13192	25	2638	537
	190867	361	37878	200088	383	40016	211490	404	42298	

Sumber : Dokumen Reuiu RISPAM, diolah

Merujuk pada tabel 82. kebutuhan air minum terbesar adalah kecamatan Wara Timur, diikuti dengan Bara, dan Wara. Ketiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang terletak di wilayah kota. Kecamatan kota identik dengan kepadatan penduduk, dan kepadatan pemukiman. Kemudian adanya SR non rumah tangga atau industry/usaha, sehingga berdampak pada kebutuhan air yang diminta sebagai kebutuhan non domestik. Disisi lain masih terdapat jumlah keluarga miskin yang belum terakses air minum/bersih. Data yang bersumber dari data P3KE jumlah KK yang belum terakses air minum terbanyak ada di kecamatan Telluwanua, diikuti Bara, Wara Timur, dst. Walaupun demikian untuk menetapkan lokasi prioritas tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah KK yang belum berakses air minum, tetapi juga kondisi SR yang sudah eksisting. Hasil analisis kuadran (Gambar.69) lokasi prioritas penyediaan air minum bagi KK miskin terletak di Kecamatan Wara Timur dan Bara.

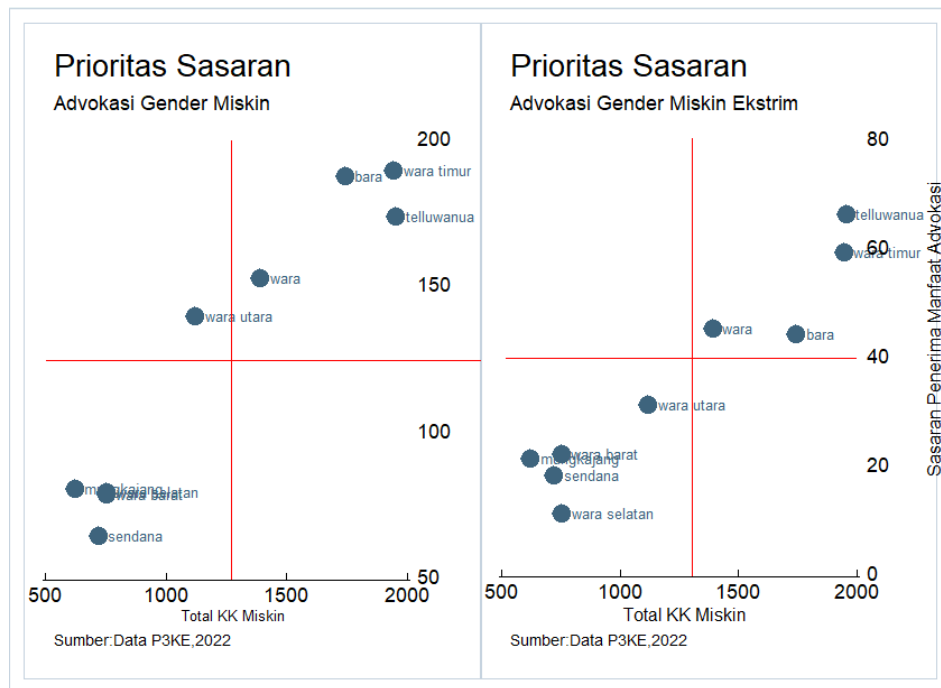


Gambar 85. Lokasi Prioritas Penyediaan Air Minum

5.1.14 Lokasi Prioritas Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan anak adalah bagian dari aksi pemerintah dalam mengangkat peran gender agar berkontribusi dalam pembangunan. Selain itu melindungi hak-hak atas perempuan dan anak. Perempuan, anak dan disabilitas merupakan masyarakat yang masuk dalam kondisi rentan atas marginalisasi pembangunan. Budaya di Indonesia masih menganut paham patriarki, sehingga menempatkan laki-laki sebagai pihak superior dalam keluarga. Perempuan hanya sebagai pendamping hidup, yang tidak lebih pada urusan domestik kasur, sumur, dan dapur. Tidak semua keluarga di Kota Palopo masuk dalam keluarga sejahtera, masih ada 7,78% (BPS, 2023) penduduk masuk dalam keluarga miskin. Isu kemiskinan dapat berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas. Kemiskinan yang dialami seorang keluarga dapat berpotensi terjadinya konflik rumah tangga baik yang dialami oleh perempuan (istri) maupun anak sehingga berakhir pada kasus KDRT.

Mengurangi potensi konflik rumah tangga dan meningkatnya kasus KDRT, maka perlu dilakukan advokasi yang ditujukan kepada keluarga miskin terutama sasaran berjenis kelamin perempuan, anak, dan disabilitas. Menggunakan data BNBA P3KE, dengan variable total KK miskin dan miskin ekstrim, dengan kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan berstatus kawin, cerai mati, dan cerai hidup. Lokasi prioritas untuk penduduk miskin adalah kecamatan Wara Timur, sedangkan miskin ekstrim adalah kecamatan Telluwanua.



Gambar 86. Lokasi Prioritas Advokasi Gender

5.2 PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penanggulangan kemiskinan di daerah tidak hanya dilakukan dengan aksi social baik yang dilakukan oleh dermawan, lembaga filantropi, maupun pelaku usaha melalui CSR-nya, tetapi harus diinisiasi oleh pemerintah daerah yang menjadi actor utama dalam menaggulangi kemiskinan di daerah. Pemerintah melalui APBD melaksanakan program penanggulangan kemiskinan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam prosesnya pemerintah daerah memiliki perangkat daerah yang mengampu urusan teknis yang berkaitan langsung dan tidak langsung dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah. Tidak semua perangkat daerah yang dimiliki Kota Palopo mengurus secara langsung penanggulangan kemiskinan, beberapa perangkat daerah hanya bersifat koordinasi, dan lainnya berupa pelaksanaan SPM bagi masyarakat yang wajib dipenuhi, maka dari itu diperlukan prioritas program kegiatan bagi perangkat daerah pengampu.

Strategi penanggulangan kemiskina Kota Palopo yang telah dibahas pada bab sebelumnya (Bab III), yang paling mudah dilaksanakan dan memiliki dampak paling signifikan adalah pengeluaran beban masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Strategi tersebut dilakukan melalui program dengan indicator capaian yang harus dicapai setiap tahunnya mulai tahun 2024-2026 (Tabel.83).

Prioritas program kegiatan dalam menanggulangi kemiskinan disajikan per urusan, program, kerangka pendanaan, dan perangkat daerah pengampu beserta pagu indikatif (Tabel.84). Kemudian program kegiatan yang lebih terinci sampai dengan sub kegiatan beserta target capaian disajikan pada sub bab selanjutnya (Sub bab 5.2.2).

5.2.1 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 83. Strategi Penanggulangan dan Target Capaian Tahun 2024-2026

Strategi	Program	Indikator Capaian	Target Capaian		
			2024	2025	2026
Pengurangan Beban masyarakat miskin	Pengelolaan Pendidikan	Angka Putus Sekolah/ APTs (%)	0	0	0
	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,49	71,79	71,92
	Pemberdayaan Sosial	Penduduk Miskin (%)	7.13	5.41	3.69
	Rehabilitasi Sosial		7.13	5.41	3.69
	Perlindungan Jaminan Sosial		7.13	5.41	3.69
	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Inflasi (%)	2,61	2,89	2,92
Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	TPT (%)	8,89	8,83	8,68
	Penempatan Tenaga Kerja	TPAK (%)	60,39	59,89	59,35
	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan Bahan Pangan Utama (%)			
	Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	Nilai Tukar Petani /NTP	95	100	105
	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Nilai Tukar Petani /NTP	95	100	105
	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Nilai Tukar Petani /NTP	95	100	105
	Penyuluhan pertanian	Nilai Tukar Petani /NTP	95	100	105
	Pengeloaan perikanan tangkap	Nilai Tukar Nelayan/NTN	110	115	120

Strategi	Program	Indikator Capaian	Target Capaian		
			2024	2025	2026
	Pengelolaan perikanan budidaya	Nilai Tukar Nelayan/NTN	110	115	120
	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Nilai Tukar Nelayan/NTN	110	115	120
	Pendidikan dan latihan perkoperasian	Koperasi Aktif(%)	77	77	77
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Koperasi Aktif(%)	77	77	77
	Pemberdayaan UMKM	Persentase UKM	78	79	82
	Pengembangan UMKM	Persentase UKM	78	79	82
	Pembinaan keluarga berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.5	1.25	1
	Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	35	40	45
	Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender / IPG	97,35	97,37	97,39
	Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2	1	0
	Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	100	100
Pengurangan Kantong Kemiskinan	Pengelolaan dan Pengembangan system air limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi	97	98	98

Strategi	Program	Indikator Capaian	Target Capaian		
			2024	2025	2026
	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Persentase penduduk berakses air minum	100	100	100
	Jasa Konstruksi	Rasio tenaga/operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	60	65	70
	Kawasan dan Permukiman	Rasio permukiman layak huni	95,89	96,34	96,65

5.2.2 Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 84. Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024-2026

Urusan	Program	Pagu Indikatif			Sumber	Perangkat Daerah Pengampu
		2024	2025	2026		
Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	40.270.070.500	40.270.070.500	40.270.070.500	APBD	Dinas Pendidikan
Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan masyarakat	97.184.927.820	97.184.927.820	97.184.927.820	APBD	Dinas Kesehatan
	Sediaan farmasi alat Kesehatan dan makan minum	456.867.000	456.867.000	456.867.000		
	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	450.000.000	450.000.000	450.000.000		
		98.091.794.820	98.091.794.820	98.091.794.820		
Pekerjaan Umum	Pengelolaan dan pngembangan SPAM	600.000.000	600.000.000	600.000.000	APBD	Dinas PU
	Pengelolaan dan pengembangan SPAL	200.000.000	200.000.000	200.000.000		
	Pengembangan Jasa konstruksi	72.100.000	72.100.000	72.100.000		
		872.100.000	872.100.000	872.100.000		
Perumahan	Pengembangan Perumahan	213.400.000	213.400.000	213.400.000	APBD	Dinas Perumahan
	Kawasan permukiman	651.836.250	651.836.250	651.836.250		
	Peningkatan prasarana utilitas umum (PSU)	398.647.000	398.647.000	398.647.000		
		1.263.883.250	1.263.883.250	1.263.883.250		

Urusan	Program	Pagu Indikatif			Sumber	Perangkat Daerah Pengampu
		2024	2025	2026		
Sosial	Pemberdayaan Sosial	115.098.500	115.098.500	115.098.500	APBD	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial	145.547.700	145.547.700	145.547.700		
	Perlindungan dan jaminan sosial	765.852.000	765.852.000	765.852.000		
		1.026.498.200	1.026.498.200	1.026.498.200		
Tenaga kerja	Perencanaan tenaga kerja	18.000.000	18.000.000	18.000.000	APBD	Dinas Tenaga kerja
	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	426.500.000	426.500.000	426.500.000		
	Penempatan tenaga kerja	72.100.000	72.100.000	72.100.000		
		516.600.000	516.600.000	516.600.000		
Ketahanan Pangan	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Dinas ketahanan pangan
Ketahanan Pangan	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	38.818.400	38.818.400	38.818.400	APBD	Dinas ketahanan pangan
	Penanganan Kerawanan pangan	36.250.000	36.250.000	36.250.000		
	Pengawasan keamanan pangan	21.261.000	21.261.000	21.261.000		
		296.329.400	296.329.400	296.329.400		
Kependudukan	Pengendalian penduduk	3.860.000.000	3.860.000.000	3.860.000.000	APBD	Dinas kependudukan dan pengendalian penduduk
	Pembinaan keluarga berencana	7.050.157.750	7.050.157.750	7.050.157.750		
	Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	1.285.962.000	1.285.962.000	1.285.962.000		
		12.196.119.750	12.196.119.750	12.196.119.750		

Urusan	Program	Pagu Indikatif			Sumber	Perangkat Daerah Pengampu
		2024	2025	2026		
Koperasi	Pendidikan dan Latihan koperasi	420.442.000	420.442.000	420.442.000	APBD	Dinas koperasi
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	4.100.000	4.100.000	4.100.000		
	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan mikro	210.469.000	210.469.000	210.469.000		
	Pengembangan UKM	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
		640.011.000	640.011.000	640.011.000		
Perikanan	Pengelolaan perikanan tangkap	633.300.000	633.300.000	633.300.000	APBD	Dinas perikanan dan kelautan
	Pengelolaan perikanan budidaya	130.502.500	130.502.500	130.502.500		
	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	205.047.825	205.047.825	205.047.825		
		968.850.325	968.850.325	968.850.325		
Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.711.471.260	4.711.471.260	4.711.471.260	APBD	Dinas pertanian perkebunan dan peternakan
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	707.251.088	707.251.088	707.251.088		
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	236.063.750	236.063.750	236.063.750		
	Penyuluhan Pertanian	129.948.770	129.948.770	129.948.770		
		5.667.780.975	5.667.780.975	5.667.780.975		
Perdagangan	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	664.277.061	664.277.061	664.277.061	APBD	Dinas perdagangan

Urusan	Program	Pagu Indikatif			Sumber	Perangkat Daerah Pengampu
		2024	2025	2026		
	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	543.753.070	543.753.070	543.753.070		
Perdagangan	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	29.980.000	29.980.000	29.980.000	APBD	Dinas perdagangan
		1.238.010.131	1.238.010.131	1.238.010.131		
Pembangunan kelurahan (Kewilayahan)	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	266.231.670	266.231.670	266.231.670	APBD	9 Kecamatan dan 48 kelurahan
		266.231.670	266.231.670	266.231.670		
Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	Dinas PPPA
	Perlindungan perempuan	18.000.000	18.000.000	18.000.000		
	Perlindungan anak	24.000.000	24.000.000	24.000.000		
		72.000.000	72.000.000	72.000.000		

5.2.3 Kegiatan Perangkat Daerah Pengampu Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 85 Bidang Urusan Pendidikan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	1.01.02.201.17	pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah peserta didik penerima manfaat perlengkapan siswa
		1.01.02.201.21	Penyediaan biaya personil peserta didik SD	Jumlah peserta didik SD penerima manfaat biaya personil
	Pengelolaan pendidikan menengah	1.01.02.202.28	pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah peserta didik penerima manfaat perlengkapan siswa
		1.01.02.202.32	Penyediaan biaya personil peserta didik SMP	Jumlah peserta didik SMP penerima manfaat biaya personil
		1.01.02.202.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik
		1.01.02.202.34	Perlengkapan belajar peserta didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
	Pendidikan PAUD	1.01.02.203.10	pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah peserta didik penerima manfaat perlengkapan siswa
		1.01.02.203.11	Penyediaan biaya personil peserta didik PAUD	Jumlah peserta didik PAUD penerima manfaat biaya personil
	Pengelolaan pendidikan non-formal dan kesetaraan	1.01.02.204.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia
		1.01.02.204.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik kesetaraan dan non-formal penerima manfaat biaya personil

Tabel 86. Bidang Urusan Kesehatan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.202.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
		1.02.02.202.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
		1.02.02.202.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
		1.02.02.202.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
		1.02.02.202.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
		1.02.02.202.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
		1.02.02.202.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
		1.02.02.202.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
		1.02.02.202.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penerima manfaat Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Tabel 87. Bidang Urusan Perumahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Program kawasan permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.203.02	perbaikan RTLH	Jumlah RTLH yang diperbaiki
		1.04.03.202.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar
		1.04.03.202.08	Pembangunan rumah baru layak huni	Jumlah RLH yang terbangun
Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.201.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.201.07	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun
		1.04.05.201.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian

Tabel 88. Bidang Urusan Sosial Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.203.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.02.203.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.02.203.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	1.06.04.201.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.201.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.201.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.201.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
	Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.201.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.201.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.201.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.201.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.201.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.201.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.201.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah	1.06.04.202.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.202.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.202.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.202.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.202.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.202.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.202.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.202.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
		1.06.04.202.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.202.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.202.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.202.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.04.202.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan anak terlantar	1.06.05.201.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.05.201.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.05.201.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.202.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
		1.06.05.202.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
		1.06.05.202.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		1.06.05.202.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Tabel 89. Bidang Urusan Kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.202.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.206.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
		7.01.03.206.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
		7.01.03.206.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
		7.01.03.206.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
		7.01.03.206.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
		7.01.03.206.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

Tabel 90. Bidang Urusan Ketenagakerjaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.201.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
		2.07.03.201.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n
		2.07.03.201.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja
PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.201.01	Pelayanan antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja
		2.07.04.201.02	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
		2.07.04.201.03	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
		2.07.04.201.04	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.203.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>
		2.07.04.203.04	<i>Job Fair</i> /Bursa Kerja	Terlaksananya <i>Job Fair</i> /Bursa Kerja

Tabel 91. Bidang Urusan Ketahanan Pangan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.201.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
		2.09.03.201.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia
		2.09.03.201.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
		2.09.03.201.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
		2.09.03.201.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.204.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
		2.09.03.204.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.201.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.202.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah

Tabel 92. Bidang Urusan Pertanian Peternakan dan Perkebunan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.201.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
		3.27.07.201.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
		3.27.07.201.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
		3.27.07.201.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Terbentuknya Badan Usaha Milik Petani
		3.27.07.201.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.201.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		3.27.05.201.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		3.27.05.201.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		3.27.05.201.04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Tertanggulangnya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
		3.27.05.201.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tertanggulangnya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.204.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
		3.27.04.204.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan
		3.27.04.204.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Ditetapkannya Pemenuhan Persyaratan Teknis
		3.27.04.204.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.01.204.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
		3.27.01.204.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Tersusunnya Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
		3.27.01.204.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
		3.27.01.204.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Tersusunnya Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan

Tabel 93. Bidang Urusan Kelautan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.201.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia
		3.25.03.201.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia
	<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	3.25.03.202.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang dibina
		3.25.03.202.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok yang difasilitasi
		3.25.03.202.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	3.25.04.202.01	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang dibina

		3.25.04.202.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang didampingi/difasilitasi
		3.25.04.202.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.204.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan yang produktif
		3.25.04.204.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.201.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.202.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	3.25.06.203.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi

Tabel 94. Bidang Urusan Kependudukan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Pembinaan Keluarga Berencana	Pengendalian dan distribusi kebutuhan alkon serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kab/kota	2.14.03.2.03		
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan kepesertaan penggunaan metode MKJP	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
		2.14.03.2.03.06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB
		2.14.03.2.03.07	Pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	2.14.04.2.01		
		2.14.04.2.01.01	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
		2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia
	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	2.14.04.2.02		
		2.14.04.2.02.05	Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan ormas dalam pengelolaan kelompok BKB,BKR,PIK-R,BKL,dan UPPKS	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Tabel 95. Bidang Urusan Perdagangan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Peningkatan distribusi perdagangan	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	3.30.03.2.01		
		3.30.03.2.01.01	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang dikelola
Stabilisasi harga barang dan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat daerah kab/kota	3.30.04.2.01		
		3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan baang penting di tingkat agen dan pasar rakyat
		3.30.04.2.01.03	Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat
	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya tingkat kab/kota	3.30.04.2.02		
		3.30.04.2.02.01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan poko dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang teringtekrasi

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
				dalam sistem informasi perdagangan
		3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam satu kab/kota	Jumlah Laporan dan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1(satu) kab/kota
Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	3.30.07.2.01		
		3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri tingkat kota/kab	Fasilitasi Pengadaan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Tabel 96. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR
Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02		
		2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
Perlindungan Perempuan	pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	2.08.03.2.01.		
		2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Perlindungan Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02		
		2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)

Tabel 97. Bidang Urusan Koperasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.05.201.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.05.202.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.17.05.203.03	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.203.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.17.07.203.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
		2.17.07.203.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM
		2.17.07.203.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
		2.17.07.203.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
		2.17.07.203.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.203.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Tabel 98. Bidang Urusan Perumahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Kawasan dan permukiman		1.04.03.2.03		
	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas <10 Ha	1.04.03.2.03.02	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki
		1.04.03.2.03.13	Pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)

Tabel 99. Bidang Urusan Pekerjaan Umum Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM	KEGIATAN	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Pengembangan jasa konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.03.11.201.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan
Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terbangunannya SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota

5.2.3 Upaya Konkret yang Telah Dilaksanakan dan Berjalan

Bentuk Penanggulangan Kemiskinan	Upaya Konkrit Intervensi	Pelaksana
Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha	Setiap kontrak atau SPK para kontraktor proyek konstruksi terdapat pasal yang mewajibkan pemilik proyek mempekerjakan tenaga kerja yang namanya tertera dalam DTKS, minimal sebesar....persen dari total tenaga kerja yang dipakai. Untuk buruh kasar, kontraktor wajib menggunakan seluruh tenaga kerja lokal sesuai DTKS / Data BNBA P3KE diawasi pihak kelurahan lokasi masing masing proyek konstruksi.	Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setiap OPD dan diasistensi oleh Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang & Jasa), Dinas PMPTSP (perizinan Perusahaan pengembang Perumahan/gedung/gudang), Lurah
	Memastikan setiap tahun, ada kelas khusus pelatihan kerja bagi warga yang namanya ada dalam DTKS / Data BNBA P3KE sebagai agenda tetap, dengan lebih dulu meminta saran dan tanggapan warga di masing-masing kelurahan (RT/RW) melalui kelurahan	Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian diawasi oleh Setda dan Bappeda
	Setiap pelatihan tenaga kerja, memastikan bahwa ada jatah sekian persen bagi warga miskin DTKS mendapat jatah pelatihan tenaga kerja. Atau ada pelatihan khusus atau keterampilan khusus bagi warga DTKS	Dinas Tenaga Kerja diawasi oleh Setda dan Bappeda
	Selain job fair reguler, dilaksanakan job fair khusus bagi warga DTKS sesuai kapasitas dan kompetensi mereka	Dinas Tenaga Kerja diawasi oleh Setda dan Bappeda
Penyuluhan dan Bimbingan Sosial	Target sasaran kegiatan yang sifatnya penyuluhan atau bimbingan kesejahteraan apapun oleh Perangkat Daerah, wajib mengikutsertakan warga dalam DTKS, dan pelaksanaannya diawasi oleh pihak kelurahan. (verifikasi dan validasi partisipasi warga DTKS). Pihak kelurahan melalui seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, kemudian melaporkan tingkat partisipasi ini ke Bagian Pemerintahan.	Dinas Sosial, Dinas P3A, Dinas PPKB, Bagian Pemerintahan Setda, Bagian Kesra Setda, Camat, Lurah, LPMK
Pelayanan Sosial	Target sasaran kegiatan yang sifatnya pelayanan sosial (bantuan sosial, dsb) atau apapun oleh Perangkat Daerah, wajib mengikutsertakan warga dalam DTKS, dan pelaksanaannya diawasi oleh pihak kelurahan. (verifikasi dan validasi partisipasi warga DTKS). Pihak kelurahan melalui seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, kemudian melaporkan tingkat partisipasi ini ke Bagian Pemerintahan.	Dinas Sosial, Bagian Pemerintahan Setda, Camat, Lurah, LPMK
Pelayanan Pendidikan	Jelas dan sudah dilakukan karena bagian dari pelaksanaan SPM	Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Camat, Lurah
Pelayanan Kesehatan	Jelas dan sudah dilakukan karena bagian dari pelaksanaan SPM	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Camat, Lurah

Bentuk Penanggulangan Kemiskinan	Upaya Konkrit Intervensi	Pelaksana
Pelayanan Perumahan	Target sasaran kegiatan yang sifatnya pelayanan perumahan layak huni, penuntasan kekumuhan, sanitasi dan air bersih, wajib mengikutsertakan atau dinikmati warga dalam DTKS, dan pelaksanaannya diawasi oleh pihak kelurahan. (untuk verifikasi dan validasi bahwa program ini manfaatnya diterima warga DTKS dilakukan pihak kelurahan). Pihak kelurahan melalui seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, kemudian melaporkan tingkat partisipasi ini ke Bagian Pemerintahan.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Camat, Lurah
Akses Pelatihan, Modal Usaha & Pemasaran Hasil	Target sasaran kegiatan yang sifatnya pelatihan, khusus bagi peserta yang namanya ada dalam DTKS juga wajib diberikan modal usaha berupa peralatan usaha dan wajib menjadi target sasaran pembinaan pemasaran oleh Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Industri secara sinergi dan kolaboratif (bersinergi). Dalam aspek komoditas bisa melibatkan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan serta tiga dinas diatas yakni Perdagangan, Koperasi dan Industri. Pelaksanaannya diawasi oleh pihak kelurahan. (verifikasi dan validasi partisipasi warga DTKS). Pihak kelurahan melalui seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, kemudian melaporkan tingkat partisipasi ini ke Bagian Pemerintahan.	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Sosial diawasi oleh Bappeda

